

Dana Listiana dan Lisyawati Nurcahyani
Epilog: Andi Achdian



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

NASIONALIS

**DI LINGKUNGAN ARISTOKRAT
ISLAM SAMBAS**



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

NASIONALIS

DI LINGKUNGAN ARISTOKRAT
ISLAM SAMBAS



Dana Listiana dan Lisyawati Nurcahyani

Epilog: Andi Achdian

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

mja
Media Jaya Abadi

NASIONALIS DI LINGKUNGAN ARISTOKRAT ISLAM SAMBAS

Penulis:

Dana Listiana
Lisyawati Nurcahyani

Epilog: Andi Achdian

Editor:

Izzudin Irsam Mujib & Asep Ruhimat

Desain Sampul dan Tata Letak:

Yuda A. Setiadi

Keterangan Gambar Sampul: Foto R.M. Nalaprana dan Uray Abdul Hamid (Koleksi Kedua Keluarga); Tugu 27 Oktober 1945 (Foto oleh Nata Dwikusuma Aditia); Lukisan Gedung Volksraad (Koleksi Tropenmuseum)

Cetakan pertama, Februari 2022

ISBN: 978-623-7526-54-4

Penerbit:

CV Media Jaya Abadi

Redaksi:

Balai Pelestarian Nilai Budaya
Padalarang-Bandung

Telp. +62 812 22205182

E-mail: penerbit.mja.bandung@gmail.com

Kalimatika Barat

Hak Cipta dilindungi undang-undang

*Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit*

Isi di luar tanggung jawab penerbit

DAFTAR ISI

VII

DAFTAR GAMBAR

XI

PRAKATA

1

PROLOG NASIONALIS DI LINGKUNGAN ARISTOKRAT
ISLAM SAMBAS
Dana Listiana—1

7

Bagian 1 RADEN MUSLIMUN NALAPRANA: BERSUARA UNTUK
KEMAJUAN KALIMANTAN BARAT

Dana Listiana

A. PENGANTAR—7

B. RADEN MUSLIMUN NALAPRANA: TENTANG
KELUARGA DAN KARIERNYA—9

C. FRAGMENT GILAT MUSLIMUN: DARI PELAJAR KRITIS
HINGGA WAKIL DAERAH —14

D. SIMPULAN—33

DAFTAR SUMBER—35

39

Bagian 2 URAY ABDUL HAMID BIN URAY MACHMUD:
TOKOH PENDIDIKAN DAN POLITIKUS (1945–1991)

Lisyawati Nurcahyani

- A. PENDAHULUAN —39
- B. LATAR KEHIDUPAN URAY ABDUL HAMID —45
- C. PEMIKIRAN DAN AKSI PERS —55
- D. PEMIKIRAN DAN AKSI POLITIK—58
- E. PEMIKIRAN DAN AKSI PENDIDIKAN —66
- F. PENDAPAT DAN HARAPAN —69
- G. PENUTUP —71
- DAFTAR PUSTAKA —72

75

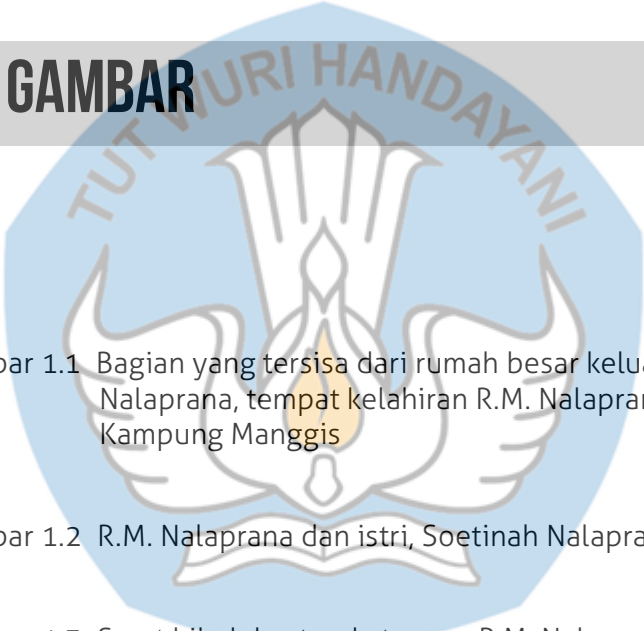
EPILOG *Andi Achdian*

79

TENTANG PENULIS

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

DAFTAR GAMBAR

- 
- 10 Gambar 1.1 Bagian yang tersisa dari rumah besar keluarga Nalaprana, tempat kelahiran R.M. Nalaprana, di Kampung Manggis
- 12 Gambar 1.2 R.M. Nalaprana dan istri, Soetinah Nalaprana
- 13 Gambar 1.3 Surat hibah bertanda tangan R.M. Nalaprana yang menerangkan identitasnya
-
- 17 Gambar 1.4 Surat pembaca kiriman R.M. Nalaprana
- 18 Gambar 1.5 R.M. Nalaprana bersama rekan organisasi
- 20 Gambar 1.6 Catatan pidato R.M. Nalaprana dalam rapat PAB
- 25 Gambar 1.7 Nalaprana bersama anggota Volksraad di Gedung Volksraad, Pejambon

26

Gambar 1.8 R.M. Nalaprana dalam sidang Volksraad

31

Gambar 1.9 R.M. Nalaprana dalam *Soera Pakat*

51

Gambar 2.1 Pengasuh, Hanunah, Sabihah, dan No'ma

52

Gambar 2.2 Uray Abdul Hamid (UAH) beserta keponakan, Hanuna, dan Uray Burhan

64

Gambar 2.3 UAH ditemani oleh Hanuna, istrinya, yang sedang mengunjunginya di rumah sakit di Yogyakarta.

64

Gambar 2.4 Mahasiswa Kalimantan Barat yang menempuh pendidikan di Yogyakarta mengunjungi UAH di rumah sakit Yogyakarta.

65

Gambar 2.5 UAH berkunjung ke tempat Uray Bawadi dan keluarga.

65 Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

65

Gambar 2.6 Kartu keanggotaan Legiun Veteran Republik Indonesia UAH

Gambar 2.7 Piagam penghargaan yang diberikan kepada UAH sebagai pejuang kemerdekaan dari Departemen Pertahanan dan Keamanan

65

Gambar 2.8 Piagam penghargaan yang diberikan kepada UAH sebagai sebagai pejuang Angkatan 45 dari DHD 45

68

Gambar 2.9 Surat balasan untuk UAH dari sahabatnya, Moch. Tauchid



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

NASIONALIS

DI LINGKUNGAN ARISTOKRAT
ISLAM SAMBAS



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

PRAKATA

Nasionalis di Lingkungan Aristokrat Islam Sambas merupakan salah satu seri "Inventarisasi Tokoh Sejarah dan Budaya" dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021. Secara teknis, program ini bertujuan untuk mendukung pengusulan calon pahlawan serta penerima Anugerah Kebudayaan dan Penghargaan Maestro Seni Tradisi. Terkait dengan tujuan pertama, tulisan ini mengajukan hasil kajian awal tentang sosok yang memiliki peran kebangsaan dari Kalimantan Barat. Secara substansial, penulisan tokoh kebangsaan ini diharapkan dapat melengkapi pemahaman historis akan identitas kebangsaan Indonesia yang merupakan bagian dari pendidikan politik.

Studi tentang tokoh sejarah dalam tulisan ini ditempatkan sebagai jendela untuk memahami perkembangan nasionalisme di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Melalui tokoh yang tentunya berfokus pada aspek kepribadian dan perannya, studi nasionalisme ini diharapkan dapat menghasilkan sisi kemanusiaan yang unik.

Mengajukan dua tokoh yang berasal dari lingkungan sosial budaya yang sama, tulisan ini menunjukkan bahwa setiap individu akan menghasilkan ide dan pergerakan khas lewat berbagai dialog ide di beragam tempat persemaian. Melalui Raden Muslimun Nalaprana dan Uray Abdul Hamid, tulisan ini menyuguhkan ide dan praktik nasionalisme dalam transformasi struktural, yakni dari sistem feodal-kolonial ke sistem demokratis-nasional. Raden Muslimun Nalaprana, seorang aristokrat dan birokrat, tumbuh menjadi nasionalis kanan yang kooperatif. Adapun Uray Abdul Hamid tumbuh menjadi seorang nasionalis kiri anti-kolonial.

Idenya termanifestasi melalui aksi heroik bersama laskar-laskar pemuda Sambas dalam situasi revolusi kemerdekaan hingga situasi yang kerap disebut era pembangunan pada masa Orde Baru.

Lebih lanjut, tulisan ini diharapkan dapat memberi pemahaman bahwa bentuk, corak, dan dimensi nasionalisme itu beragam. Selain itu, terdapat sebuah sikap nasionalisme serupa yang dapat dipetik dari kedua tokoh, yakni semangat membangun daerah. Sebuah sikap nasionalisme yang selalu relevan untuk diteruskan oleh generasi selanjutnya.



Pontianak, Desember 2021

Penulis

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



PROLOG

NASIONALIS DI LINGKUNGAN ARISTOKRAT

ISLAM SAMBAS

DANA LISTIANA

Studi tentang nasionalisme di Kalimantan Barat¹ menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia berlangsung bertahap dalam beragam kerangka ide dan gerakan. Spektrum ideologi kiri hingga kanan terekam dalam surat kabar lokal. Koran-koran merah seperti *Halilintar* dan *Berani* merekam jejak ideologi kiri hingga koran yang sarat konten kemajuan ekonomi bahkan gerak kapitalisme, seperti *Sinar Borneo* merekam jejak ideologi kanan di Kalimantan Barat.

Berbagai ideologi tersebut, untuk konteks Kalimantan Barat yang berada di luar pusat arus nasionalisme, akan menciptakan imajinasi nasionalisme yang berbeda. Perjalanan historis masyarakat Kalimantan untuk menjadi Indonesia juga tidak sama dengan pengalaman di daerah lain, walau pengalaman tiap-tiap daerah saling memberi pengaruh satu sama lain dan pada momen-momen tertentu mengalami pertemuan ide. Beragam perjalanan tersebutlah yang sebaiknya

1 Soedarto, Widodo Adhisidharto, dan Sugeng, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat* (Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978/1979); Ya' Achmad, Amsar Rachman, Soedharto, dan Widodo Adhisidharto, *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Barat* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981); Dana Listiana, Lisyawati Nurcahyani, dan Any Rahmayani, *Wacana Nasionalisme dalam Pers Kalimantan Barat pada Masa Pergerakan Kebangsaan* (Bandung: BPNB Kalbar-MJA, 2019).

dikemukakan sehingga kesadaran sejarah diperoleh secara utuh. Dengan demikian, penghayatan makna dan kesadaran sejarah dapat membentuk kesadaran nasional yang tidak parsial dan matang.

Jika selama ini gejala nasionalisme di Kalimantan Barat kerap digali dari ideologi dan organisasi, maka tulisan ini menempatkan para tokoh sebagai jendela untuk memahami perkembangan nasionalisme. Untuk itu, tulisan ini mengajukan dua tokoh yang belum mendapat perhatian masyarakat meski memiliki kontribusi dalam pergerakan kebangsaan di Kalimantan Barat.

Berbagai tulisan tentang tokoh-tokoh nasionalis yang telah ditulis oleh para penulis daerah baru terbatas pada tokoh-tokoh asal Landak, Kapuas Hulu, dan Pontianak, seperti Rais Abdurrahman,² Oevang Oeray,³ Djeranding Abdurrahman,⁴ dan sejumlah tulisan pendek tentang Gusti Sulung Lelanang.⁵

Tokoh nasionalis dari daerah lain belum mendapat perhatian. Begitu pula tokoh nasionalis dari daerah Sambas, sebuah daerah di pesisir utara Kalimantan Barat yang dikenal luas sebagai masyarakat literer karena menghasilkan banyak tokoh cerdas cendekia. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah interaksi Sambas, sebagai salah satu kerajaan tertua di Kalimantan Barat, dengan dunia luar sejak awal Masehi.⁶ Sebagai kerajaan maritim, Sambas pun telah kedatangan tidak hanya pedagang, tetapi juga para intelektual Islam dari berbagai kawasan dunia, baik dari wilayah Nusantara hingga Hadramaut (Listiana, 2020).

Interaksi tersebut membuat Sambas menghasilkan banyak tokoh pembaharu, khususnya di bidang keagamaan. Banyak tokoh Sambas yang

2 Lihat Lisyawati Nurcahyani, "Pemikiran Haji Rais bin Abdoerrachman dan Masa Pergerakan Nasional di Kalimantan Barat (1900–1942)", dalam *Wacana Nasionalisme dalam Pers Kalimantan Barat pada Masa Pergerakan Kebangsaan* (Bandung: BPNB Kalbar-MJA, 2019).

3 Lihat Aju, J.C. *Oevang Oeray: Dari Federasi Ke NKRI* (Pontianak: Derwati Press, 2017).

4 Lihat Aju dan Syafaruddin Usman, *Djeranding Abdurrahman: Dari Kalimantan Barat ke Boven Digoel* (Pontianak: Samudera Mas, 2012).

5 Lihat Juniardi, Karel, "Riwayat Gusti Sulung Lelanang Pontianak", dalam *Laporan* (Pontianak: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2009).

6 Hubungan Sambas dengan dunia luar terdeteksi telah terjadi sejak sebelum Masehi melalui temuan nekara dan berbagai benda berciri kebudayaan Dongson. Selain temuan yang menunjukkan interaksi budaya dengan India dan daerah-daerah Asia Tenggara (McKinnon, 1994; Harrisson, 1949) tersebut, Sambas juga kaya akan jejak arkeologis penanda relasi dengan wilayah lain pada masa selanjutnya. Temuan arca dan plat logam berlanggam Sailendra abad ke-8 menunjukkan pengaruh Jawa atau Sumatra dan Semenanjung Malaya (Griffiths, 2014: 141–150, Utomo, 2007: 11). Begitu pula benda koleksi Museum Daerah Sambas, seperti keramik dan senjata yang terutama menunjukkan hubungan dengan Nusantara serta India dan Cina (Museum Daerah Sambas, TT).

telah dikaji oleh para sarjana, seperti berbagai tulisan tentang Sultan Muhammad Tsafiuiddin II, Maharaja Imam Sambas Basiuni Imran, dan Imam Khatib Sambas.⁷ Akan tetapi, tokoh yang mengemuka terbatas di lingkungan Kesultanan Sambas dan pergerakan Islam, sedangkan tokoh nasionalisnya belum mengemuka.

Keberadaan tokoh nasionalis di lingkungan kultur Islam Melayu Sambas dapat dikatakan suatu anomali di antara arus besar ideologi Islam. Kalaupun muncul gejala “Nasionalisme Islam” dari para tokoh pembaharu Islam Sambas, narasinya tetap dibalut oleh ideologi utama.

Oleh karena itu, tulisan ini berfokus pada dua tokoh dari lingkungan kultur Istana Melayu Sambas yang ide dan pergerakannya dikenal bukan berwarna Islam. Raden Muslimun Nalaprana dan Uray Abdul Hamid dipilih justru karena pertumbuhan ide nasionalisme mereka yang berbeda dengan para tokoh di daerah asalnya.

Uniknya, kedua sosok yang di Jawa disebut sebagai priayi ini pun menumbuhkan ideologi nasionalisme yang berbeda. Raden Muslimun Nalaprana, seorang aristokrat dan birokrat, tumbuh menjadi nasionalis kanan yang kooperatif. Pertemuannya dengan para tokoh nasionalisme Indonesia dalam pusaran utama pergulatan ide Indonesia, ditambah perjumpaan dengan para tokoh nasionalis Kalimantan Barat lain, membentuk ide nasionalisme yang dikemukakannya menjadi khas dan berbeda. Adapun Uray Abdul Hamid tumbuh menjadi seorang nasionalis kiri yang pertemuannya kemudian terlecut dalam aksi heroik bersama laskar-laskar pemuda Sambas dalam situasi revolusi kemerdekaan.

Melalui studi tentang kedua tokoh ini, perkembangan nasionalisme di daerah Sambas juga dapat dipelajari karena puncak kiprah mereka adalah sebuah kelanjutan sejarah. Raden Muslimun Nalaprana, elite bangsawan yang bekerja bersama kaum kolonial, pemahaman nasionalismenya tumbuh di dalam sistem kolonial. Sementara itu, Uray Abdul Hamid sikap nasionalismenya tumbuh menjadi nasionalisme anti-kolonialisme pada masa-masa menjelang kemerdekaan.

⁷ Antara lain tulisan berikut. Erwin Mahrus, Rosadi Jamani, dan Edy Kusnan Hadi, *Shaykh Ahmad Khatib Sambas: Sufi & Ulama Besar Dikenal Dunia (1803-1875)* (Pontianak: Untan Press-Yayasan Adikarya IKAPI-The Ford Foundation, 2003); Risa, *Perkembangan Islam di Kesultanan Sambas: Kajian Atas Lembaga Keislaman Pada Masa Pemerintahan Sultan Muhammad Syafiuiddin II Tahun 1866-1922 M* (Yogyakarta: Ombak, 2016); Didik M. Nur Haris dan Rahimin Affandi Abdul Rahim, “Pemikiran Keagamaan Muhammad Basiuni Imran” dalam *Al-Banjari* Vol. 16, No. 2, 2017, hlm. 161–185; Zulkifli, “Haji Moehamad Basioeni Imran (1885–1976) Ulama Pembaharu dari Kerajaan Sambas Kalimantan Barat”, Disertasi pada FIB Unpad, Bandung, 2017.

Berpijak pada latar belakang tersebut, tulisan ini mempertanyakan gagasan dan praktik nasionalisme seperti apa yang mengemuka dari kedua tokoh dari lingkungan kultur elite Melayu Sambas dalam kelanjutan periode sejarah. Sebagaimana yang telah diuraikan, kedua tokoh yang dimaksud adalah Raden Muslimun Nalaprana dan Uray Abdul Hamid. Adapun periode sejarah yang dimaksud adalah masa kolonial, revolusi kemerdekaan, hingga masa pembangunan pada era Orde Baru.

Melalui pertanyaan tersebut, tulisan yang merupakan bagian dari program Inventarisasi Tokoh Sejarah dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat ini dapat berkontribusi dalam pendidikan kebangsaan. Usaha menghadirkan kedua sosok ini bertujuan untuk memberi pemahaman bahwa nasionalisme memiliki banyak corak, bentuk, dan dimensi. Pengetahuan akan ragam corak nasionalisme tersebut diharapkan dapat melengkapi pemahaman historis akan identitas kebangsaan Indonesia.

Secara substansial, bunga rampai ini bertujuan menyebarluaskan narasi sejarah mengenai ide dan praktik nasionalisme tokoh Kalimantan Barat yang kiprahnya belum dikenal luas, bahkan oleh masyarakat Kalimantan Barat. Narasi tentang tokoh dalam bunga rampai ini terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama ditulis oleh Dana Listiana dengan judul "Raden Muslimun Nalaprana: Bersuara untuk Kemajuan Kalimantan Barat". Bagian kedua yang ditulis oleh Lisyawati Nurcahyani berjudul "Uray Abdul Hamid bin Uray Machmud: Tokoh Pendidikan dan Politikus (1945–1991)". Melalui dua tulisan ini, penulis mengajukan ide-ide nasionalisme dari kedua tokoh yang terkristal pada kelanjutan periode serta gambaran pengalihan ide-ide nasionalisme dari masa ke masa dalam perubahan situasi sosial. Meski menunjukkan sikap nasionalisme yang berbeda, dari kedua tokoh ini dapat dipetik kesamaan sikap, yakni semangat membangun daerahnya. Sebuah praktik sikap nasionalisme yang selalu relevan untuk diteruskan oleh generasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ya', Amsar Rachman, Soedharto, dan Widodo Adhisidarto. 1981. *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Aju. 2017. *J.C. Oevang Oeray: Dari Federasi ke NKRI*. Pontianak: Derwati Press.

Aju dan Syafaruddin Usman. 2012. *Djeranding Abdurrahman: Dari Kalimantan Barat ke Boven Digoel*. Pontianak: Samudera Mas.

Griffiths, Arlo. 2014. "Written Traces of the Buddhist Past: Mantras and Dhāraīs in Indonesian Inscriptions", dalam *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 77 (01), hlm. 137–194.

Haris, Didik M. Nur dan Rahimin Affandi Abdul Rahim. 2017. "Pemikiran Keagamaan Muhammad Basiuni Imran" dalam *Al-Banjari* Vol. 16, No. 2, hlm. 161–185.

Harrisson, Tom. 1949. "Gold & Indian Influences in West Borneo", dalam *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society*, Vol. 22, No. 4.

Juniardi, Karel. 2009. "Riwayat Gusti Sulung Lelanang. Pontianak." *Laporan*. Pontianak: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Listiana, Dana, Lisyawati Nurcahyani, dan Any Rahmayani. 2019. *Wacana Nasionalisme dalam Pers Kalimantan Barat pada Masa Pergerakan Kebangsaan*. Bandung: BPNB Kalbar-MJA.

Listiana, Dana dan Asnaini. 2020. *Manuskrip Kitab Qonun Sambas: Wawasan Ruang Perairan Versus Daratan*. Bandung: BPNB Kalbar-MJA.

Mahrus, Erwin, Rosadi Jamani, dan Edy Kusnan Hadi. 2003. *Shaykh Ahmad Khatib Sambas: Sufi & Ulama Besar Dikenal Dunia (1803-1875)*. Pontianak: Untan Press-Yayasan Adikarya IKAPI-The Ford Foundation.

McKinnon, E. Edwards. 1994. "The Sambas Hoard: Bronze Drums, and Gold Ornaments Found in Kalimantan in 1991," dalam *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, Vol. 67, No. 1.

Risa. 2016. *Perkembangan Islam di Kesultanan Sambas: Kajian Atas Lembaga Keislaman Pada Masa Pemerintahan Sultan Muhammad Syaifiuddin II Tahun 1866-1922 M*. Yogyakarta: Ombak.

Soedarto, Widodo Adhisidharto, dan Sugeng. 1978/1979. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat*. Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Utomo, Bambang Budi. 2007. "Budha dan Sangha di Nusantara pada Abad Ke-9-13 Masehi," dalam *Jejak Peradaban Nusantara Abad ke-9 s.d. 13*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional-Konferensi Agung Sangha Indonesia.

Zulkifli. 2017. "Haji Moehamad Basioeni Imran (1885–1976) Ulama Pembaharu dari Kerajaan Sambas Kalimantan Barat." Disertasi. Bandung: FIB Unpad.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

BAGIAN 1

RADEN MUSLIMUN NALAPRANA: BERSUARA UNTUK KEMAJUAN KALIMANTAN BARAT

DANA LISTIANA

A. PENGANTAR

Gejala nasionalisme di Kalimantan Barat memiliki banyak corak. Hal ini dibuktikan oleh keberadaan organisasi yang terekam di koran-koran lokal, mulai dari Nationaal Indische Partij yang bernama lain Insulinde, Sarekat Rakyat, Partai Indonesia Raya (Parindra), Muhammadiyah, hingga Persatoean Anak Borneo.

Di antara berbagai organisasi tersebut, Sarekat Rakyat dan Parindra adalah organisasi yang paling terkemuka sehingga selalu menjadi perbincangan dalam diskusi-diskusi pergerakan nasional Kalimantan Barat. Dalam skop Indonesia, organisasi dengan ideologi kiri atau yang berpaham non-kooperatif kerap dianggap lebih berperan sehingga lebih menarik minat pembahasan. Padahal, riset Fakih (2014) menunjukkan bahwa akar-akar nasionalisme Indonesia sebenarnya muncul dan berkembang dari politik kanan, bukan dari politik kiri sebagaimana selama ini dipahami. Bentuk-bentuk nasionalisme awal seperti nasionalisme etnik (Miert, 1996) dan nasionalisme regional (Henley, 1993) merupakan bukti tesis tersebut.

Mengacu pada pandangan Fakih, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi spektrum kanan gejala awal nasionalisme di Kalimantan

Barat. Eksplorasi tidak dilakukan melalui organisasi ataupun aktivitas organisasi pergerakan seperti usaha para peneliti sebelumnya,¹ tulisan ini menelusuri gagasan nasionalisme melalui tokoh.

Adapun untuk menjelaskan bentuk nasionalisme yang dihasilkan oleh Raden Muslimun Nalaprana, tokoh dalam pembahasan artikel, diacu prinsip nasionalisme dari Kartodirdjo (1994: 43). Menurutnya, nasionalisme memiliki lima prinsip, yaitu kesatuan, kebebasan, persamaan, kepribadian, dan pencapaian (cita-cita).

Oleh karena itu, pertanyaan utama tulisan ini adalah “gagasan nasionalisme seperti apa yang tumbuh pada spektrum politik kanan di Kalimantan Barat?” Dalam studi yang bersifat eksploratif ini, pintu masuk untuk menelusurinya melalui tokoh, sehingga secara khusus mempertanyakan “siapa dan apa peran tokoh Raden Muslimun Nalaprana dalam perkembangan nasionalisme di Kalimantan Barat?”

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini disusun menggunakan metode sejarah. Tahap pertama adalah heuristik, yang mencakup penelusuran sumber pustaka dan lisan. Penelusuran sumber pustaka primer berupa majalah dan surat kabar sezaman yang memberitakan aktivitas dan pekerjaan R.M. Nalaprana, serta dokumen pemerintah kolonial terkait jabatan pemerintahan, terutama di Perpustakaan Nasional RI dan perpustakaan digital Delpher. Sumber tulisan berupa dokumen pribadi ditelusuri di keluarga R.M. Nalaprana, sedangkan silsilah keluarga ditelusuri dari beberapa keluarga kerabat Istana. Penelusuran sumber lisan dilakukan di Sambas dan Pontianak, dua daerah tempat Muslimun dan keluarganya tinggal, serta via telepon kepada keluarga Muslimun di luar kedua kota tersebut. Wawancara dilakukan antara lain terhadap keluarga Muslimun, para kerabat Istana Alwatzikubillah Sambas, dan para peneliti sejarah Sambas.

Sumber yang diperoleh kemudian diperiksa melalui tahap kritik. Tahap kritik yang terbilang berat adalah memverifikasi data terkait asal-usul R.M. Nalaprana dan keluarga. Perbandingan data lisan dan dokumen

1 Soedarto, Widodo Adhisidharto, dan Sugeng, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat* (Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978/1979); Ya' Achmad, Amsar Rachman, Soedharto, dan Widodo Adhisidarto, *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Barat* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981); Dana Listiana, Lisyawati Nurcahyani, dan Any Rahmayani, *Wacana Nasionalisme dalam Pers Kalimantan Barat pada Masa Pergerakan Kebangsaan* (Bandung: BPNB Kalbar-MJA, 2019); Firmansyah, “Sejarah Muhammadiyah di Sambas 1932–1942”, dalam *Bunga Rampai Seni, Budaya & Sejarah Pejuang Sambas* (Pontianak: Top Indonesia, 2017).

dari keluarga R.M. Nalaprana, ingatan kolektif kerabat bangsawan Sambas tentang asal-usul keturunan Nalaprana, serta dokumen resmi pemerintah kolonial menjadi kunci kepastian informasi dalam penjelasan informasi lain yang berkait.

Data-data yang telah dikritik selanjutnya dianalisis dalam tahap interpretasi. Tahap interpretasi dikerjakan menggunakan analisis isi (*content analysis*) karena sumber utama praktik nasionalisme tokoh adalah berita dan laporan aktivitas R.M. Nalaprana, baik berupa narasi pidato maupun usulan-usulannya yang memuat sikap terhadap isu-isu kebangsaan.

Terakhir, adalah tahap historiografi. Pada tahap ini, hasil interpretasi dirangkai menjadi kesatuan peristiwa sejarah secara kronologis sehingga harmonis dan masuk akal.

B. RADEN MUSLIMUN NALAPRANA: TENTANG KELUARGA DAN KARIERNYA

Raden Muslimun Nalaprana (selanjutnya disebut Muslimun atau Nalaprana) lahir pada 2 Oktober 1900 di Kampung Manggis, Sambas (Arsip Keluarga R.M. Nalaprana, 1943). Muslimun adalah generasi kelima keturunan dari Sultan Sambas ke-5. Ayahnya bernama Raden Hindu Nalaprana bin Pangeran Suradilaga Usman bin Raden Senon gelar Pangeran Bendahara Sri Maharaja bin Pangeran Tajudin gelar Pangeran Laksamana Kubu bin Raden Jamak gelar Sultan Umar Aqamuddin II/ Sultan Sambas ke-5.²

Raden Hindu adalah orang pertama bernama keluarga Nalaprana. Nama keluarga yang kemudian hanya diturunkan kepada keturunan laki-laki ini diberikan oleh Sultan Muhammad Tsafuddin II, Sultan Sambas ke-13, pada akhir abad ke-19. Raden Hindu adalah bangsawan yang tidak berada di bawah garis keturunan sultan yang sedang berkuasa. Meskipun demikian, Raden Hindu Nalaprana berkedudukan penting sebagai anggota Dewan Pengadilan (*Landraad*) Sambas di bawah pimpinan

² Wawancara Uray Yung Suliadi, cucu kemenakan R.M. Nalaprana (71 tahun), via telepon, September 2021; Akbar S., 1989; Fahmi, 2004; Ismail, TT. Silsilah yang disusun oleh tiga kerabat Istana Sambas tersebut tidak memuat keturunan Raden Hindu Nalaprana. Terputus atau tidak tercatat keturunan selanjutnya karena ketiadaan informasi akibat keturunan keluarga tertentu sudah tidak tinggal lagi di Sambas (Wawancara Kerabat Istana Sambas, September 2021).

asisten residen.³ Karenanya, ia diberi gelar kiai dan menjadi satu dari dua belas keluarga terkemuka di lingkungan Istana Kesultanan Sambas yang memiliki bendera kebesaran (*Regerings-Almanak*, 1870: 82-83; Chijs, 1885: 140–141).



Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 1.1 Bagian yang tersisa dari rumah besar keluarga Nalaprana, tempat kelahiran R.M. Nalaprana, di Kampung Manggis (kanan). Kampung Manggis (kini, Kampung Tumuk Manggis) adalah kampung tua yang terletak di tepian Sungai Sambas Kecil.

Muslimun diketahui adalah putra bungsu dari tiga bersaudara. Kedua abangnya, Raden Tauran dan Raden Mauran adalah pejabat pemerintahan (demang/wedana) di Kalimantan Barat. Jabatan tersebutlah yang membuat ketiga bersaudara tersebut memperoleh gelar raden dari sultan.⁴ Sebelum menjadi pejabat pemerintah, mereka mengenakan nama kebangsawanan umum bagi kerabat Kesultanan Sambas yakni *oerai* (*urai*) sebagaimana yang dikenakan oleh Muslimun. Hal ini terdokumentasi dalam berita-berita koran, pun dalam bentuk akronim O.M.N. saat ia menulis di koran (*Borneo Barat Bergerak* No. 12, 1920: 7; *Bataviaasch Nieuwsblad* No.1, Desember 1936: 16)

Ketiga bersaudara Nalaprana diduga meninggalkan Sambas sejak usia sekolah, sebagaimana Muslimun dalam tulisannya di surat pembaca *Borneo Barat Bergerak* (No. 12, 1920: 7), hingga usia kerja. Selanjutnya,

- 3 Urutan anggota Dewan Pengadilan Sambas yang semasa Raden Hindu Nalaprana adalah Pangeran Laksamana, Pangeran Sura Di Laya, Pangeran Ratu Mankoe Negara, Pangeran Ratu Nata Kesuma, Pangeran Jaya Kesuma, Suma Di Laya, Kiai Nalaprana, Kiai Braja Wangsa, Liau Kang Sin, Liem Kap, Wingsjang (*Regerings-Almanak*, 1870). Orang pertama dalam urutan keanggotaan, Pangeran Laksamana, adalah penyalin kitab undang-undang hukum Kesultanan Sambas *Kitab Qonun Aturan Adat Raja Zaman Dahulu* (Listiana dan Asnaini, 2020).
- 4 Wawancara Uray Yung Suliadi bdk. wawancara Sekretaris Majelis Pemangku Adat Istiadat Kesultanan Sambas yang menjelaskan bahwa gelar *raden* dalam Kesultanan Sambas diberikan sebagai penghormatan atas jasa atau prestasi. Sementara itu, *oerai* adalah gelar umum yang diperoleh berdasarkan kelahiran (keturunan).

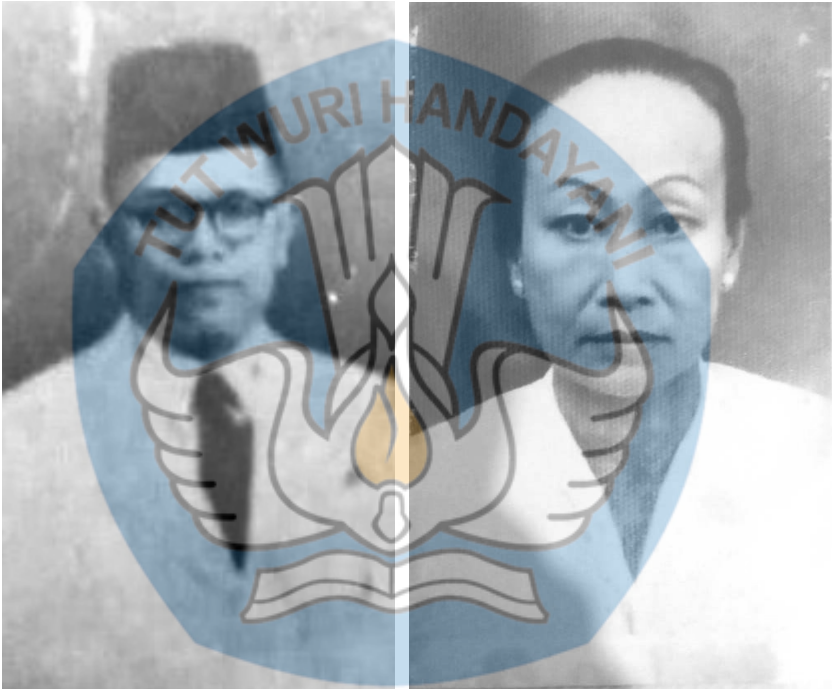
mereka juga sepertinya tidak lagi bermukim di Sambas karena berdasarkan informasi Uray Yung Suliadi, diketahui telah ada “rumah besar” keluarga yang menjadi tempat berkumpul Muslimun dan dua orang abangnya di Kampung Bansir, Pontianak. Oleh karena itu, “nama” mereka kurang dikenal oleh masyarakat Sambas⁵ dan tidak tercatat dalam silsilah yang disusun oleh sejumlah kerabat Istana Sambas (Akbar S., 1989; Fahmi, 2004; Ismail, TT).

Muslimun diketahui adalah lulusan Speciale School Sambas yang kemudian menjadi Hollandsch-Inlandsche School (HIS) pada 1915 (*Borneo Barat Bergerak*, 15 Maret 1920: 7–8; Akbar S., 1989: 4). Ia dan kedua abangnya mengikuti sekolah pamong praja Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA). Ia juga terdeteksi mengikuti kursus-kursus pengelolaan administrasi kota (Soedarto *et al.*, 1978/1979: 56; *Het Nieuws van den Dag* No. 296, 24 Desember 1929: 17). Kabar kelulusannya dari Kursus Perkantoran Kota (*Gemeentelijke Bureau Cursus*) di Batavia juga terbilang istimewa karena dalam kabar tersebut diumumkan pula bahwa para peserta dari daerah-daerah di Hindia Belanda yang tidak lulus dan harus mengulang ujian. Muslimun dan sejumlah rekannya yang lulus disebut dipromosikan ke kelas 2 (*Het Nieuws van den Dag* No. 296, 24 Desember 1929: 17).

Adapun karier Muslimun yang terdeteksi melalui koran adalah sebagai pegawai di Kantor Pusat Statistik pada tahun 1936 (*Bataviaasch Nieuwsblad* No.1, Desember 1936: 16). Jabatan yang paling dikenal dari Muslimun adalah sebagai demang kelas 1 di Pontianak. Selain itu, Muslimun diketahui juga menjadi pegawai Departemen Urusan Ekonomi di Kantor Urusan Perdagangan, yakni sebagai anggota Biro Ekspor untuk Kantor Pusat Komoditas Damar (Bestuur Harsen Centrale) dan sebagai anggota Dewan Penyelidik di Dana Kopra (Het Coprafonds). Jabatan pertama diangkat berdasarkan SK tanggal 23 Februari 1938, No. 30. Sementara pekerjaan kedua diangkat berdasarkan akte van 19 September 1940 (*Regerings-Almanak II*, 1939–1942; *De Indische Courant* No. 18, 1940:1; *Keng Hwa Poo* No. 15, 12 Oktober 1940: 2). Di luar pekerjaannya di pemerintahan, Muslimun ditunjuk sebagai anggota Volksraad perwakilan Kalimantan dan salah seorang pendiri organisasi pemuda Kalimantan Barat Persatoean Anak Borneo (PAB) (*Kesedaran*,

5 Wawancara Aan Yulistiwa Akbar (31 tahun), *Founder* Pusaka Saprah, di Sambas, September 2021; Wawancara Sunandar (39 tahun), Dekan Fakultas Dakwah dan Humaniora IAIN Sambas, di Sambas, September 2021; Wawancara Urai Riza Fahmi (59 tahun), Sekretaris Majelis Pemangku Adat Istiadat Kesultanan Sambas, di Sambas September 2021.

1940). Kala mendirikan organisasi PAB, ia sedang menjabat sebagai Demang Pontianak (Soedarto *et al.*, 1978/1979: 56; *Het Nieuws van den Dag* No. 296, 24 Desember 1929: 17).



Sumber: Koleksi Keluarga R.M. Nalaprana

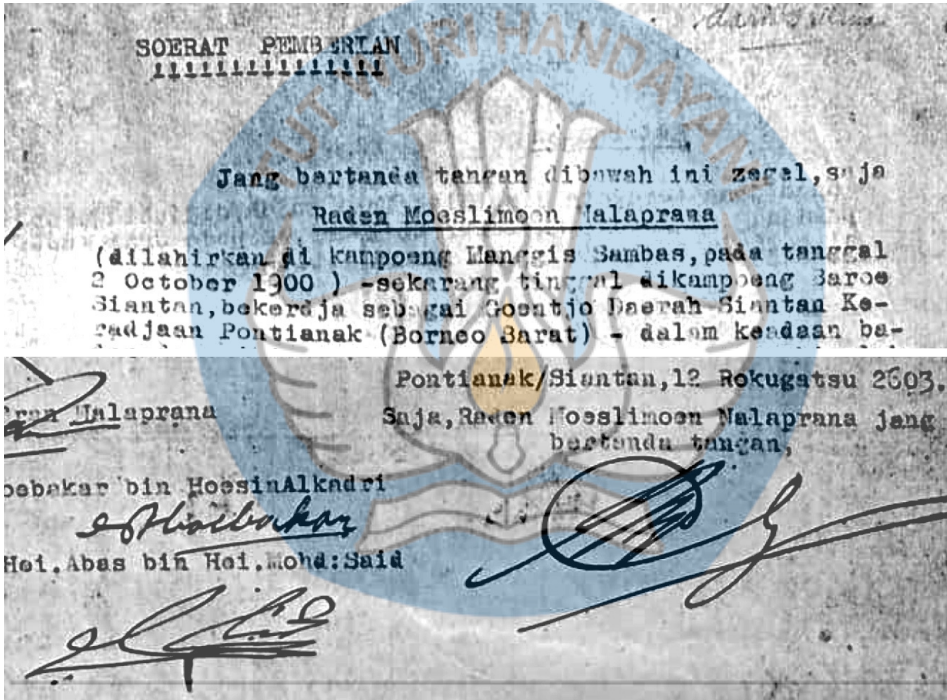
Gambar 1.2 R.M. Nalaprana dan istri, Soetinah Nalaprana

Selama menjadi demang, Muslimun berdiam di Kampung Kuantan Darat, Benua Melayu, Pontianak bersama istrinya, Soetinah binti Abdullah alias Soetinah Nalaprana. Rumah yang berada di dekat rumah besar keluarganya tersebut dibeli Muslimun dari seorang Melayu, Entjik Joek pada 1934 (Arsip Keluarga R.M. Nalaprana, 1943).

Tugasnya sebagai anggota Volksraad membuat Muslimun kerap ke Jakarta. Jika tempo sidang musyawarah tahunan, maka Muslimun dapat menghabiskan waktu di Jakarta hingga dua bulan (*Kesedaran* No. 1, Januari 1940). Setiap kali bertugas, Muslimun akan selalu didampingi oleh istrinya, sebagaimana yang dikisahkan oleh Soetinah kepada menantunya.⁶

⁶ Wawancara Nurhayati A.N. (65 tahun), menantu R.M. Nalaprana, di Pontianak.

Muslimun dikabarkan juga sempat tinggal di Siantan, bagian utara Pontianak, saat bertugas di sana (Wawancara Nurhayati A.N.). Di Siantan, ia menjadi seorang *gunco* pada masa pendudukan militer Jepang (Arsip Keluarga R.M. Nalaprana, 1943). *Gunco* adalah pemimpin daerah distrik setingkat wedana.



Sumber: Arsip Keluarga R.M. Nalaprana

Gambar 1.3 Surat hibah bertanda tangan R.M. Nalaprana yang menerangkan identitasnya

Pada masanya bertugas menjadi *gunco*, Muslimun menjadi korban penculikan militer Jepang. Berdasarkan kesaksian Soetinah, sebagaimana yang disampaikan oleh menantunya, Muslimun disungkup menggunakan karung (Wawancara Nurhayati A.N.; Achmad *et al.*, 1981: 86).

Penyungkupan dilanjutkan dengan penembakan karena Muslimun digolongkan sebagai satu di antara 43 orang yang disebut sebagai “kepala-kepala komplotan” rencana perlawanan terhadap militer Jepang. Eksekusi terhadap Muslimun dan empat puluh dua orang tokoh lainnya diberitakan *Borneo Simboen* (Balikpapan) No. 216, Thn. II, Selasa 4 Sitji-Gatsoe 2604 (4 Juli 1944) dengan judul “Komplotan Kaoem Penghianat Melawan Nippon Soedah Dibongkar sampai ke Akar-Akarnya: Sekalian

Kepala-Kepala Penghianat Soedah Ditembak Mati” (Achmad *et al.*, 1981: 82–98).

Borneo Simboen memberitakan bahwa kelompok yang dieksekusi telah berkonspirasi mengkhianati persetujuan untuk menjaga pemerintahan militer Jepang dan merencanakan pergerakan kemerdekaan Kalimantan Barat. Konspirasi tersebut diberitakan melibatkan tiga belas organisasi kepemudaan, antara lain Parindra, Nisshinkai, dan Pemuda Muhammadiyah, yang bersepakat dengan para pemuka masyarakat, baik para elite kerajaan di Kalimantan Barat dan birokrasi, juga kaum cerdik cendekia dan para pengusaha (Achmad *et al.*, 1981: 82–98).

Eksekusi penembakan Muslimin dan para tokoh lain yang diberitakan dilakukan pada 28 Rokoegatsoe 2604/28 Juni 1944, kini dikenang dengan nama Peristiwa Mandor dan diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah. Dalam daftar eksekusi, Muslimin diberitakan meninggal dalam usia 43 tahun. Kabar tersebut menjadi akhir pemberitaan kiprah Muslimin di media massa (Achmad *et al.*, 1981: 82–98).

C. FRAGMENT GIAT MUSLIMIN: DARI PELAJAR KRITIS HINGGA WAKIL DAERAH

Media massa merupakan sumber yang relatif efektif dalam menelusuri jejak Muslimin, meski pemikirannya tetap sulit digali karena tidak aktif menulis. Beruntung, Muslimin aktif di kegiatan politik dan pemerintahan ketika kapitalisme cetak sedang tumbuh sehingga aktivitasnya terdokumentasi media.

Meskipun tidak utuh, kontribusi Muslimin terhadap masyarakat dalam kurun dua puluh tahun terekam oleh media. Dari jejak media tersebut, kontribusinya dapat dikategorikan setidaknya menjadi tiga status peran, yakni sebagai pelajar, pemimpin organisasi kebangsaan, dan anggota Dewan Rakyat.

1. Protes si Pelajar

Muslimin terdeteksi di media massa sejak terbitnya surat kabar lokal pertama Kalimantan Barat, *Borneo Barat Bergerak* (BBB). Muslimin yang kala itu masih berusia dua puluh tahun dan masih melanjutkan studi di Jawa diketahui menulis surat pembaca pada BBB No. 12, 15 Maret 1920. Ia mengkritik animo bersekolah para pelajar di daerahnya, Sambas. Ia mengemukakan hasil pengamatannya terhadap pendaftar di sekolah-

sekolah lanjutan seperti sekolah guru (*Kweekschool*) dan sekolah pertanian (*Cultuur School*) yang pada masa pengamatannya tidak ada yang berasal dari daerahnya, khususnya dari almamaternya, HIS Sambas. Menurutny, jika siswa HIS dari daerah lain saja mampu bersekolah lanjut, maka lulusan HIS Sambas sepatutnya juga mampu karena mengacu pada kurikulum (*leerplan*) yang sama. Berikut petikan pernyataannya.

❖ Heran saja, apakah sebabnja tiada seorang djoega dari H.I.S. Sambas dapat mengoendjoengi salah satoe dari sekolah-sekolah j.t. diatas, sedangkan anak-anak H.I.S. di lain tempat dapat pergi kesekolah itoe. Leerplan H.I.S. Sambas toch koerang lebih sama dengan leerplan H.I.S. dinegeri jang lain-lain di Hindia ini? Apakah hal ini disebabkan moerid-moerid di Sambas ta' begitoe radjin dan pintar dibandingkan dengan teman-temannja di H.I.S. jang lain-lain? Saja harap goeroe-goeroe di H.I.S. Sambas hendaklah apalah kiranja berdaja oepaja dengan sedapat-dapatnja akan menolong memadjoekan moeridnja. Hai Toean-toean isi negeri Sambas! Djanganlah saja ini disangka hendek menoeroenken dan merendahkan dardjat H.I.S. Sambas, tidak, sekali kali tidak. Jang terseboet diatas ini beralas dengan kebenaran." [sic!]

Sebelum mengungkapkan kritik, Muslimun terlebih dulu menyampaikan tinjauan terhadap almamater yang dinilainya mengalami penurunan capaian. Menurutny, penurunan berlangsung sejak perubahan model sekolah dari *Speciale School* menjadi HIS yang berakibat pada perubahan kurikulum dan struktur pengajar. Hal terakhir tersebutlah yang menurutny menjadi faktor utama kemunduran sekolah, sebagaimana tuturannya berikut.

❖ ... Moela-moela amat soesah oentoek goeroe dan moerid sekolah itoe, sebab goeroenja ta' tahoe bahasa Belanda sepatah kata djoepoen. Tetapi karena pandai dan tjakap goeroe itoe me[nga]djar, dengan moedah moeridnj[a] menerima peladjaran dalam baha[s]ja Belanda... Sementara itoe goeroe-goeroe sekolah itoe, jaitoe 3 orang bangsa Belanda dan seorang-orang Melajoe dipindahkan ketempat lain dan ditoekar dengan goeroe Melajoe keloearan Kweekschool. Semendjak goeroe kepala jang

pertama dari Speciale School pindah ketempat lain, sekolah itoe, sajang, berkoerang koerang dardjatnja dan kekoeatannja. Speciale School tadi ditoekar namanja dan disamakan dengan sekolah H.I.S. Gouvernement, serta leerplannja poen disamakan dengan leerplan H.I.S. jang lain-lain.

Sekarang jang bekerdja di H.I.S. Sambas seorang goeroe Belanda, goeroe kepala dari sekolah itoe dan 3 á 4 orang Inlandsche onderwijzers dari K.S. [Kweekschool].”

Yang menarik dalam surat tersebut, Muslimun menyapa Sultan Sambas dan Pemerintah Kolonial sebanyak dua kali. Sapaan yang memuat pujian tersebut juga memunculkan kesan bahwa ia sebenarnya sedang meminta perhatian kedua pihak berwenang tersebut untuk menangani sekolah. Permintaan yang disampaikan dengan tata bahasa santun dan secara tidak langsung tersebut pada bagian pembuka dan menjelang penutup surat berikut.

“ ... Sebeloemnja berchabar pandjang terlebih dahoeloe isi negeri Sambas mengoetjapkan banjak terima kasih kebawah hadirat Sp. Jmm. Doeli Soeltan Sambas, sebab dengan permintaan Sp. Jmm. Itoe didirikan oléh Gouvernement sekolah j. t. diatas di Sambas...

Dan perhatikanlah pada Sp. Jmm. Soeltan Sambas, jang berdaja oepaja akan memadjoekan negeri dan ra'iatnja, dan pada Gouvernement, bahwa ta' pertjoema dan ta' sia-sia sekolah H.I.S. didirikan di Sambas.” [sic!]

Hal menarik lain dari surat kritik Muslimun adalah penyebutan Jawa dan Sumatra sebagai acuan kemajuan bagi Kalimantan, seperti berikut ini.

“ Girang hati saja melihat bagaimana di Tanah Djawa dan Soematra orang pendoedoek poelau itoe berlomba-lomba mengoendjoengisekolamentjari ilmoe, sedangkan bangsa kita pendoedoek poelau Borneo beloem djoega insaf akan hal itoe, hal mana jang menjedihkan hati saja.”

Pemosisian tersebut selanjutnya juga akan ditemukan dalam usulan-usulan Muslimun dewasa dalam sidang rapat Volksraad.

Suratnya ditutup dengan pepatah yang menunjukkan perhatian Muslimun pada pendidikan, berikut. "Hai, toean-toean ini negeri Sambas. Toentoetlah 'ilmoe, sebab 'ilmoe ta' dapat dinilai orang harganja, serta dapat kita bawa kemana-mana, didoenia dan di achirat."

Selain kritik dalam dunia pendidikan, kritik Muslimun lain ditemukan dalam nomor terbitan yang sama. Kali ini, kritiknya ditujukan kepada redaktur *BBB*. Sebagaimana surat sebelumnya, Muslimun mengawali kritik atau keluhan dengan membahas persoalan terlebih dahulu.

Pembahasan yang mengungkap konsekuensi-konsekuensi atas kelalaian pengelola koran ini menunjukkan daya analisis dan gaya Muslimun dalam menyampaikan pendapatnya.

Toean Redactie jang terhormat.
Sedikit perkataan diharap minta diperhatikan benar.

1. Apabilakah soerat chabar atau tydschrift baroe dapat berdiri lama?

Djawab. Apabila soerat chabar atau tydschrift itoe banjak langganannja (abonne's) atau apabila kasnja koeat.

2. Apabilakah soerat chabar atau tydschrift baharoe banjak mendapat langganan?

Djawab Apabila harga soerat chabar atau tydschrift itoe serta banjak lagi berfaedah (baik-bagoes).

Soerat chabar B.B.B. tentangan harga dan isinja, . . . ja . . . boleh dikatakan sedang, ma'loemlah baharoe pertama kali soeatoe soerat chabar terbit di Borneo Barat.

Tetapi jang sangat mengherankan saja, jaitoe didalam B.B.B. kadang-kadang satoe atau setengah halaman tiada bertjetak, ja'ni blanco sadja (lihatlah B.B.B. No.7 dan 8). ~

Apakah sebabnja???

Apakah goena toean redacteur serta pembantoenja???



16/2-20.

Wassalam,
O. M. N.

Sumber: *BBB* No. 12, 1920: 8

Gambar 1.4 Surat pembaca kiriman R.M. Nalaprana

2. Muslimun dan Persatoean Anak Borneo (PAB)

Jejak Muslimun yang kedua adalah sebagai pemimpin Persatoean Anak Borneo (PAB), sebuah organisasi pergerakan pemuda Kalimantan Barat yang didirikan pada 28 Mei 1939. Muslimun dikabarkan sebagai salah satu pemrakarsa pendirian PAB bersama Goesti Mohammad Poetra dan Ismail Oesman yang kemudian menjadi sekretaris pengurus pusat dan ketua pengurus cabang Pontianak. Kedua rekan yang dalam berita majalah *Tjaja Timoer* tersebut diragukan karena dinilai belum berpengalaman dalam berorganisasi ini menopang tugas Muslimun dalam mengurus PAB (*Kesedaran*, Januari 1940: 5; April-Mei-Juni 1940: 23).



Sumber: Koleksi Keluarga R.M. Nalaprana

Gambar 1.5 R.M. Nalaprana bersama rekan organisasi

Selanjutnya, PAB juga turut melibatkan banyak pihak, baik sebagai pengurus maupun anggotanya. Bagian terbesar organisasi adalah para bangsawan, pejabat pemerintah, dan sebagian kecil usahawan yang tersebar pada kepengurusan cabang Sanggau, Ngabang, Mempawah, Putussibau, Sekadau, dan Sintang. Namun, terdapat dua orang pengurus pusat yang terlihat menonjol membangun ideologi organisasi, yakni Ya' Sabran dan Gusti Sulung Lelanang. Pemikiran mereka kerap dimuat, baik dalam bentuk ringkasan pidato dan laporan rapat di berbagai kunjungan kerja daerah, maupun artikel berseri sarat kandungan ideologi kebangsaan. Keduanya adalah aktivis partai-partai ideologis, Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Indonesia Raya (Parindra).

Berdasarkan riset Listiana (2019), nama "Borneo" pada organisasi PAB tidak mencerminkan ideologi yang disebut van Miert sebagai nasionalisme pulau atau yang disebut Henley sebagai nasionalisme teritori atau regional. Riset yang berfokus pada kedua majalah terbitan PAB tersebut menemukan bahwa ide kebangsaan Indonesia lebih kuat dikemukakan daripada ekspresi primordial. Rasa kebangsaan regional Borneo (sebagaimana penamaannya) tampak jelas tidak pernah hidup. Hal ini dapat dipahami dari diskusi pendefinisian "anak Borneo" yang diterbitkan hampir pada setiap edisi majalah bulannya. Dalam perkembangannya, diskusi organisasi bahkan pernah mencapai kesepakatan bahwa sebutan "anak Borneo" dapat diberikan kepada orang asing. Aturan ini besar kemungkinan (untuk tidak menyatakan pasti karena belum ditemukan pernyataan jelas) untuk mengakomodasi keluarga Kesultanan Pontianak yang merupakan keturunan Arab. Adapun etnik lain yang disebut sebagai "saudara sebangsa dari pulau lain" dapat

“diterima” menjadi anggota biasa setelah “diakui” sebagai “anak Borneo” oleh organisasi.

Uniknya, kedua majalah PAB, yakni *Kesedaran* dan *Doenia Pemoeda* menunjukkan kecenderungan gagasan yang berbeda. *Kesedaran* cenderung mengemukakan *sense of community* Borneo dan *Doenia Pemoeda* memunculkan *sense of community* Indonesia. Secara umum kedua majalah juga memiliki kerangka aliran yang berbeda. *Kesedaran* condong pada aliran asimilasi yang terlihat dalam berbagai anjuran pendidikan dalam cara Barat dan penggunaan bahasa Belanda, walau kerap pula mempromosikan sekolah-sekolah rakyat tak berbayar khas aliran asosiatif. Sementara itu, *Doenia Pemoeda* lebih tegas menonjolkan aliran asosiatif melalui anjuran penggunaan bahasa Indonesia dan penjunjangan kebudayaan setempat. *Doenia Pemoeda* tidak menunjukkan sikap ambigu seperti *Kesedaran*.

Perbedaan tersebut tentunya tidak lepas dari ideologi para redaktur kedua majalah. *Kesedaran* dikelola oleh pengurus pusat yang tim redaksinya dipimpin oleh Ismail Oesman, G.M. Poetra, dan Ya' Sabran, sedangkan *Doenia Pemuda* yang merupakan organ publikasi khusus Badan (Seksi) Kebudayaan PAB dipimpin oleh Gusti Sulung Lelanang.⁷

Adapun Muslimun tidak terdeteksi menulis artikel di dua majalah tersebut. Meskipun demikian, pandangan pribadinya dalam pergerakan kebangsaan dapat ditelisik dari dua catatan pidatonya saat rapat anggota yang dimuat di *Kesedaran* No. 2, Februari 1940. Pidato Muslimun

7 G.M. Poetra adalah Sekretaris Pusat PAB yang menggantikan kedudukan Ismail Oesman ketika cabang Pontianak didirikan pada Desember 1939 (*Kesedaran*, Januari 1940). Ya' Sabran, komisaris pengurus pusat, adalah bangsawan Kerajaan Landak yang lulus dari Sekolah Guru di Meester Cornelis (Jatinegara). Selama di Jakarta, ia aktif dalam organisasi Partai Nasional Indonesia dan Perguruan Rakyat bersama Mr. Mohammad Yamin, Mr. Amir Sjarifuddin, dan Adam Malik. Ia juga mendirikan organisasi Benih Kalimantan sekaligus asrama Benih Kalimantan bagi para pelajar Kalimantan di Jakarta (Suwignjo, 1979: 293; 302; *Kesedaran*, April–Mei–Juni 1940: 27). Ismail Oesman, praktisi pers yang kala itu dikenal sebagai pengusaha percetakan (Listiana *et al.*, 2014; Purba, 1993). Adapun Gusti Sulung Lelanang adalah bangsawan Kerajaan Landak yang lulus dari Normal School di Meester Cornelis (Jatinegara). Pada tahun 1920 ia diangkat sebagai guru sekolah dasar di Jakarta (Suwignjo, 1979: 197). Selama menjadi guru, Lelanang juga aktif dalam organisasi Sarekat Islam. Aktivitas politiknya di Jakarta membuat ia dipulangkan ke Kalimantan Barat pada 1922 oleh pemerintah Hindia Belanda. Selama di Kalimantan Barat, ia banyak merekrut kelompok muda termasuk guru sekolah untuk mendirikan Sarekat Rakyat (SR) yang berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia. Keterlibatannya di SR dimulai pada awal 1925 ketika ia bersama Gusti Situt Mahmud dan Muhammad Hambal bergabung dengan Djeranding dkk. dan membentuk SR. Aktivasnya di SR inilah yang kemudian membawa ia dan kawan-kawan pergerakannya menjalani masa pengasingan ke Digul pada 1926. Sepulang dari Digul pada tahun 1938, Gusti Sulung Lelanang dkk. ikut aktif dalam Parindra dan kemudian PAB (Davidson, 2002; Balunus, 1990: 3; ANRI, 1926).

berjudul "Pemoeda Borneo dan Perhimpoean P.A.B." ini menyampaikan tiga konten, yaitu sejarah pendirian, kesadaran untuk bersatu, dan ide kemajuan.



Sumber: Kesedaran, Januari 1940: 5

Gambar 1.6 Catatan pidato R.M. Nalaprana dalam rapat PAB

Pendirian PAB dinyatakan Muslimun merupakan kelanjutan dari perkumpulan Borneo Studiefonds, suatu gerakan yang lazim dilakukan oleh organisasi pemuda di Jawa. Persoalan studi kemudian juga menjadi salah satu perhatian utama PAB dengan dibentuknya seksi bidang pendidikan. Melalui bidang ini, PAB menyerukan kesadaran pendidikan dan turut mendukung, bahkan mendirikan sekolah-sekolah partikelir di Kalimantan Barat.

Selain itu, Muslimun juga menyoal kesadaran persatuan penduduk sebagai jalan untuk mencapai kemajuan bersama. Persatuan yang juga dimaknainya sebagai kerja bersama disampaikan dalam konsep usaha bersama-sama di bidang pendidikan, perdagangan, pertanian, pertukangan, pemerintahan, dan perburuhan. Konsep tersebut dieksplisitkan dalam tujuan PAB, yakni:

- ❧ a) Bermaksoed akan memadjoekan dan menggembirakan poetra-poetri Borneo dalam Onderwijs, pertanian, perniagaan dan pertoeakangan.
- b) Beroesaha dalam segala keperloean oentoeck poetra-poetri Borneo, dengan djalan jang tiada melanggar oendang-oendang negeri."

Keinginan tersebut ditunjukkan oleh berita dan artikel yang dimuat di *Kesedaran*. Selain tulisan berupa informasi kepartaian yang menghabiskan porsi terbesar setiap terbitan, *Kesedaran* memberi ruang besar bagi artikel bertema ekonomi dan pertanian dalam setiap edisi. Kedua tema kerap diisi dengan ulasan teknis, seperti pengembangan lahan usaha untuk perkebunan kelapa atau pemasaran kopra. Selanjutnya, ruang kebudayaan juga diberi porsi besar yang diisi dengan berbagai jenis tulisan, baik opini, sejarah dan kebudayaan setempat, hingga cerita pendek (Listiana, 2019: 103).

Usaha untuk memajukan ekonomi atau pendidikan tersebut juga diberitakan dalam laporan singkat usulan-usulan Muslimun di sidang Volksraad. Hasil usulan-usulan Muslimun tersebut sesekali dilaporkan pula oleh redaksi, sebagaimana masa keberangkatannya pada sidang-sidang Volksraad ke Jakarta (*Kesedaran*, 1940: 20).

Cita-cita akan kemajuan tersebutlah yang berkali-kali disampaikan Muslimun dalam pidato rapat pertama PAB. Cita-cita disampaikan seraya menyatakan penilaian negatif tentang kondisi daerah Kalimantan yang seolah-olah sedang diperbandingkan dengan kondisi di daerah lain, seperti berikut.

- ❧ ... Borneo terlebih Borneo Barat masih gelap masih terbelakang dalam segala-galanja. Ini kami akoei!... Pemoeda-pemoeda Borneo Barat aseli hendak mengadakan Persatoean, soepaja Borneo Barat dengan pendoedoek aselinja djanganlah djaoeh sangat terbelakang... Roepanja perasaan oentoeck bekerdja bersama-sama boeat memadjoekan Borneo Barat dan pendoedoeknja masih sangat tipis... Ta' dapat dibiarkan keadaan Borneo Barat dengan pendoedoeknja tinggal ketjetjeran sadja... P.A.B jang mempoenjai anggota hanja poetra dan poetri

Borneo beladjar bekerdja dan beladjar memimpin hendak membawa Borneo Barat dengan pendoedoek aselinja dari tingkat jang dibawah ketinggian jang diatas, berangsoer-angsoer dari setapak ke setapak madjoe kemoeka bekerdja dan beroesaha sedapat moengkin menoeroet aliran zaman dan dengan tenaga kekoeatan jang ada padanja dan sekelilingnja boeat mentjapai tjita-tjita P.A.B. jang soetji....”

Harapan akan kemajuan Kalimantan Barat ini jelas tampak dalam usulan-usulan-usulannya di sidang Volksraad.

3. Suara Kalimantan Barat di Dewan Rakyat

Jejak ketiga Muslimin di media, khususnya koran skop Hindia Belanda, adalah aktivitasnya di Volksraad (Dewan Rakyat). Volksraad adalah produk hukum proses desentralisasi Hindia Belanda. Sebagai lembaga legislatif, Volksraad diberi wewenang untuk membuat undang-undang bersama gubernur jenderal. Meskipun demikian, adanya hak veto bagi yang terakhir disebut itu membuat keberadaan Volksraad hanya difungsikan sebagai penasihat gubernur jenderal (Kahin, 2013: 54; Rohmadi dan Wardo, 2019).

Volksraad dirancang berdasarkan Undang-Undang 16 Desember 1916 (*Ind. Staatsblad* No. 114), tetapi aturan kelembagaannya baru ditetapkan pada Agustus 1917. Volksraad pertama dilantik pada 18 Mei 1918 dan tiga hari kemudian baru melaksanakan sidang pertama (Helsdingen, 1928: 21).

Sejak saat itu, Hindia Belanda telah memiliki badan perwakilan, meskipun bukan dalam pengertian Barat karena pemilihan anggotanya bersifat tidak langsung (Kahin, 2003: 84). Dari tiga puluh sembilan anggota Volksraad pertama, Menteri Urusan Jajahan, Pleyte, mendistribusikan suara kepada tiga puluh delapan daerah Hindia Belanda ditambah satu orang ketua (sekaligus anggota) yang akan diangkat oleh raja. Komposisi tiga puluh sembilan anggota tersebut terdiri atas sembilan belas orang harus dipilih dari sepuluh orang Bumiputra dan sembilan orang Eropa serta Timur Asing oleh dewan-dewan lokal (*de locale raden, regentschapsraden*, atau *stadsgemeenteraden*) yang masing-masing membentuk sebuah kelompok pemilihan. Selanjutnya, sembilan belas anggota diangkat oleh gubernur jenderal dengan komposisi lima orang Bumiputra serta

empat belas orang Eropa dan Timur Asing. Dengan demikian, komposisi Volksraad pertama terdiri atas seorang anggota sekaligus ketua yang diangkat oleh raja; lima belas Bumiputra (sepuluh dipilih dan lima diangkat); duapuluh tiga orang Eropa dan Timur Asing (sembilan dipilih dan empat belas ditunjuk) (Helsdingen, 1928: 21–24).

Susunan keanggotaan Volksraad kemudian mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir diberlakukan setelah 1925, yakni setelah perubahan Undang-Undang Desentralisasi (*bestuurhervormingwet*) (Pluvier, 1953: 36, 47–48). Penataan susunan keanggotaan Volksraad baru mengalokasi jumlah keanggotaan menjadi seorang anggota sekaligus ketua dan enam puluh anggota berdasarkan Keputusan Kerajaan 31 Juli 1926 (*Ind. Stbl. No. 455*).

Realisasi keputusan berlaku pada 16 Mei 1927 hingga 1942 dengan susunan terdiri atas seorang ketua yang diangkat oleh raja; dua puluh lima Bumiputra non-Belanda; setidaknya tiga puluh orang Belanda; dan Timur Asing antara tiga hingga lima orang. Anggota terpilih meliputi dua puluh orang untuk kelompok pertama, lima belas orang untuk kelompok kedua, dan tiga orang untuk kelompok ketiga. Selebihnya, para anggota lainnya diangkat oleh gubernur jenderal, berikut rekomendasi untuk setiap posisi dalam struktur dewan. Adapun kedua puluh anggota Bumiputra non-Belanda tersebut merupakan delegasi dari dua belas daerah pemilihan. Tiga orang dari daerah pemilihan Jawa Barat; tiga orang dari Jawa Tengah, termasuk Pekalongan, Semarang, Banyumas, Kedu, eks-Rembang; empat orang dari Jawa Timur, meliputi Surabaya, Madura, Madiun, Kediri, Pasuruan, dan Besuki; seorang dari distrik pemilihan Vorstenlanden, meliputi Surakarta dan Yogyakarta; seorang dari Sumatra Selatan, meliputi Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi, Bangka dan daerah-daerah bawahannya (*onderhoorigheden*), serta Belitung; seorang dari Minangkabau, meliputi wilayah Pantai Barat Sumatra; seorang dari Sumatra Utara, meliputi Aceh dan daerah-daerah bawahannya, dan Tapanuli; seorang dari Sumatra Timur, meliputi wilayah Pantai Timur Sumatra serta Riau dan daerah-daerah bawahannya; seorang dari Kalimantan, meliputi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tenggara; dua orang dari Sulawesi, meliputi Manado serta Sulawesi dan daerah-daerah bawahannya; seorang dari Maluku; seorang dari Kepulauan Sunda Kecil, meliputi Bali dan Lombok, serta Timor dan daerah-daerah bawahannya (Helsdingen, 1928: 21–23).

Meski disusun berdasarkan keterwakilan daerah, anggota Volksraad sebagian besar merupakan pejabat pemerintahan yang masih aktif atau telah mengundurkan diri, dan pensiunan pegawai negeri. *Indisch Verslag* 1941 menyebut bahwa sembilan dari sebelas anggota Bumiputra yang ditunjuk adalah pejabat pemerintahan. Hal tersebut membentuk penilaian bahwa pemilihan tidak langsung dirancang untuk meminimalisasi pertumbuhan jejaring organisasi nasionalis. Oleh karena itu, Volksraad dinilai oleh para aktivis pergerakan sebagai media omong kosong karena tidak benar-benar berfungsi sebagai lembaga legislatif dan keanggotaannya sekadar bermanfaat untuk meningkatkan gengsi dan harga diri anggotanya (Kahin, 2003: 84–85; Rohmadi dan Wardo, 2019).

Selain berbagai tanggapan negatif dan pesimistis terhadap kelembagaan dan kinerjanya, para sejarawan menunjukkan kontribusi Volksraad bagi pergerakan nasional, yakni sebagai juru bicara rakyat Indonesia. Anggota Volksraad dipandang sebagai pejuang aspirasi rakyat dan menimbulkan harapan di kalangan aktivis pergerakan sebagaimana yang disampaikan oleh kelompok Konsentrasi Radikal (*Radicale Concentratie*) pimpinan Tjokroaminoto ataupun Fraksi Nasional Thamrin dkk. (Rohmadi dan Wardo, 2019: 166; Pluvier, 1953: 34).

Volksraad juga berkontribusi bagi kehidupan politik dengan mewadahi kelompok pergerakan untuk menyatakan pendapat dan melontarkan kritik. Sebagaimanapun tidak efektifnya dalam mewujudkan tujuan utama pembentukannya, Volksraad telah memfasilitasi para anggotanya untuk menyampaikan berbagai keluhan. Akan tetapi, karena aktivis partai pergerakan nasional tidak banyak yang berminat bekerja di Volksraad, maka aspirasi terkritis dalam menanggapi situasi kolonial berupa tidak lebih dari pengajuan pemerintahan mandiri yang terbatas dan dapat dicapai melalui kerja sama dengan pemerintah kolonial (Pluvier, 1953: 37; Kahin, 2013: 54).

Sebagai lembaga perwakilan bagi orang Indonesia, Volksraad juga dapat memberi gambaran tentang masyarakat dari berbagai daerah (Kahin, 2013: 54). Komposisi anggota Volksraad tidak hanya menunjukkan keragaman etnik dan ras, tetapi juga partai dan ideologi yang berkembang di tengah masyarakat.

Pada kondisi susunan anggota Volksraad tersebutlah Raden Muslimun Nalaprana menjadi satu-satunya wakil dari daerah pemilihan

Kalimantan yang mencakup wilayah Keresidenan Westerafdeeling van Borneo (Kalimantan Barat) dan Zuider en Oosterafdeeling van Borneo (Kalimantan Tenggara) yang ditunjuk pada 15 Juni 1939. Selain itu, sebagaimana uraian sebelumnya, Nalaprana kala itu adalah pejabat pemerintahan yakni seorang demang kelas 1 di Pontianak. Nalaprana juga merupakan pegawai Departemen Urusan Ekonomi (*Regerings-Almanak II*, 1939–1942; *De Indische Courant* No. 18, 1940: 1).



Sumber: *Kesedaran*, 1940: 13

Gambar 1.7 Nalaprana (panah) bersama anggota Volksraad di Gedung Volksraad, Pejambon

Pada masa keanggotaan Nalaprana di periode 1939–1942, anggota Volksraad berjumlah enam puluh satu orang. Bumiputra terdiri atas tiga puluh hingga tiga puluh dua orang, sedangkan orang Belanda antara dua puluh dua hingga dua puluh enam orang, Tionghoa antara empat hingga lima orang, dan orang Arab tetap seorang (*Regerings-Almanak II*, 1939–1942).

Para anggota tersebut bukan hanya mewakili daerah, melainkan ada pula yang mewakili partai politik dan organisasi. Pada rentang 1939 hingga 1942 tercatat delapan belas partai dan organisasi yang terwakili di Volksraad, yaitu Christelijke Staatkundige Partij (CSP); Chung Hwa Hui (CHH); Indische Katholieke Partij (IKP); Indo-Europeesch Verbond (IEV); Politiek Economische Bond (PEB); Pagoejoeban Pasoendan; Partij Indonesia Raja (Parindra); Perhimpoean Pegawai Bestuur Boemipoetra (PPBB); Partai Tionghoa Indonesia; Perkoempoelan Politiek Katholiek di Indonesia; Perserikatan Kaoem Christen; Vaderlandsche Club (VC); Vereeniging van Ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur (VABB); Partai

Persatoean Indonesia (PPI); Partai Islam Indonesia (PII); Perhimpoean Politiek Katholiek di Indonesia (PPKI); Vereeniging van Ambtenaren bij den Inlandschen Bestuursdienst (VAIB); Vereeniging van Regenten op Java en Madoera (Sedio Moelio) (*Regerings-Almanak II*, 1939–1942).

Kelompok-kelompok tersebut meliputi kelompok konservatif hingga progresif, bahkan dari kelompok yang berplatform etnik atau ras ataupun pekerjaan yang sama. Ada kelompok yang sama-sama memiliki anggota orang-orang Eropa tetapi yang satu sesekali menunjukkan tentangnya terhadap sistem kolonial, seperti IEV⁸ dan PEB⁹, sementara VC ingin mempertahankan kekuasaan Belanda di semua bidang (Pluvier, 1953: 35, 47–48). Begitu pula kelompok Timur Asing dari kelompok Tionghoa. CHH berorientasi ke “Tanah Leluhur” Tiongkok, sedangkan Partai Tionghoa Indonesia berorientasi tanah air “Indonesia”. Ada pula kelompok Indo-Arab yang bersaing menjadi perwakilan di periode Volksraad sebelumnya, Persatoean Arab Indonesia yang mengusahakan kesadaran tanah air Indonesia dan pembauran sosial dengan meninggalkan kehidupan menyendiri (eksklusif) pada komunitas keturunan Arab. Sebaliknya, Indo-Arabische Verbond (kemudian, Indo-Arabische Beweging) bertujuan memperkuat perasaan ras dan menjunjung tanah airnya Hadramaut (Pluvier, 1953; Amaruli dkk., 2018).



Sumber: *Kesedaran*, 1940

Gambar 1.8 R.M. Nalaprana dalam sidang Volksraad

8 IEV adalah grup Eropa terbesar di Volksraad (*De Sumatra Post* No. 107, 12 Mei 1939: 3).

9 Unsur utama PEB merupakan orang-orang Eropa di perkebunan.

Wakil-wakil Bumiputra pada masa R.M. Nalaprana menjadi anggota Volksraad pun memiliki perbedaan pandangan mengenai fokus perhatian perjuangan. Perbedaan membentuk dua faksi kelompok Bumiputra, Fraksi Nasional (FN)¹⁰ pimpinan M. Husni Thamrin dan Golongan Nasional Indonesia (GNI)¹¹ pimpinan M. Yamin. FN yang telah lebih dulu terbentuk pada 1930 memiliki fokus lebih umum pada tuntutan perubahan di bidang pemerintahan dengan menghapus seluruh perbedaan/diskriminasi secara politik, juga perubahan ekonomi dan intelektual. FN teretus sebagai respons sikap rasial kelompok VC. Adapun GNI memiliki fokus khusus pada kepentingan penduduk daerah luar Jawa (*Buitengewesten*). Kelompok GNI yang terbentuk pada 1939 ini semula tergabung dalam FN setelah usulan program pengembangan untuk luar Jawa ditolak oleh faksinya (*De Indische Courant* No. 63, 1940: 6; Pluvier, 1953: 49–50, 156).

Fraksi Nasional dan Golongan Nasional Indonesia adalah susunan kelompok yang heterogen, mewakili Jawa dan Tanah Seberang. Mereka menjadi anggota Dewan karena dipilih atau diangkat dan bukan berasal dari partai politik yang sama, bahkan beberapa di antaranya tidak berpartai. Dari segala perbedaan, kedua kelompok ini memiliki keyakinan dan kesadaran yang sama dalam ide persatuan Indonesia (Pluvier, 1953: 50). Karenanya, kadang kala mereka akan membuat aksi bersama dalam sidang Volksraad. Dalam gerakan bersama tersebut, kerap pula muncul nama wakil Kalimantan, R.M. Nalaprana.

Meskipun selama masa keanggotaan Nalaprana di Volksraad disebut tidak berpartai (*partijloos*), namun berita-berita di koran menunjukkan kecenderungannya pada sayap pergerakan Golongan Nasional Indonesia bersama anggota lain Volksraad dari luar Jawa. Sesekali Nalaprana diberitakan melakukan aksi bersama kelompok Fraksi Nasional dan pernah pula dikabarkan menyatakan pendapat bersama anggota Volksraad dari Regentenbond (Ikatan Para Bupati) dan *Vaderlandsche Club*.

Sejumlah berita berikut menunjukkan “suara” Nalaprana menyoal berbagai urusan “Luar Jawa”. Pendapat disampaikan bersama berbagai kalangan, terutama GNI.

10 Fraksi Nasional diberitakan berjumlah sepuluh orang yang terdiri atas berbagai perkumpulan dan suku. Kepengurusan Fraksi Nasional di Volksraad dimotori oleh Muhammad Husni Thamrin sebagai ketua dan Kusumo Utoyo sebagai wakil ketua, Dwidjosewojo sebagai sekretaris, dan Datuk Kajo.

11 GNI yang dimotori Yamin didukung oleh beberapa anggota Volksraad dari luar Jawa, seperti Soeangkoepon dari Sumatra Utara, Abdul Rasyid dan Tajuddin Noor dari Banjarmasin. Karena fokus gerakan mereka menyoal permasalahan daerah-daerah tertentu, GNI kerap disebut provinsialistis.

Nalaprana turut mempertanyakan aturan pembatasan penjualan karet di Tapanuli. Pertanyaan tersebut diajukan secara tertulis bersama Thamrin, Abdul Rasyid, Soeangkoepon, Tajuddin Noor, dan M. Yamin (*De Sumatra Post* No. 213, 22 September 1941: 2).

Nalaprana juga turut berbicara sebagai bagian dari wakil dari luar Jawa dan menyampaikan pendapat serta usulan dalam konteks daerah luar Jawa saat agenda sidang "Desentralisasi Departemen Dalam Negeri." Ia menyatakan pembelaan akan ketidakcakapan kemampuan para pegawai pemerintahan di luar daerah (*De Indische Courant* No. 63, 28 November 1940: 6).

Begitu pula saat sidang membicarakan urusan perekonomian, Nalaprana bersama Moechtar, Mogot, Mapoedji, Salamun, dan Kasimo mengajukan (dan kemudian disetujui oleh sidang) amendemen rancangan anggaran Hindia Belanda tahun 1942, Butir 6.4, Bagian Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan kebutuhan Sumatera dan Kalimantan, serta Timur Besar perlu diangkat lebih banyak pejabat untuk pelayanan koperasi di daerah-daerah tersebut (*Soerabaiasch-Handelsblad* No. 197, 23 Agustus 1941: 14).

Nalaprana juga mengajukan persoalan yang sama bersama anggota lain, seperti saat mengeluhkan keadaan sekolah. Bersama Mapudji, Nalaprana meminta penyelidikan terhadap kondisi sekolah di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat (*Het Nieuws van den Dag* No. 185, 11 Agustus 1939: 6).

Pun, saat wilayah Hindia Belanda terancam serangan dalam Perang Dunia II. Nalaprana bersama Soeangkoepon mempertanyakan mengapa penjagaan wilayah laut di luar Jawa tidak seperti di Jawa. Mereka meminta alasan atas begitu besarnya perhatian yang diberikan pemerintah kepada Jawa tidak berlaku serupa terhadap wilayah lain. Nalaprana menyetujui pendapat Soeangkoepon mengenai penerapan standar ganda dari pemerintah kolonial antara Jawa dan daerah-daerah terluar (*Soerabaiasch-Handelsblad* No. 158, 9 Juli 1941: 9). Mereka menambahkan sindiran atas perbedaan perlakuan tersebut dengan istilah "mengukur dengan dua ukuran mata uang" (*meten met twee maten*) (*Sipatahoenan* No. 153, 10 Juli 1941: 2)

Nalaprana juga menyindir Ratu dan Dewan Tinggi terkait pemanfaatan pajak untuk masyarakat luar Jawa. Sindiran dinyatakan dengan menyebut pemerintah sebagai "ibu tiri" bagi daerah luar yang meskipun demikian

tetap dinyatakannya tetap menampakkan iktikad baik, terutama untuk program institusi pendidikan yang terlalu terkonsentrasi di Jawa. Menurutnya, ketimpangan yang terlalu besar dalam perkembangan kelompok penduduk harus sedapat mungkin dihindari, untuk memastikan akibat yang tepat dari berbagai tindakan pemerintah (*Soerabaiasch-Handelsblad* No. 167, 19 Juli 1941: 4).

Selain menyuarakan upaya kemajuan untuk daerah luar Jawa, Nalaprana juga turut menyampaikan pendapat terkait bangsa yang lebih luas bersama anggota *Volksraad* yang lebih besar. Hal ini ditunjukkan saat Nalaprana turut dalam mempertanyakan Deklarasi Bersama Anglo-Amerika bersama Soetardjo, Soeroso, Tjakraningrat, Tirtokoesoemo, Rehatta, Kasimo, Soeangkoepon, Mogot, Abdul Rasyid, Prawoto, Soeria Nata Atmodjo, Mahmoed, Yamin, Samsuedin, Mochtar, Lapian, Wirjopranoto, Salamun, Mapuji, Soekawati, Tajuddin Noor, Hudojo, dan Hamonsapoetro. Pertanyaan terkait delapan poin tujuan yang diperjuangkan oleh Sekutu, khususnya pernyataan prinsip tentang kesetaraan semua ras di dunia, baik kulit berwarna maupun kulit putih. Lebih jauh lagi, deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa melawan kekuatan Poros dalam Perang Dunia II berarti tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk semua orang bebas. Atas pernyataan-pernyataan tersebut, mereka mempertanyakan apa akibatnya bagi masyarakat Indonesia di Hindia Belanda (*Soerabaiasch-Handelsblad* No. 199, 26 Agustus 1941: 2).

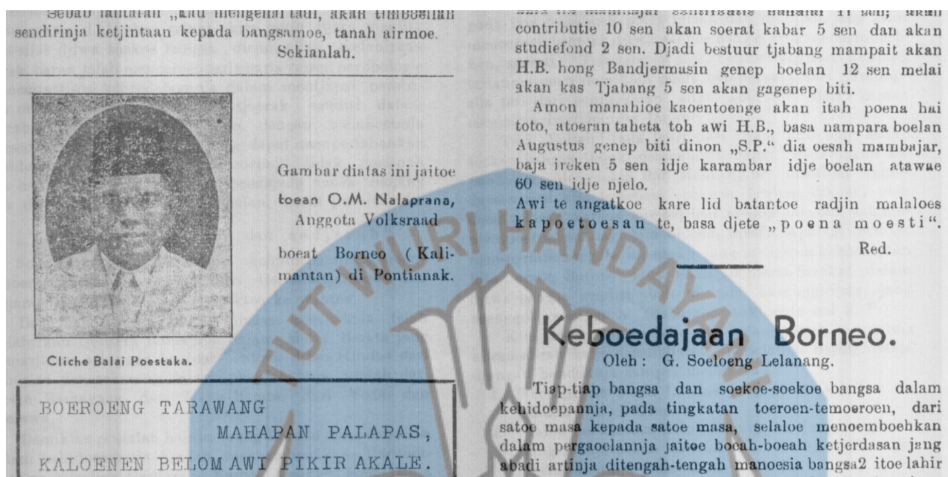
— Masih terkait dengan Perang Dunia II, Nalaprana dan anggota *Volksraad* lain menyoal rencana pembentukan milisi Bumiputra. Berita sebuah koran bahkan membuat subjudul khusus untuk pendapat Nalaprana, yakni “Te Laat Ingediend”. Nalaprana berpendapat bahwa milisi lebih baik dibawa ke hadapan Belanda beberapa tahun yang lalu—sebelum perang mengemuka. Ia melanjutkan beberapa keberatan terhadap sistem penunjukan milisi tersebut (*Batavia Nieuwsblad* No. 185, 5 Juli 1941). Pendapat Nalaprana ini sejalan dengan tanggapan umum kelompok nasionalis Indonesia yang menolak milisi Bumiputra sebagaimana alasan Nalaprana dan karena tuntutan Indonesia berparlemen ditolak pemerintah kolonial. Untuk alasan terakhir ini, disampaikan oleh Soekardjo Wirjopranoto dalam sidang bahwa ketetapan pembentukan milisi adalah wewenang parlemen dan karenanya jika parlemen tidak dibentuk maka pembentukan milisi tidak dapat ditetapkan (Rudiyanto, 2013).

Nalaprana juga kerap didukung oleh anggota Volksraad lain saat mengajukan usulan-usulannya untuk kemajuan Kalimantan Barat. Misalnya, dalam pembahasan “Kebutuhan Lokal” di bidang pendidikan. Soeangkoepon menyampaikan permintaan subsidi untuk Sekolah MULO Katolik Roma St. Lucia di Pontianak. Sementara itu, rekan-rekan lainnya, yakni Wiwoho, Verboom, dan Thamrin, bersama Nalaprana menyampaikan usulan pendirian sekolah MULO pemerintah di Pontianak. Atas usulan tersebut, pemerintah merespons bahwa Inspektur Jenderal Pendidikan Dasar akan segera melakukan penyelidikan di tempat (*Soerabaiasch-Handelsblad* No. 301, 23 Desember 1940: 15).

Nalaprana juga diketahui pernah menyampaikan pendapat bersama wakil Regentenbond seperti Soeria Karta Atmadja dan Soedibiokoesoemo, juga Verboom dari VC tentang pendapat mereka untuk tidak mengurangi gaji pegawai untuk mendukung dana Perang Dunia II (*Soerabaiasch-Handelsblad* No. 182, 6 Agustus 1941). Kebersamaan lain Nalaprana dengan kelompok ini memang belum ditemukan, tetapi aksi tersebut menunjukkan keluwesan pergaulannya.

Kahin (2013: 53–54, 84) menilai bahwa Dewan Rakyat merupakan salah satu penyebab integrasi nasional. Tanpa disengaja, pemerintah kolonial telah mempertemukan dan menyatukan orang Indonesia dari berbagai daerah. Pertemuan tersebut menyadarkan mereka atas persoalan yang dihadapi bersama, yakni kolonialisasi. Meskipun demikian, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa keberadaan Dewan Rakyat justru memperlemah pergerakan nasionalis karena para aktivis pergerakan cenderung menjadi kooperatif.

Sampai penelitian ini dilakukan, belum ditemukan kritik terhadap Nalaprana, terutama terkait tugasnya sebagai wakil Kalimantan di Volksraad. Bahkan, tidak juga dari koran-koran yang diusahakan oleh para redaktur yang berasal dari Kalimantan Tenggara, seperti *Bintang Borneo*, *Soera Borneo*, dan *Penoentoen Pikiran* kala mereka mengkritik anggota Volksraad dari Banjar dan kelompok Nationaal Borneo Conferentie (Rahzen (ed.), 2007: 232, 311). Meskipun tidak ada kritik langsung terhadap Nalaprana, harapan untuk memiliki perwakilan dari kelompok masyarakat Dayak di Volksraad diungkapkan oleh redaktur *Soera Pakat*, koran publikasi organisasi Pakat Dajak.



Sumber: *Soeara Pakat*, 1940

Gambar 1.9 R.M. Nalaprana dijelaskan sebagai wakil dari Kalimantan dalam *Soeara Pakat*, publikasi organisasi Pakat Dayak. Foto profil dimuat bersama di halaman yang memuat artikel “Kebudajaan Borneo” karya Gusti Sulung Lelanang, tokoh nasionalis Kalimantan Barat dan artikel lain bertema kebangsaan.

Harapan-harapan tersebut wajar kiranya jika menyisir usulan-usulan Nalaprana di sidang Volksraad. Usulan Nalaprana yang diberitakan dalam koran-koran terbatas pada program untuk daerah-daerah di Kalimantan Barat, seperti berikut.

Pada permulaan bekerja di sidang Volksraad, Nalaprana menyampaikan usulan umumnya mengenai signifikansi ekonomi dari daerah yang diwakilinya. Ia memberikan garis besar yang terperinci dan memberikan beberapa cara untuk pengembangan wilayah lebih lanjut. Untuk itu, ia mengusulkan penyelidikan lebih lanjut terhadap Kalimantan Barat dan kesejahteraan masyarakatnya (*Het Nieuws van den Dag* No. 162, 14 Juli 1939: 5; *Algemeen Handelsblad* No. 36805, 13 Juli 1939: 14).

Artikel berjudul “Uit den Volksraad: Slot 1ste Acte Economische Reveu” memberitakan usulan Nalaprana mengenai keterhubungan daerah asalnya, Sambas. Ia menyampaikan apresiasi positif atas beberapa rencana yang diusulkan Pemerintah untuk Pantai Barat Kalimantan sambil menekankan urgensi yang lebih besar untuk meningkatkan keterhubungan Pontianak-Sambas (*Het Nieuws van den Dag* No. 183, 9 Agustus 1939: 4).

Kemudian, Nalaprana juga sangat mendorong penyediaan air minum yang lebih baik untuk Pontianak (*Het Nieuws van den Dag* No. 183, 9 Agustus 1939: 4). Menindaklanjuti pertanyaan tersebut, Pemerintah merespons dengan merencanakan pembangunan saluran air yang secara garis besar sudah siap. Dalam jangka waktu setahun, persiapan menyisakan beberapa detail yang masih harus dikerjakan dan pelaksanaan akan dieksekusi pada awal 1941 (*De Indische Courant* No. 32, 22 Oktober 1940: 5).

Nalaprana juga mengajukan pengembangan perikanan darat untuk danau dan sungai Kalimantan Barat dalam program kerja "Daerah Luar" (*Buitengewesten*). Ia juga menyampaikan kendala yang dihadapi dalam program tersebut, yakni sumber daya terdidik dengan pendidikan akademis yang sesuai untuk dijadikan konsultan perikanan. Oleh karena itu, ia mengusulkan untuk melatih lulusan sekolah pertanian menengah dan diorganisasi menjadi tenaga penyuluh pertanian di Kalimantan Barat (*Het Nieuws van den Dag* No. 183, 1939: 5).

Nalaprana juga menunjukkan perhatian pada kepentingan pertanian dan penyuluhan pertanian di Kalimantan Barat. Dia meminta penyelidikan lebih lanjut untuk mengatur perikanan darat dan usaha terkait termasuk layanan informasi perdagangan di Kalimantan Barat (*Bataviaasch Nieuwsblad* No. 198, 25 Juli 1939: 4).

Begitu pula saat rapat-rapat yang terutama membicarakan persoalan pendidikan. Usulan-usulan Nalaprana terbatas pada daerah-daerah di Kalimantan Barat. Nalaprana meminta perluasan pendidikan rakyat di Kalimantan Barat, terutama pembukaan kembali untuk HIS di Sambas dan Sintang (*Het Nieuws van den Dag* No. 168, 21 Juli 1939: 5). Nalaprana diberitakan kembali menuntut perluasan kesempatan pendidikan di Kalimantan Barat (*Soerabaiasch-Handelsblad* No. 189, 14 Agustus 1941: 4). Begitu pula dalam sidang yang membicarakan anggaran pendidikan bagi masyarakat desa. Dalam sidang yang diberitakan menimbulkan debat tersebut, Nalaprana bergabung dengan para anggota Volksraad yang menyatakan kepuasan atas penunjukan Direktur Pendidikan, tetapi menyatakan pula ketidakpuasan akan penyediaan pendidikan di Kalimantan karena masih menyisakan banyak hal yang diinginkan, seperti betapa keberadaan sebuah sekolah MULO di Pontianak tidak memenuhi kebutuhan pendidikan di daerah. Untuk itu, ia pun menyatakan bahwa dana pemerintah daerah juga dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan biaya pembangunan sekolah baru (*Soerabaiasch-*

Handelsblad No. 172, 25 Juli 1941: 13). Nalaprana juga telah mencatat persetujuan anggaran perluasan pendidikan dasar Bumiputra (*Inlandsen Lagere Onderwijs*), terutama sekolah rakyat (*volksscholen*) dan sekolah menengah (*vervolgsscholen*) yang harus lebih banyak diarahkan kepada daerah-daerah terpencil dan terbelakang, antara lain di Kalimantan Barat (*Batavia Nieuwsblad* No. 303, 16 November 1940: 6).

Aktivitas rapat dan diskusi yang dikerjakan Nalaprana pun terbatas bersama para pemuka masyarakat dan pemerintahan di Kalimantan Barat. Sebagaimana berita berikut, Nalaprana dilaporkan mengikuti Kongres "Pelayanan Daerah" bersama F.J. Paath, Asisten Residen Pontianak; Rubini, seorang dokter pemerintah; pemimpin redaksi koran *Borneo Barat*; dan Panangian Harahap, seorang pengawas sekolah di Pontianak. Dalam pertemuan ini, Nalaprana mengajukan penyebarluasan informasi dalam sistem peradilan Bumiputra (*De Telegraaf* No. 17. 824, 26 Maret 1940: 4). Begitu pula saat membicarakan dana sekolah (*schoolfonds*) untuk Pontianak. Nalaprana berdiskusi dengan Demang Siantan, Kapten Cina dan Arab, Komisaris Parindra Kalimantan Barat, Ketua Seksi Parindra, R. Panji Notoesoedjono, Harahap, dan Ketua Parindra Pontianak (*Overzicht van de Inlandsche en Maleisch-Chineesche Pers* No. 52, 30 Desember 1939).

D. SIMPULAN

Raden Muslimun Nalaprana adalah kerabat Kesultanan Sambas yang mengenyam pendidikan Barat. Ia besar di keluarga aristokrat yang menjadi birokrat dalam pemerintahan kolonial. Sejak usia sekolah, ia telah meninggalkan lingkungan kulturalnya dan berinteraksi dengan beragam kultur dan ideologi dalam situasi kolonial yang memuat beragam gejala modernitas.

Pada usia sekolah Muslimun telah menunjukkan kepeduliannya dalam skop pendidikan terhadap masyarakat di daerahnya. Beranjak dewasa di masa memasuki usia kerja, ia aktif di berbagai lembaga pemerintahan kolonial yang memahami atau setidaknya memberinya wawasan situasi. Pergaulan studi dan organisasi telah mempertemukannya dengan pusaran utama pergerakan nasional.

Latar belakang Muslimun tersebut telah menumbuhkan Muslimun menjadi seorang nasionalis kanan kooperatif dengan gagasan menonjol berupa ide-ide kemajuan. Sikap nasionalisme Muslimun memang bukan

pada warna umum nasionalisme Indonesia yang diagungkan atau dibanggakan dalam diskusi-diskusi kebangsaan. Sikap nasionalismenya dapat dikategorikan sebagai akar kanan nasionalisme yang mula-mula berkembang dalam bentuk nasionalisme Jawa. Aliran ini ditandai oleh ide kemajuan yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat anggotanya, serta mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Ide kemajuan kerap dikategorikan dalam gagasan modernitas yang dimaknai sebagai cara pandang yang bertumpu pada rasionalitas serta pengetahuan dan logika Barat.

Meskipun cita-cita kemajuan yang paling menonjol, usulan ataupun surat-surat Muslimun memuat pula gagasan kesetaraan dan persatuan. Gagasan kesetaraan terlihat ketika Muslimun membandingkan kondisi daerah dan masyarakatnya yang dinilai tertinggal dari daerah lain. Adapun kesadaran akan persatuan disampaikannya dalam dua bentuk, skop Kalimantan dan Indonesia. Antusiasmenya akan kesadaran berhimpun dalam skop Kalimantan dicetuskannya secara tersurat. Sementara kesadaran akan identitas persatuan skop Indonesia secara tersirat disampaikan melalui ekspresi kecemburuan, seperti saat mengkritik perbedaan perlakuan pemerintah kolonial terhadap daerah luar Jawa yang diumpamakannya sebagai "ibu tiri". Ungkapan terakhir tersebut menunjukkan pemahaman Muslimun bahwa Jawa dan luar Jawa adalah satu kesatuan.

Segala ekspresi nasionalisme yang diungkapkan Muslimun idealnya dapat memberi pemahaman akan proses pembentukan nasionalisme Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa, pemahaman historis dari sikap Muslimun menunjukkan bahwa kecintaannya pada daerah justru mengarahkannya pada kesadaran Indonesia. Pun, sikap pribadinya sebagai individu dalam berbagai status dan perannya dapat memberi teladan bagi generasi muda.

DAFTAR SUMBER

Arsip/Dokumen

- Akbar S., Oerai M. 1989. "Silsilah (Nasab) Keturunan Sultan Sjarif Ali Albarakat dari Negeri Brunei Darussalam dan Hubungannya dengan Sultan Sambas Darul Makmur". Sambas. (Naskah Sumber Tidak Diterbitkan).
- Arsip Keluarga R.M. Nalaprana. 1943 (Rokugatsu 2603). "Surat Pemberian".
- Arsip Nasional Republik Indonesia. *Inventaris Arsip Tanah Merah*, 1927.
- Balunus, H.M. Baroamas Jabang. 1990. "Penjelasan-Penjelasan tentang Perjuangan NIP dan Serikat Rakyat". Pontianak. (Naskah Sumber Tidak Diterbitkan).
- Fahmi, Urai Riza. 2004. "Kajian Silsilah Keturunan Raja-Raja Sambas". Sambas. (Naskah Sumber Tidak Diterbitkan).
- Ismail, Oerai Saad. t.t. "Silah Silah Segala Raja-Raja di dalam Negeri Berunai". Sambas. (Naskah Sumber Tidak Diterbitkan).
- Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie II, 1939–1942.*

Buku dan KTI Lainnya

- Achmad, Ya', Amsar Rachman, Soedharto, dan Widodo Adhisidarto. 1981. *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Amaruli, Rabith Jihan, Nazala Noor Maulany, dan Singgih Tri Sulistiyono. "Sumpah Pemuda Arab, 1934: Pergulatan Identitas Orang Arab-Hadrami di Indonesia," dalam *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 3, No. 2. Hlm. 121–132.
- Chijs, J. A. van der. 1885. *Catalogus de Etnologische Verzameling van het Kunsten en Wetenschappen*. Batavia's Hage: Albrecht & Co.-M. Nijhoff.
- Davidson, Jamie Seth. 2002. "Violence and Politics in West Kalimantan, Indonesia". Disertasi pada University of Washington.
- Fakih, Farabi. 2014. "Akar-Akar Kanan daripada Nasionalisme Indonesia: Nasionalisme Jawa dalam Konteks Kesejarahannya," dalam *Lembaran Sejarah* Vol. 11, No. 1, hlm. 37–49.

- Firmansyah. 2017. "Sejarah Muhammadiyah di Sambas 1932-1942," dalam *Bunga Rampai Seni, Budaya & Sejarah Pejuang Sambas*. Pontianak: Top Indonesia.
- Helsdingen, W.H. van. 1928. *Tien Jaar Volksraad Arbeid*. Weltevreden: Volksraad.
- Henley, David E.F. 1993. "Nationalism and Regionalism in Colonial Indonesia: The Case of Minahasa," dalam *Indonesia*, No. 55, hlm. 91-112.
- Kahin, George McTurnan. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Listiana, Dana dan Asnaini. 2020. *Manuskrip Kitab Qonun Sambas: Wawasan Ruang Perairan Versus Daratan*. Bandung: BPNB Kalbar-MJA.
- Listiana, Dana, Karel Juniardi, dan Raistiwar Pratama. 2014. *Pers dan Pemikiran Intelektual di Borneo Barat Masa Kolonial*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak-Kepel Press.
- 2019. "Indonesia dalam Penciptaan Nasionalisme Borneo," dalam *Wacana Nasionalisme dalam Pers Kalimantan Barat Pada Masa Pergerakan Kebangsaan*. Bandung: BPNB Kalbar-MJA.
- Miert, Hans van. 1996. "The 'Land of the Future': The Jong Sumatranen Bond (1917-1930) and Its Image of the Nation," dalam *Modern Asian Studies*, Vol. 30, No. 3, hlm. 591-616.
- Pluvier, J.M. 1953. *Ikhtisar Perkembangan Pergerakan Kebangsaan di Indonesia, 1930-1942*. Bandung: van Hoeve.
- Purba, Juniar. 1993. *Rahadi Osman*. Pontianak: BKSNT Pontianak.
- Rahzen, Taufik (ed.). 2007. *Seabad Pers Kebangsaan (1907-2007)*. Jakarta: l:Boekoe.
- Rohmadi, Nazirwan dan Warto. 2019. "Volksraad (People Council): Radicale Concentratie Political Arena and National Fraction, 1918-1942", dalam *Humaniora* Vol. 31, No. 2, hlm. 166-176.
- Rudiyanto, Natalia Kartika Dewi. 2013. "Peranan Gabungan Politik Indonesia dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1939-1941". Skripsi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Soedarto, Widodo Adhisidharto, dan Sugeng. 1978/1979. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat*. Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Suwignjo, R. Mahmud dan Ahmad Mansur. 1979. "Sebelas Perintis Kemerdekaan Indonesia dari Kalimantan Barat". Pontianak. (Belum Diterbitkan).

Tanasaldy, Taufiq. 2012. *Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia: Dayak Politic of West Kalimantan*. Leiden: KITLV.

Tarhan, Raden Muhammad. 2020. "Perkembangan Pendidikan Formal pada Masa Pemerintahan Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Tsafudin di Sambas Kalimantan Barat Tahun (1931–1943)". Skripsi pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Surat Kabar

Algemeen Handelsblad No. 36805, 13 Juli 1939.

Batavia Nieuwsblad No. 185, 5 Juli 1941.

Bataviaasch Nieuwsblad No. 198, 25 Juli 1939.

Batavia Nieuwsblad No. 303, 16 Nov 1940.

De Telegraaf No. 17. 824, 26 Maret 1940.

De Indische Courant No. 18, 5 Oktober 1940.

De Sumatra Post No. 107, 12 Mei 1939.

De Sumatra Post No. 213, 22 September 1941.

De Indische Courant No. 63, 28 November 1940.

De Indische Courant No. 32, 22 Oktober 1940.

Doenia Pemoeda, 1940.

Het Nieuws van den Dag No. 162, 14 Juli 1939.

Het Nieuws van den Dag No. 168, 21 Juli 1939.

Het Nieuws van den Dag No. 183, 9 Agustus 1939.

Het Nieuws van den Dag No. 185, 11 Agustus 1939.

Kesedaran, Januari–Oktober 1940.

Overzicht van de Inlandsche en Maleisch-Chineesche Pers No. 52, 30 Desember 1939.

Sipatahoenan No. 153, 10 Juli 1941.

Soera Pakat, 1940.

Soerabaiasch-Handelsblad No. 158, 9 Juli 1941.

Soerabaiasch-Handelsblad No. 167, 19 Juli 1941.

Soerabaiasch-Handelsblad No. 182, 6 Agustus 1941.

Soerabaiasch-Handelsblad No. 172, 25 Juli 1941.

Soerabaiasch-Handelsblad No. 189, 14 Agustus 1941.

Soerabaiasch-Handelsblad No. 199, 26 Agustus 1941.

Soerabaiasch-Handelsblad No. 301, 23 Desember 1940.

Wawancara

1. Nurhayati A.N., menantu R.M. Nalaprana di Pontianak.
2. Uray Yung Suliadi, cucu kemenakan R.M. Nalaprana di Surabaya.
3. Uray Safari, anggota Majelis Pemangku Adat Istiadat Kesultanan Sambas di Sambas.
4. Uray Riza Fahmi (59 tahun), Sekretaris Majelis Pemangku Adat Istiadat Kesultanan Sambas di Sambas.
5. Uray Waliadin, putra Uray Saad Ismail, pencatat silsilah keluarga di Kampung Tumuk Manggis, Sambas.
6. Mu'in Ikram, budayawan Sambas, anggota Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sambas di Sambas.
7. Aan Yulistiwa Akbar (31 tahun), *Founder* Pusaka Saprah, di Sambas.
8. Sunandar (39 tahun), Dekan Fakultas Dakwah dan Humaniora Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin (IAIS) Sambas, di Sambas.

Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat

BAGIAN 2

URAY ABDUL HAMID BIN URAY MACHMUD: TOKOH PENDIDIKAN DAN POLITIKUS (1945–1991)

LISYAWATI NURCAHYANI



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seorang keluarga aristokrat Sambas lahir kala daerahnya masih mengalami fase penjajahan kolonial Belanda. Sebagai seorang anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, jelas tidak dapat memilih kapan, di mana akan dilahirkan. Dengan melihat gelaran yang disandangnya, Uray Abdul Hamid (UAH) lahir di lingkungan aristokrat Sambas yang kental dengan budaya Islam. Lingkungan membentuk Uray Abdul Hamid menjadi sosok yang agamis dan intelektual.

Tidak bisa dimungkiri bahwa kaum aristokratlah yang sering menjadi *leader* dalam membawa kemajuan dan perubahan dalam masyarakatnya, sebab kaum bangsawan dan orang kayalah yang mempunyai banyak kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang melahirkan pengetahuan dan perubahan. Meskipun demikian, di sisi lain banyak juga kaum bangsawan atau aristokrat yang memanfaatkan keadaan ini hanya untuk kepentingan individu dan pribadi.

Sosok UAH ternyata berbeda. Meskipun lahir dari keluarga bangsawan dan kaya, UAH tidak memanfaatkan keadaan itu untuk bermalas-malasan. Kemandirian dan kesederhanaan terlihat jelas pada sosok UAH sampai akhir kehidupan beliau. UAH dikenal sebagai aktivis politik, jurnalis, dan sekaligus guru yang menjadikan beliau paket lengkap sebagai seorang pejuang, wartawan, guru, dan suami yang setia. Sepanjang hidupnya diabdikan untuk kepentingan rakyat dan negara. Namun, sayang sekali tidak banyak orang yang menulis sosok UAH, sehingga membuat penulis tertarik untuk melihat secara lebih dekat sosok UAH dalam perjuangan rakyat Sambas dan juga Kalimantan Barat.

2. Masalah

Persoalan yang muncul dari kajian tentang Uray Abdul Hamid adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana latar belakang kehidupannya?
- b. Bagaimana pemikiran dan perjuangannya dalam bidang politiknya?
- c. Bagaimana pemikiran dan aksinya dalam bidang pers?
- d. Bagaimana pemikiran dan perjuangannya dalam bidang pendidikan?
- e. Bagaimana pendapat para sahabatnya dan masyarakat Sambas mengenai beliau?

Permasalahan lain berkenaan dengan pencarian sumber tertulis maupun lisan, yang dilakukan dengan studi lapangan dan juga studi kepustakaan. Dalam masa pandemi ini penelusuran sumber dilakukan secara *online*, baik studi arsip maupun kepustakaan. Kelemahan sumber *online* adalah membutuhkan banyak waktu apabila kita menginginkan koran ataupun arsip. Perpustakaan Nasional dan juga Arsip Nasional menjadi lokasi untuk mendapatkan sumber sejarah, tetapi karena pelayanan yang masih belum maksimal dan stabil akibat pandemi, maka pengumpulan data akan riskan terhadap keterlambatan.

3. Maksud dan Tujuan

Selaras dengan permasalahan yang muncul dalam penulisan tentang Uray Abdul Hamid ini, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah

- a. mendeskripsikan latar belakang kehidupannya;
- b. mendeskripsikan pemikiran dan aksinya dalam bidang politik;
- c. mendeskripsikan pemikiran dan aksinya dalam pers;
- d. mendeskripsikan pemikiran dan aksinya dalam bidang pendidikan di Sambas;
- e. mendeskripsikan pendapat serta harapan para sahabatnya dan rakyat Sambas.

4. Ruang Lingkup

Meskipun lahir dari kalangan aristokrat Sambas, pemikiran dan perjuangan Uray Abdul Hamid didedikasikan untuk rakyat yang pada saat itu membutuhkan motivator dalam melakukan perjuangan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Untuk itu, tulisan ini menarasikan keberadaan Uray Abdul Hamid di Sambas maupun di Pontianak.

Sementara itu, fokus inventarisasi ini adalah menampilkan sosok Uray Abdul Hamid secara tematik dengan melihat latar belakang kehidupan dan perjuangannya serta hubungan sosial yang terjalin dengan para sahabat dan masyarakat. Dengan melihat secara tematik, sosok Uray Abdul Hamid terlihat multitalenta, yaitu sebagai tokoh pendidikan, politikus dan juga jurnalis.

Untuk periodisasinya, akan dibatasi pada kurun waktu tahun 1945–1991. Periodisasi ini didasarkan pada awal perjuangan Uray Abdul Hamid dalam mempertahankan kemerdekaan di Sambas, hingga kemudian beliau menutup mata pada tahun 1991.

5. Tinjauan Pustaka

Guna mewujudkan desain penelitian yang akurat, dibutuhkan banyak referensi yang berkaitan dengan tema maupun lokasi penelitian. Hal pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan beberapa tulisan tentang Uray Abdul Hamid (UAH) maupun sejarah Kabupaten Sambas. Buku *Kabupaten Sambas: Sejarah Kesultanan dan Pemerintahan Daerah* yang disusun oleh Anshar Rahman dkk. menginformasikan perjalanan sejarah

Sambas dari awal munculnya hingga otonomi daerah. Buku tersebut mengambil periodisasi terlalu panjang sehingga apa yang diinformasikan belum bersifat mendalam. Buku yang seharusnya bisa ditulis berjilid-jilid ini berkisar pada terbentuknya Kesultanan Sambas, masa pergerakan, perjuangan dan pasca-kemerdekaan hingga masa otonomi. Ulasan tentang pasca-kemerdekaan tidak banyak, tetapi setidaknya dapat menjadi pembandingan bagi tulisan yang hampir sama.

Selanjutnya, ada beberapa catatan atau artikel yang dibuat sebagai catatan kesaksian dan pengalaman yang dialami oleh penulisnya pada masa itu. Muhammad Sabirin AG merupakan penulis yang cukup produktif, meskipun tulisan-tulisannya berbentuk artikel yang belum diterbitkan ataupun dicetak. Namun, dari beberapa catatan inilah nama-nama lokal yang tidak tersebut dalam sejarah Sambas pada umumnya justru muncul. Saya cukup mengapresiasi tulisan-tulisan Sabirin AG dan Arpan, yang telah membantu kami, penulis sejarah, sehingga tugas kami menjadi lebih ringan. Walaupun tentunya masih ada catatan-catatan yang perlu diperiksa silang kembali yang akan menyempurnakan tulisan-tulisan tersebut. Tulisan yang terhimpun dari Sabirin AG antara lain "Sambas di Zaman Dwikora", "Sejarah Perjuangan Sultan Hamid II (Kesultanan Pontianak) dan Sejarah Perjuangan Masyarakat-Rakyat Sambas Mengembalikan Ibukota Kabupaten Sambas", "Sejarah Berdirinya SMA Negeri Sambas", "Sambas Zaman Trikora", dan "Tokoh-Tokoh Kampung Dagang". Adapun tulisan Arpan berjudul "Catatan Peninggalan Sejarah di Sambas".

Pers dan Pemikiran Intelektual di Borneo Barat Masa Kolonial tulisan Listiana dkk. menjadi bahan rujukan untuk mengetahui perkembangan pers pada masa kolonial. Buku ini membahas pers melalui surat kabar yang beredar di Kalimantan Barat periode 1919–1920 dan periode 1927–1942. Ulasan-ulasan yang dikemukakan dalam buku ini cukup mewakili perkembangan pemikiran lewat beberapa tulisan dalam surat kabar yang diperbandingkan antara satu, dua, atau lebih surat kabar. Ada dua periode yang ditampilkan dengan jenis terbitan yang berbeda. Periode 1920–1926 menampilkan surat kabar *Borneo Barat Bergerak*, *Soera Borneo*, *Warta Borneo*, *Halilintar*, *Berani*, dan *Sinar Borneo*. Periode kedua menampilkan *Kapoeas Bode*, *Oetoesan Borneo*, *Kesedaran*, *Doenia Pemuda*, dan *Pedoman*. Informasi yang ditampilkan membantu untuk mengembangkan tulisan dari sisi pers mengingat UAH adalah seorang jurnalis juga.

6. Kerangka Pemikiran

Penulisan tokoh Uray Abdul Hamid ini tidak bisa dikategorikan sebagai sejarah biografi sepenuhnya, tetapi masih bersifat inventarisasi. Mengutip tulisan begawan ilmu sejarah Indonesia, yaitu Sartono Kartodirdjo, bahwa untuk menulis biografi perlu memahami dan mendalami kepribadian seseorang melalui latar belakang lingkungan sosikultural di mana tokoh itu dibesarkan, bagaimana proses pendidikan formal dan informal yang dialami, dan watak-watak orang yang ada di sekitarnya. Begitu juga dengan segi psikologinya, seperti sisi emosionalnya, moralnya, dan rasionalnya. Perlu dikaji juga pandangan hidup dan intelektualitasnya. Hal ini tentunya memerlukan suatu proses yang panjang dalam pengumpulan data, sementara waktu yang tersedia dalam penelitian ini hanyalah belasan hari untuk pengumpulan data.

Selanjutnya, perjalanan politik Uray Abdul Hamid terkondisi pada masa menjelang kemerdekaan hingga pasca-kemerdekaan, sehingga semangat untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan lebih banyak mewarnai pemikiran dan perjuangannya. Penggunaan konsep nasionalisme sebagai istilah untuk menyebut ajaran atau aliran kebangsaan telah banyak didefinisikan oleh para ahli atau sejarawan. Munculnya pergumulan ide tentang nasionalisme dalam wadah-wadah organisasi merupakan suatu proses pertama dari kesadaran identitas untuk menggapai integrasi. Secara kultural pergumulan ide ini mengerucut dan memperoleh momentum pada tahun 1928 dengan adanya Sumpah Pemuda yang merupakan simbol kesadaran kolektif (Anis dalam Wajidi, 2006: xx).

Curahan pemikiran dan aksi politik yang dilakukan oleh UAH terakumulasi dalam dua cara. Pertama, melalui ide, pemikiran, maupun protes yang dilakukan melalui tulisan-tulisan yang disalurkan melalui surat kabar. Cara kedua melalui organisasi politik maupun pendidikan yang dapat membuat suatu perubahan. Posisi UAH adalah sebagai kaum intelektual yang lahir dari intelektual tradisional, tetapi di sisi lain pemikiran dan aksinya dapat dikategorikan sebagai intelektual baru. Seperti yang dikategorikan oleh Harry J. Benda, ada dua macam kaum intelektual di Timur, yaitu kaum intelektual lama dan kaum intelektual baru. Kaum intelektual lama adalah golongan penguasa lokal atau pribumi dan para kerabatnya. Adapun golongan intelektual baru muncul karena adanya pendidikan Barat, sehingga cara berpikir dan bertindak (proses pembaratan) tidak lagi bersifat tradisional. Golongan intelektual

baru dalam masyarakat berperan sebagai motivator dan dinamisator yang mampu menggiring masyarakat ke arah terciptanya kesadaran nasional. Sudah menjadi fenomena historis di negara-negara Timur, termasuk Indonesia, kaum intelektual berperan dalam menyiapkan bangsanya menuju kemerdekaan (Benda, 1983: 154–176). Dalam kenyataannya, apa yang diungkapkan Benda tidaklah tepat, sebab UAH berasal dari kaum intelektual bangsawan tetapi mengenyam pendidikan Barat sebagai intelektual baru. Perjalanan politik UAH selalu diwarnai dengan pemikiran dan aksi yang bisa memotivasi dan menjadi penggerak terjadinya perubahan pada anak-anak golongan orang kaya, golongan pegawai pemerintah, dan golongan bangsawan.

7. Metode Penelitian

Sesuai dengan alur pemikiran di atas, meski berbentuk inventarisasi, tulisan tentang UAH ini membutuhkan langkah-langkah dalam pencarian data tentang masa lalu. Untuk itu, kajian inventarisasi memerlukan metode sejarah dengan pertimbangan bahwa objek dan tema kajian berkaitan dengan masa lalu. Metode sejarah terdiri atas empat tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan data atau penelusuran data yang disebut heuristik. Dalam penelitian ini data diperoleh dari lapangan, studi kepustakaan, dan juga arsip serta surat kabar sezaman. Tahap kedua adalah kritik sumber sebagai langkah selanjutnya untuk melakukan kritik terhadap semua sumber yang digunakan, baik itu kritik ekstern terhadap bentuk fisik sumber maupun intern terkait dengan isi atau informasi sumber.

Langkah ketiga adalah interpretasi yang memerlukan perhatian khusus, terutama pada arsip-arsip Belanda, karena interpretasi yang diperoleh akan digunakan sebagai rekonstruksi peristiwa masa lalu. Interpretasi dimaksudkan untuk mengambil makna dari setiap setiap sumber. Analisis data menjadi langkah pertama dalam interpretasi, sehingga makna yang diambil akan menjadi suatu fakta sejarah. Dari banyak fakta yang telah dianalisis, perlu dicari benang merah agar fakta tersebut menjadi bersambung antara satu dan lainnya. Proses penyatuan atau perangkaian fakta ini ditempuh dan disebut dengan istilah sintesis fakta. Hasil dari sintesis fakta ini kemudian akan dituangkan dalam laporan akhir melalui proses rekonstruksi (Garraghan, 1946: 10; Nurcahyani, 2017: 13)

Tahap terakhir adalah proses rekonstruksi atau historiografi, yaitu menyajikan laporan akhir dalam bentuk tulisan inventarisasi hasil kajian sejarah. Dalam penyajiannya tulisan bersifat objektif dari data dan fakta yang ada, sebisa mungkin menghindari keterlibatan emosi. Metode penulisan dari hasil penelitian ini adalah deskriptif naratif yang mencoba menggambarkan atau merekonstruksi kembali sosok Uray Abdul Hamid secara tematis.

8. Sistematika

Dalam rangka mempermudah penyusunan laporan, maka tulisan ini disusun secara sistematis berdasarkan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan tema yakni sebagai berikut:

- a. latar belakang kehidupan sosial, pendidikan, dan keluarga;
- b. pemikiran dan aksi Uray Abdul Hamid;
- c. pendapat para sahabat dan rakyat Sambas tentang Uray Abdul Hamid; dan
- d. simpulan.

B. LATAR KEHIDUPAN URAY ABDUL HAMID

1. Latar Sosial Politik

Situasi Sambas pada awal abad ke-20 tidak jauh berbeda dengan situasi di Pontianak maupun di Jawa pada umumnya. Euforia Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menandai kebangkitan rasa kebangsaan yang semakin kuat yang menjadi dasar semangat memperjuangkan kemerdekaan.

Semua kejadian yang terjadi di Jawa menjadi panutan bagi daerah lain untuk mengikuti jejaknya, tak terkecuali Sambas. Sambas adalah sebuah daerah berbentuk kerajaan Islam yang mempunyai corak atau keunikan tersendiri dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan Barat. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya Sambas sebagai sebuah kerajaan yang didirikan oleh anak Raja Tengah yang bernama Raden Sulaiman dari Negeri Brunei Darussalam. Kerajaan Islam Sambas yang kemudian disebut Kesultanan Sambas didirikan oleh Raden Sulaiman pada 10 Zulhijah 1040 H/9 Agustus 1631 M.¹

¹ Berdasarkan catatan Sultan Muhammad Tsafiuiddin II "Silsilah Kerajaan Sambas 14 Ramadhan 1321 H/4 Desember 1903"; lihat U. Riza Fahmi, *Selayang Pandang Kerajaan Islam Sambas*, hlm. 38, lihat juga Erwin Mahrus, *Membangun Pendidikan: Gagasan Pendidikan Maharaja Imam Sambas Baisuni Imran*, hlm. 51.

Cikal bakal Kesultanan Sambas ini berdiri di Desa Lubuk Madung, tetapi akhirnya ibu kota dipindahkan ke arah hilir, yaitu Muara Ulakan, sampai sekarang.

Siapa Raden Sulaiman yang kemudian bergelar Sultan Tsafuiddin I dapat kita ketahui dari manuskrip “Silsilah Kerajaan Sambas” yang ditulis oleh Sultan Muhammad Tsafuiddin II pada 1321 H/1903 M. Selain itu, dari “Hubungan Silsilah Kesultanan Brunei Darussalam dan Kesultanan Sambas” yang dikeluarkan oleh Jabatan Pusat Sejarah Brunei dapat diperoleh keterangan bahwa Raden Sulaiman dilahirkan dari orang tua bernama Raja Tengah dan ibunya bernama Ratu Surya, adik Sultan Matan yang bernama Panembahan Giri Mustika bergelar Sultan Tsafuiddin. Raja Tengah merupakan anak dari Sultan Brunei Darussalam yang bernama Sultan Muhammad Hasan.² Sultan Muhammad Hasan sendiri mempunyai delapan anak dengan istrinya, Putri Sulu anak Paduka Maulana Maha Sri Sultan Shah Muhammada Halim Budiman (Christopher Buyers dalam Riza, 2018: 15–16), yaitu

- a. Raja Tua bergelar Sultan Abdul Jalilul Akbar Sultan ke-10 Brunei yang memerintah negeri Brunei pada 1598–1659 M;
- b. Raja Tengah diangkat menjadi Sultan di Serawak pada tahun 1599 M dengan gelar Sultan Tengah Ibrahim Ali Omar Shah;
- c. Raja Muhammad Ali menjadi Sultan ke-12 Brunei dengan gelar Sultan Haji Muhammad Ali memerintah Brunei pada 1660–1661 M;
- d. Pangeran di Gadong Besar;
- e. Raja Bungsu menjadi Sultan di Sulu dengan gelar Paduka Maulana Sri Sulthan Maha Muwali Al Wasit Shah;
- f. Pangeran Shahbandar Maharaja Laila;
- g. Pangeran Paduka Tuan Haji Matsrudin;
- h. Pangeran Ahmad.

Dari keterangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Sultan Abdul Jalil Akbar adalah abang Raja Tengah dan bukan ayahnya. Selanjutnya, Raden Sulaiman gelar Sultan Muhammad Tsafuiddin menikahi Mas Pajah (Puteri Ayu Bungsu), anak Ratu Sepudak yang melahirkan raja-raja Sambas.

Pada awal abad ke-20 estafet kekuasaan Sambas telah sampai pada raja ke-13, yaitu Raden Afifuddin bin Raden Ishak (Datuk Tua) bergelar Sultan Tsafuiddin II yang berkuasa paling lama (25 Rabiulawal 1283 H/6 Agustus 1866–15 Rabiulakhir 1341 H/4 Desember 1922). Banyak hal

² Menurut “Hubungan Silsilah Kesultanan Brunei Darussalam dan Kesultanan Sambas” yang dibuat oleh Jabatan Pusat Sejarah Brunei dalam Uray Riza, 2018. *Selayang Pandang Kerajaan Sambas*, hlm. 21.

sudah dilakukan Sultan pada masa ini, baik di bidang pendidikan, ekonomi maupun politik. Hal yang paling menonjol adalah berdirinya lembaga pendidikan dan pemberian kesempatan belajar hingga ke luar negeri yang disponsori oleh Sultan.

Selain mendirikan sekolah, Sultan juga membangun bidang pertanian dan perkebunan serta perhubungan. Banyak digali terusan-terusan seperti Terusan Parit Sebuk, Kartiasa, Semangau, Sentalik, Sebangkau, Sagu, Parit Baru, dan Ketapang (Kota Bangun) (Arpan, 1995: 43; Rahman *et al.*, 2001: 78c). Di samping itu, dilaksanakan juga pembangunan jalan raya Sambas-Pemangkat-Singkawang-Bengkayang. Beberapa sekolah pun dibangun, antara lain Byzondere School diubah menjadi HIS (1915), dan juga sekolah-sekolah agama seperti Madrasah Sulthaniah yang dipercayakan kepada Haji Fauzi Imran (Rahman *et al.*, 2001: 78c).

Di level bawah awal abad ke-20 ditandai oleh berkembangnya pergerakan nasionalis akibat penjajahan Belanda. Kunci perkembangan pada masa ini adalah munculnya ide-ide baru mengenai organisasi dan dikenalnya definisi-definisi baru dan lebih canggih tentang identitas. Ide baru tentang organisasi meliputi bentuk-bentuk kepemimpinan baru, sedangkan definisi yang baru dan lebih canggih mengenai identitas, meliputi analisis yang lebih mendalam tentang lingkungan agama, sosial, politik, dan ekonomi (Ricklefs, 2005: 247–248). Munculnya Budi Utomo di Jawa menjadi salah satu contoh organisasi yang beranggotakan priayi rendah dalam pemerintahan Belanda (STOVIA). Seiring dengan mandeknya Budi Utomo, tumbuh berbagai organisasi yang bersifat keagamaan, kebudayaan, pendidikan, dan beberapa yang bersifat politik, dan ada pula yang bersifat keduanya (Ricklefs, 2005: 251). Fenomena ini mendapat respons dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Hubungan yang sudah terjalin sejak lama dengan para pedagang dari Surabaya menjadikan Sarekat Islam (SI) masuk pertama kalinya di Ngabang pada tahun 1914. Kemudian, SI berkembang ke berbagai daerah di Kalimantan Barat, seperti Mempawah, Pontianak, Singkawang, dan Pemangkat. Sementara itu, munculnya gerakan Islam modern melalui Muhammadiyah membawa peranan penting dalam bidang pendidikan. Muhammadiyah mulai diperkenalkan pada tahun 1926 melalui mubalig Minangkabau dan kemudian berdiri organisasi Muhammadiyah pada tahun 1932 yang dipelopori oleh Manaf Siasa dan Muhammad Akib dari Minangkabau (Purwana *et al.*, 2004: 104). Selanjutnya, organisasi Parindra yang mendapat respons positif di berbagai daerah menjadi organisasi besar karena meleburnya partai-partai Sarekat seperti Partai Sarekat

Sumatera dan Partai Sarekat Celebes. Di Pontianak Parindra merupakan tempat berkumpulnya tokoh-tokoh yang berasaskan pemerintahan demokrasi dan nasionalis. Tokoh-tokoh partai ini antara lain Raden Koempoel (Kepala Kantor Pos Pontianak), Hadjarati (guru HIS [*Hollandsch-Inlandsche Scholen*]), Mustamir (Ajunct Landbow Consulent), dan A. Harahap (Kepala Pelabuhan Pontianak). Di samping itu, ada tokoh pemuka masyarakat dan kalangan swasta, seperti Raden Wariban, Bulhaji Rifai, dan Machrus Effendi (Pringgodigdo, 1986: 122–123). Pada tahun 1937 Parindra mengembangkan sayapnya ke beberapa daerah, seperti Ngabang, Sambas, Mempawah, Sintang, dan Singkawang (Purwana *et al.*, 2004: 107). Parindra semakin kuat dengan masuknya pejuang eks Digulis yang lepas dibuang dari Boven Digul.

Sementara itu, di Sambas organisasi lokal maupun nonlokal pernah lahir. Misalnya, pada tanggal 17 Juni 1927 berdiri organisasi bernama Jong Sambas yang dipimpin oleh H. Ahmad Mesir, Ariani Hardigaluh, Abdulah Sisik, dan Munzir Imran. Gerakan ini bergerak di bidang pendidikan dan kependuan. Kemudian, pada tahun 1932 cabang-cabang organisasi Muhammadiyah muncul di berbagai daerah, seperti Sei Bakau Kecil Mempawah yang dipimpin oleh H.M. Kurdi Dja'far, Singkawang yang dipimpin oleh M. Taufik, Sambas yang dipimpin oleh H.A. Malik Sood, dan Pontianak yang dipimpin oleh Arsjad Annasar (Rahman *et al.*, 2001: 101).

Pada masa inilah seorang UAH dilahirkan pada tahun 1923, besar, dan kemudian berjuang untuk menerima estafet kepemimpinan dari para pejuang sebelumnya, yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Di sisi lain status UAH dengan segala embel-embelnya memberikan kesempatan baginya untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya, bahkan hingga ke Jawa yang merupakan gudangnya ilmu dan gudangnya orang-orang intelektual. Di sinilah rasa dan empati mulai bermain, apakah tetap menjadi seorang feodal ataukah berjuang demi rakyat yang kelaparan dan bodoh. Tulisan ini mencoba mengurai bagaimana sosok UAH yang mengidolakan Sjahrir dan perjalanan politik beliau selama hidup.

2. Latar Keluarga

Pada tahun 1923 Uray Machmud mendapatkan putra kedua dari istri pertamanya, yang diberi nama Uray Abdul Hamid (UAH). Istri pertama Uray Machmud, Nyi Mas Halijjah, yang berasal dari kalangan bangsawan Ngabang, memberikan lima putra dan satu putri. Enam bersaudara putra-

putri Uray Machmud dari istri pertama adalah Uray Dahlan, Uray Abdul Hamid, Uray Fatimah, Uray Renik, Uray Malik, dan Uray Kadir.

Sebagai seorang bangsawan yang mempunyai kedudukan dan kaya, Uray Machmud termasuk tokoh masyarakat yang disegani dan dikenal oleh masyarakat Sambas. Sultan dan rakyat Sambas menyebutnya "Tuk Kaye" yang mempunyai kebun sangat luas di Kendaik. Gelaran "Tuk Kaye" diberikan oleh Sultan sebagai penghargaan atas jasanya dalam bidang ekonomi yaitu sebagai penyandang dana, bagi keberlangsungan pemerintahan Kerajaan Sambas. Meskipun termasuk dalam keluarga terpandang, Uray Machmud tidak membiasakan anak-anaknya menghambur-hamburkan uang. Uray Machmud mengajarkan anak-anaknya untuk mandiri dan menyekolahkan anaknya sesuai dengan keinginan anak-anaknya. Beliau tidak memaksakan kehendak, tetapi memberikan kebebasan untuk memilih. Terbukti dari enam bersaudara anak istri pertama hanya Uray Malik yang mengikuti jejaknya sebagai pedagang. Sementara itu, UAH sendiri lebih menyukai politik dan pendidikan modern.

Salah satu ajaran atau wejangan dari Uray Machmud yang dituturkan oleh cucunya, Uray Burhanuddin:

“ Jangan meminta uang; aku tidak akan memberi. Kalau meminta makanan, silakan makan sekenyang-kenyangnya. Kalau saya beri uang, maka si anak akan menjadi malas dan bodoh dan tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan uang. Dalam berdagang harus jujur dan tidak boleh menipu.”

Petuah inilah yang membentuk karakter anak dan cucunya untuk mandiri, tidak menggantungkan hidup kepada orang tua walaupun orang tua mereka kaya, bekerja keras, jujur, peduli kepada sesama, serta tidak membedakan status, golongan, dan agama dalam masyarakat. Oleh karena itu, selama hidupnya UAH tidak pernah meminta-minta. Bahkan, pada saat dirinya harus masuk penjara karena dituduh sebagai pemberontak oleh Belanda maupun Sukarno dan diminta oleh Belanda maupun Sukarno untuk meminta maaf agar dibebaskan dari hukuman, UAH menolak. UAH orang yang memegang teguh prinsip. Karena tidak merasa bersalah dalam menyuarakan aspirasi rakyat pada masa itu, maka walaupun harus dipenjara, itu sebagai bagian dari konsekuensi perjuangan yang harus dijalani. Saat menjalani hukuman penjara di Yogyakarta, meskipun ada hak untuk mengajukan grasi, beliau tidak mau melakukannya. Sungguh luar

biasa keteguhan serta kesetiaan beliau terhadap keluarga dan juga rakyat dan negara.

Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Meskipun mempunyai pekerjaan dan latar pendidikan yang berbeda antara Uray Machmud, sang ayah, dan UAH, keduanya mempunyai karakter yang hampir sama, yaitu teguh dalam memegang prinsip, pendiam, pekerja keras, peduli terhadap rakyat sekitarnya, tegas, dan cerdas. Perbedaan keduanya hanyalah Uray Machmud orang yang serius, sedangkan UAH pandai melucu meskipun dia tidak tertawa. Dalam mendidik anak, keduanya tidak memanjakan anak-anak mereka dengan limpahan kekayaan, tetapi mengajarkan kehidupan yang sederhana. Keduanya juga mengajarkan kebebasan dalam pilihan hidup. Meskipun kasih sayang yang diberikan kepada anak-anak mereka terbatas karena kesibukan dalam bekerja, mereka memberikan perhatian terhadap keinginan anak-anak mereka.

Uray Machmud mencari nafkah dengan berdagang hasil kebun karet yang luas di Kendaik. Masyarakat di Kendaik sangat mengenal juragan karet yang mempunyai rasa kesosialan yang tinggi dan tidak segan-segan membantu masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Kebun karet yang berhektare-hektare ditoreh dengan bantuan masyarakat. Hasil torehan tersebut dibeli oleh Uray Machmud, kemudian dibawa dengan kapal ke Sambas. Di Sambas getah karet dijual ke pasar. Setelah menyelesaikan penjualan karet, Uray Machmud akan kembali ke Kendaik dengan membawa berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga, seperti beras, gula, kopi, teh, dan tembakau. Di Kendaik Uray Machmud hidup bersama istri keduanya yang bernama Nek Salbiah. Dari Nek Salbiah, Uray Machmud memperoleh empat orang anak, yaitu Uray Hazimah, Uray Tauran, Uray A. Gani, dan Uray Su'idah. Selanjutnya, dari anaknya, Uray Tauran, Uray Machmud memperoleh sembilan orang cucu, yaitu Uray Marzuku, Uray Herlina, Uray Nidia, Uray Edi Kurniawan, Uray Yusmadi, Uray Suryadi, Uray Sapta, Uray Nazila, dan Uray Diana. Sementara itu, istri pertamanya lebih memilih untuk menetap di Sambas. Walaupun lahir dari dua orang ibu, anak-anak Uray Machmud beserta cucunya hidup dengan rukun sampai sekarang.

Setelah kembali dari Jawa, UAH mulai berencana untuk menikah. Pasangan pilihannya bukan dari kalangan bangsawan. Hatinya lebih memilih untuk hidup dengan gadis yang dicintainya, yaitu Hanuna. Meskipun bukan bangsawan, Hanuna berasal dari kalangan orang terpendang di Sambas. Hanuna putri Maharaja Basiuni Imran, seorang

mufti yang disegani oleh masyarakat Sambas maupun di luar Sambas. Basiuni Imran dari istri pertama mendapatkan lima orang putri dan satu orang putra, yaitu Wahajah, Hasibah, Sabibah (suaminya bernama Uray Malik Sood), Hanunah (suaminya bernama Uray Abdul Hamid bin Machmud), No'ma (suaminya bernama Hamdi Mursal), dan Rasyid.

Dalam kehidupan sehari-hari Hanuna seorang wanita yang rajin beribadah dan mengaji. Kepandaianya dia tularkan kepada para wanita di lingkungan rumahnya. Seminggu sekali Hanuna mengajarmengaji di masjid depan rumahnya (Wawancara Ibu Samha, September 2021). Hari-hari lain ia pergunakan untuk mengurus rumah tangganya dan juga membaca majalah *Kiblat* menjadi hobinya. Sifatnya yang tidak banyak bicara, tetapi murah senyum, tegas, sabar, dan baik hati membuat saudara-saudaranya dan juga lingkungan masyarakatnya merasa segan. Sebagian karakternya ini menurun dari sang ayah, Maharaja Imam Sambas Basiuni Imran (Wawancara Uray Burhan, Oktober 2021). Sejalan dengan informasi Samha, tetangga Hanuna, bahwa sebagai putri seorang imam besar Hanuna hidup sederhana dan tidak sombong sehingga tetangganya hormat kepadanya.



Sumber: Dokumen Pribadi Uray Burhan

Gambar 2.1 Dari kiri ke kanan: pengasuh, Hanunah, Sabibah, dan No'ma

Sepanjang perkawinannya dengan Uray Abdul Hamid, Hanuna hidup rukun dan jarang bertengkar. Menurut Uray Burhan, keduanya mempunyai sifat pendiam, sabar, setia, cerdas, dan suka membaca. Tentang keturunan, keduanya ikhlas belum diberikan kepercayaan dari Allah Swt. ketika dua kali Hanuna mengalami keguguran. Namun, dengan mengambil salah satu keponakannya (anak Uray Dahlan), kasih sayang keduanya seperti kasih sayang yang diberikan kepada anak kandung. Putranya tersebut, yang diberi nama Uray Burhan, mempunyai kedekatan dengan Uray Abdul Hamid dan juga Hanuna. Hans (panggilan Uray Burhan) sebagai anak satu-satunya diperlakukan dengan baik dan dididik dengan kasih sayang oleh keduanya. Hans menimba ilmu di sekolah Amkur yang dikepalai oleh seorang Belanda. Sekolah ini merupakan pilihan UAH agar Hans mendapatkan pendidikan Barat dan juga kedisiplinan dalam bersikap.

Hal ini menunjukkan bahwa UAH bersifat modern dan menginginkan anaknya lebih siap dalam menghadapi kerasnya perjuangan pada waktu itu. Padahal pada masa itu biasanya para orang tua lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya ke pesantren ataupun Sekolah Tarbiyatul Islam yang sudah berkembang baik pada saat itu, yang kebetulan pada saat itu sekolah ini di bawah binaan kakeknya sendiri, yaitu Maharaja Imam Basiuni Imran.



Sumber: Dokumen Pribadi Uray Burhan
Gambar 2.2 Dari kiri ke kanan:
keponakan, Hanuna, Uray Burhan,
dan Uray Abdul Hamid

Dalam Gambar 2.2 terlihat kebahagiaan keluarga kecil Uray Abdul Hamid beserta dengan anak dan keponakan (anak Hamdi Mursal dan No'ma). Keluarga yang menjadi penyemangat dan pendukung dalam segala aktivitas yang dilakukan dalam hidup UAH. Kesetiaan UAH diberikan kepada istrinya sampai Hanuna meninggal pada tahun 1983. Sepeninggal Hanuna, UAH menikah lagi dengan Halimah yang masih kerabatnya. Saat itu usia UAH sudah tidak muda lagi (sekitar 64 tahun) dan Halimah berusia 50 tahun.

3. Latar Pendidikan

Lahir di lingkungan bangsawan yang kaya, masalah ekonomi tidak menjadi kesulitan bagi keluarga UAH. Apalagi ayahnya seorang pedagang kaya yang berpikiran modern dengan tidak mengekang keinginan anak-anaknya. Uray Machmud memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih masa depan mereka masing-masing. Uray Machmud merupakan pemimpin keluarga yang mempunyai dua istri dan sebelas anak yang semuanya membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya. Kesibukan sebagai pedagang untuk mencari nafkah bagi keluarganya agar tidak kekurangan menyebabkan Uray Machmud tidak selalu berada di sisi keluarganya. Namun, karena sikap kemandirian yang selalu diajarkan oleh Uray Machmud, anak-anaknya dapat memahami kesibukan sang ayah.

Kesempatan dan keinginan agar dapat bersekolah dan mengenyam pendidikan terbuka seluas-luasnya bagi keluarga UAH. Maka, rata-rata semua anak Uray Machmud dapat merasakan pendidikan yang baik, bahkan sampai ke Jawa. UAH menamatkan sekolah dasar Belanda (HIS), dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Guru Muhammadiyah di Solo, Jawa Tengah. Setelah tamat dari Sekolah Guru Muhammadiyah Solo, UAH bersekolah lagi di AMS Muhammadiyah di Jakarta. Namun, UAH belum sempat menyelesaikan sekolah karena suasana politik pada saat itu, yakni pemerintah kolonial Belanda mengalami kekalahan dari Jepang.

Setelah menamatkan HIS di Sambas, UAH memilih untuk menjadi guru. Hal ini tidak terlepas dari pandangan masyarakat tentang profesi guru yang begitu dihormati oleh masyarakat. Pada masa itu pengaruh pendidikan Islam modern masuk ke Sambas melalui kaum intelektual Sambas yang belajar di Kairo. Oleh karena itu, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi yang berhasrat pada Islam modern sangat diterima oleh masyarakat Sambas. Gerakan *modernisme* Muhammadiyah sendiri mempunyai peran ganda. Di satu pihak gerakan ini ingin membebaskan diri dari dari keempat mazhab abad Pertengahan dan kembali pada sumber-sumber Islam yang asli, yaitu Al-Qur'an yang merupakan perintah Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad saw. dan hadits atau sunnah, yaitu tradisi mengenai kehidupan Nabi. Salah satu tujuan Muhammadiyah adalah *ijtihad* baru yang memanfaatkan kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan (pengetahuan Barat) yang menurut kaum modernis mampu membantu peradaban Islam keluar dari kebodohan, takhayul, dan kemunduran (Ricklefs, 2005: 256).

Pandangan inilah yang membuat UAH berhasrat untuk menempuh pendidikan di Sekolah Guru Muhammadiyah yang bercorak Islam modern. Pilihan jatuh ke Sekolah Guru Muhammadiyah Solo yang merupakan salah satu sekolah guru Muhammadiyah terbaik di Jawa pada saat itu. Kalau diperkirakan berdasarkan umur, UAH mulai bersekolah di Solo sekitar tahun 1936 pada umurnya yang ketiga belas tahun. Suasana politik di Jawa pada saat ini mengalami banyak perubahan dengan ditangkapnya para tokoh nasionalis, seperti Sukarno dan kemudian Hatta, Sjahrir, dan pemimpin-pemimpin PNI Baru lainnya yang ditangkap dan kemudian dibuang ke Boven Digul sekitar tahun 1934. Keadaan ini juga terjadi di Kalimantan Barat ketika para tokoh Digulis ditangkap sekitar tahun 1936. Dengan ditangkapnya para pemimpin organisasi dan semakin meningkatnya gangguan pihak kepolisian, maka semakin lemahlah gerakan-gerakan nasionalis sekuler (Partindo dan PNI

Baru) dan juga gerakan-gerakan Islam anti-penjajahan (Permi dan PSII) (Ricklefs, 2005: 287). Hal ini menunjukkan bahwa organisasi politik yang berhaluan non-kooperasi tampaknya tidak lagi bisa hidup dan akhirnya redup. Sebaliknya, organisasi politik yang berhaluan kooperasi masih bisa bertahan, seperti Partai Indonesia Raya (Parindra) yang berdiri pada tahun 1935.

Di samping haluan politik menunjukkan perubahan, di sisi lain para tokoh Islam modern dan tradisional mulai menyadari bahwa apa yang mereka inginkan memerlukan proses waktu yang panjang untuk melakukan pembaharuan, sedangkan Islam tradisional menyadari bahwa keberadaan pembaharuan tidak bisa ditolak. Maka, keduanya sepakat untuk memprakarsai pembentukan Majelis Islam A'laa Indonesia (MIAI) sebagai forum untuk melakukan diskusi yang pada masa Jepang berubah nama menjadi Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Angin kesadaran tersebut juga menerpa organisasi politik nasionalis yang pada tahun 1939 bergabung menjadi GAPI (Gabungan Politik Indonesia) kecuali PNI Baru. Di sini jiwa kesadaran untuk bersatu semakin berkembang dengan menekan pemerintah Belanda melalui Volksraad. Tiga mosi yang diajukan ke pemerintah Belanda melalui Volksraad yang disponsori oleh Thamrin, Soetardjo, dan Wiwoho meminta agar pemerintah menggunakan "Indonesier" (orang Indonesia) sebagai pengganti kata penghinaan "inlander" dalam dokumen resmi, menetapkan kewarganegaraan Hindia, dan mengubah Volksraad menjadi parlemen yang sebenarnya (Ricklefs, 2005: 292). Namun, seperti biasa mosi ini mengalami kegagalan. Meski mengalami kegagalan, hal menarik dalam fase ini adalah kesadaran politik para tokoh untuk bersatu yang merupakan modal dalam melawan kolonialisme Belanda dan fasisme Jepang.

Situasi politik yang berkembang di Jawa memberikan landasan politik baru bagi UAH untuk menetapkan langkah di masa depan. Pengalaman selama berada di Jawa berpengaruh terhadap pemikiran UAH untuk menceburkan diri dalam kancah politik yang tidak terlintas sebelumnya dalam benaknya. Kepergiannya ke Jawa untuk menjadi seorang guru yang mempunyai wawasan modern, tetapi setelah kembali justru sikap politiknya yang menonjol dalam hidupnya. Apapun alasannya, akhirnya dia memilih melanjutkan pendidikannya di Algemene Middelbare School (AMS) 'sekolah menengah atas' di Jakarta. Namun sayang, belum tuntas dalam menempuh ilmu, Jepang keburu hadir di Indonesia, sehingga situasi tidak lagi kondusif untuk melanjutkan pendidikan.

Pada usia sekitar 19 tahun UAH akhirnya kembali ke Sambas pada masa Jepang dan bekerja di perusahaan orang tuanya. Sebelum pulang ke Sambas, UAH menyempatkan diri untuk mengikuti kursus kader Partai Sosialis Indonesia (PSI) di Jakarta, yang ke depannya menjadi haluan politik dan aktivitas politiknya di Sambas dan Pontianak. Kiprah politik UAH diawali dengan banyak belajar pada saat sekolah di Solo dan di Jakarta, dengan berkawan dengan teman-temannya dari daerah-daerah lain yang pada saat itu marak dengan berdirinya organisasi pemuda/*jong* (Wawancara Uray Burhan, November 2021).

Meskipun kiprah politiknya pada saat di Jawa, yaitu di Solo dan Jakarta belum terdeteksi, pengalaman dan pembelajaran di Jawa menjadi landasan karier politik UAH di Kalimantan Barat. Dengan latar sebagai pendidik, UAH mengabdikan sebagian perjuangannya sebagai pengajar dan mendirikan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Di sisi lain pengalaman sebagai kader politik semasa di Jakarta mendorong dia untuk berjuang bersama dengan para sahabatnya untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. UAH seorang yang cerdas karena menguasai lima bahasa, yaitu Inggris, Belanda, Jerman, Perancis, dan Indonesia. Keahlian tersebut dimanfaatkan untuk membantu Wali Kota Pontianak sebagai penasihat dan penerjemah (Wawancara Uray Burhan).

C. PEMIKIRAN DAN AKSI PERS

Dari penuturan anak Uray Hamid, Bung Hans, sepanjang yang dia tahu bapaknya adalah seorang wartawan atau jurnalis yang mempunyai hobi menulis dan membaca. Segala pemikirannya dia tuangkan dalam tulisan dan kemudian diterbitkan dalam surat kabar. Surat kabar yang diprakarsai oleh Uray Abdul Hamid dan kawannya yang bernama Munawar Kalahan diberi nama *Sambas Bergolak*.

Sambas bergolak lahir saat situasi politik di Kalimantan Barat dan Sambas pada khususnya sedang mengalami kemenangan dan kegembiraan, tetapi tiba-tiba datang lagi Belanda yang bermaksud menjajah kembali. Hal ini sudah pasti membuat masyarakat menolak keras keinginan Belanda tersebut. Namun sayangnya, surat kabar ini belum dapat ditemukan keberadaannya, sehingga belum dapat digambarkan secara pasti bagaimana kondisi Sambas pada saat itu dan bagaimana sikap tokoh masyarakat dalam menghadapi kedatangan Belanda di Sambas. Namun, yang pasti bahwa pers, dalam hal ini surat

kar menjadi ajang menyampaikan pikiran, ide, ataupun gagasan yang berkenaan dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada masa itu.

Pada masa ini tampaknya pemikiran pers di Sambas dipengaruhi oleh perkembangan pers atau surat kabar di Pontianak. Perkembangan pers di Pontianak semakin tumbuh dengan baik semenjak lahirnya pelopor surat kabar *Borneo Bergerak* pada tahun 1919–1920. Disusul kemudian oleh *Soera Borneo* yang terbit sekitar tahun 1923. Kemudian ada *Warta Borneo* yang terbit di Pontianak sekitar tahun 1924–1925. *Halilantar* terbit pada tahun 1923–1924; *Berani* terbit pada tahun 1925; dan *Sinar Borneo* terbit pada tahun 1926. Dari pemikiran yang tertuang dalam surat kabar tersebut di atas terungkap bahwa ternyata pemikiran tentang antikapitalis dan antikolonialis mendominasi pemikiran intelektual Kalimantan Barat. Hal ini mencerminkan kondisi periode awal abad ke-20 Kalimantan Barat yang mengalami banyak tekanan politik dari kolonialisme dan kapitalisme akibat penandatanganan kontrak antara pemerintahan Kerajaan dan Belanda. Pengakuan kedaulatan tersebut mengakibatkan rakyat Borneo terpaksa tunduk terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Rakyat terpaksa membayar pajak (belasting) dan mengerjakan pekerjaan umum (*heerendienst*). Belum lagi ada keberpihakan pemerintah kolonial terhadap pemilik modal atau kaum kapitalis yang merugikan rakyat sebagai korban monopoli (Listiana *et al.*, 2014: 62). Di samping itu, pemikiran tentang pangan juga menjadi topik yang hangat dibicarakan, yaitu bagaimana Kalimantan Barat dapat mencukupi pangan atau tidak bergantung pada daerah luar.

Pemikiran pers yang berhaluan komunis ketika itu mengakibatkan tidak hanya pembredelan terhadap surat kabar yang beredar, tetapi juga penangkapan terhadap aktivis yang diduga oleh Belanda berhaluan kiri. Para tokoh *Borneo Barat* yang ditangkap dan kemudian dibuang ke Boven Digul atau Tanah Merah, Papua, dikenal dengan sebutan sebelas tokoh Digulis. Di samping itu, ada juga tokoh-tokoh lain yang berperan dalam pers tetapi tidak ikut dibuang ke Digul, seperti Mustava dan Yakob Salim dari Sumatera Barat, Sultan Maulana Anwar yang sakit dan kemudian meninggal di Pontianak, M. Narat yang menderita sakit jiwa di rumah penjara, serta M. Dahlan Sutan Lembang Tuah dan M. Sarman berhasil melarikan diri ke Malaka (Listiana, 2011*cf.* Effendi, 1982: 22). Semenjak penangkapan tersebut, pers mengalami perubahan haluan; tidak lagi keras, tetapi cenderung bersifat kooperatif. Hal ini terlihat pada beberapa surat kabar yang muncul pada kurun waktu tahun 1927–1942, seperti *Kapoeas Bode* (1927), *Oetoesan Borneo* (1927–1928), *Tjaja Timoer*

(1928–1941), *Borneo Barat* (1936–1941), *Kesadaran* (1939–1949), *Doenia Pemoeda* (Agustus 1940), dan *Pedoman* (1941). Selanjutnya, muncul lagi beberapa surat kabar setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 November terbit harian *Terompet* yang dikelola oleh oleh tiga bersaudara, yaitu Tan Zahri Abdullah, Djalil Abdullah, dan Tan Husni Abdullah, sedangkan di Singkawang Tan Zahri Abdullah juga mendirikan harian *Suara Rakjat* (1946) (Usman, 2011).

Pada masa ini UAH sedang tidak berada di Pontianak maupun di Sambas karena sedang menempuh pendidikan di Solo dan juga di Jakarta. Namun demikian, perkembangan tentang kondisi politik di Kalimantan Barat selalu dikabarkan oleh teman-temannya. Baru pada masa Jepang UAH kembali ke Sambas dan bergabung dengan kawan-kawannya. Kemudian, pasca-kemerdekaan UAH bersama dengan kawan-kawannya mendirikan surat kabar *Sambas Bergolak* sebagai bentuk penyaluran pendapat, ide, dan protes terhadap ketidakadilan dan perjuangan melawan Belanda. Keterlibatannya sebagai jurnalis dan kiprah politik UAH sering membuatnya keluar masuk penjara karena tulisan-tulisannya yang menentang Belanda. Namun, hal ini tidak membuat jera UAH untuk selalu memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

Di Pontianak Uray Abdul Hamid bin Machmud bersama dengan Ibrahim Saleh, Achmad Noor, dan Ronald Harun Rasjid mendirikan surat kabar yang diberi nama *Suasana* sekitar tahun 1950–1959 (Usman, 2011). Namun, lagi-lagi keberadaannya belum terdeteksi sehingga belum dapat diketahui maksud dan tujuan surat kabar ini. Di samping surat kabar *Suasana*, UAH bersama Ibrahim Saleh dan saudaranya, Aliaswad Saleh, menerbitkan surat kabar baru dengan nama *Harian Pembangunan* pada tahun 1951. Selanjutnya, sampai dengan tahun 1966 surat kabar di Pontianak semakin beragam dengan terbitnya harian *Duta Masyarakat* edisi Kalimantan Barat yang dipimpin oleh A.A. Syukrie Noor dan M. Sidik Ibrahim; harian *Mertju Suar* pimpinan Sulaiman Achmad (pimpinan penerbit Romeo Grafika) dan Saleh Badawi; harian *Angkatan Bersendjata* pimpinan Kapten Piet Damanik, Aman S, Ridwan AS, Halim Mahyuddin dan Mawarsi Zandyoes; kemudian, harian *Persatuan Karya* pimpinan Anang Z.A. (Usman, 2011). Pada tahun 1970 Uray Abdul Hamid mendirikan surat kabar *Kerakjatan* sebagai pemimpin redaksi dan sekaligus penanggung jawab. Untuk mengembangkan bakatnya, UAH membuat banyak tulisan dan diterbitkan secara *freelance* (Akcaya, 25 Agustus 1991).

Dari informasi di atas terlihat bahwa UAH termasuk dalam jajaran tokoh yang ikut menyumbangkan pemikiran tentang pers. Tidak sekadar sebagai pemimpin redaksi, UAH juga mengisi tulisan-tulisan di koran tersebut. Bahkan, karena sebuah tulisan beliau tentang hubungan Sukarno dengan PKI yang belum diterbitkan tetapi sudah bocor, UAH dianggap melakukan gerakan subversif, sehingga dipenjara di Yogyakarta selama kurang lebih dua tahun (Wawancara Uray Burhan, November 2021). Sekembalinya dari pembuangan di Yogyakarta, pada masa pemerintahan Soeharto, UAH diminta oleh Wali Kota Pontianak Siswoyo (1967–1973) untuk menjadi anggota Dewan Penasihat dan juga penerjemah bahasa asing untuk kunjungan tamu-tamu negara. Sempat juga UAH menjadi pegawai pada Djawatan Organisasi Usaha Rakyat (DOUR).

D. PEMIKIRAN DAN AKSI POLITIK

Pemikiran dan aktivitas politik UAH dimulai ketika pulang kembali dari menempuh pendidikan di Jakarta pada masa penjajahan Jepang. Hal pertama yang dilakukan adalah bekerja di perusahaan orang tuanya sendiri dan aktif di bidang kesenian dengan menjadi pengarah kelompok sandiwara Sinar Bintang di Pontianak. Kemudian, pada saat kemerdekaan Indonesia dikumandangkan UAH kembali ke Sambas.

UAH ikut dalam euforia dan semangat menyambut peristiwa yang sangat penting yaitu dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Sukarno dan Hatta. Bersama dengan rakyat Sambas, UAH menyambutnya dengan penyatuan tekad dan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan NICA dengan pembentukan Persatuan Bangsa Indonesia Sambas (PERBIS). Momentum yang paling mengharukan dan patriotis dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Antusiasme masyarakat dalam menyambut kemerdekaan terlihat pada peristiwa tragis yang terjadi di Sambas pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1945. Ini bukan sebuah kisah, melainkan peristiwa nyata yang membanggakan sekaligus juga banyak diwarnai polemik, terutama karena alur cerita yang tidak semua sama. Hal ini bisa saja terjadi sebab pelaku maupun saksi akan melihat dari sudut pandang berbeda, di samping daya ingat manusia ada batasnya. Namun, intinya peristiwa itu menunjukkan keberanian rakyat Sambas dalam mengeksplorasi keinginan mereka dengan sebuah tindakan heroik.

Dari penuturan beberapa penulis, seperti Muhammad Sabirin AG, Anshar Rahman, Sarimin Minhad, dan Arpan terdapat beberapa perbedaan mengenai Peristiwa 27 Oktober 1945, tetapi dicoba untuk dikaji dan dikritik lebih cermat lagi. Bagaimanapun, ketiganya sepakat bahwa terjadinya peristiwa tersebut digagas oleh satu organisasi, yaitu PERBIS. Berikut ini akan diceritakan mengenai kronologi Peristiwa 27 Oktober 1945.

Setelah berita peristiwa Proklamasi Kemerdekaan sampai di Pontianak, maka Zainuddin Nawawi dan Gifni Ismail datang ke Sambas untuk mengabarkan berita tersebut (Tim Pemda, 1989: 214). Untuk mempertahankan kemerdekaan agar NICA tidak kembali menjajah, maka rakyat Sambas meresponsnya dengan membentuk organisasi PERBIS. Organisasi PERBIS dibentuk pada tanggal 13 Oktober 1945 menurut catatan Arpan dan juga Sabirin—sedikit berbeda dengan catatan Rahman, yaitu 23 Oktober 1945—di SD Tarbiyatul Islam Sambas dengan dimotori oleh H. Siraj Sood, Naim Razak, U.A. Hamid, M. Kemad, dan Umar Sood. Selain itu, juga dibentuk Komite Nasional Sambas. Bersamaan dengan terbentuknya PERBIS, tiba pula tentara Sekutu di Kota Sambas dengan diboncengi oleh NICA (Nederlandsch-Indische Civiele Administratie) yang dipimpin oleh Asisten Residen Brickvild dan pasukan KNIL yang dipimpin oleh Kapten Van Der Schoors dan Sersan Mayor Blok (Arpan, 1995: 59; Rahman *et al.*, 2001: 117). Tampaknya, PERBIS adalah suatu perkumpulan yang dibentuk secara mendadak sebagai respons terhadap peristiwa Proklamasi Kemerdekaan, tetapi menjadi pemersatu semua elemen yang ada di masyarakat. Ide politik organisasi ini adalah menyelenggarakan rapat umum yang dihadiri oleh pengurus PERBIS dan aksi massa untuk menaikkan bendera Merah Putih di kantor Controleur Belanda dan juga di Keraton Sambas. Tujuan penaikan bendera Merah Putih di kantor Belanda, jelas merupakan pernyataan kemenangan bangsa Indonesia dan pengakuan rakyat Sambas. Sementara itu, penaikan bendera Merah Putih di Keraton Sambas sebagai bentuk pengakuan bahwa Kerajaan Sambas masuk ke dalam pemerintahan Republik Indonesia walaupun keinginan itu dari rakyat, bukan dari pihak Raja Sambas pada saat itu.

Guna mempersiapkan rapat umum—yang akhirnya berlanjut dengan aksi demonstrasi yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945—, telah dilaksanakan rapat persiapan pada tanggal 26 Oktober 1945 di rumah H. Masudi di Kampong Tumuk Sambas oleh pengurus PERBIS dan dihadiri oleh para pemuda eks Kaigun Heiho. Sebagai hasil dari rapat tersebut, diambil keputusan untuk melakukan rapat umum bertempat di gedung

bioskop Sambas (Indonesia Teater) (Rahman *et al.*, 2001: 121). Sehari sebelum diadakannya rapat persiapan Muhammad Akil dan para pemuda Semparuk datang ke Sambas sehingga mereka ikut hadir dalam rapat tersebut. Hasil rapat memutuskan bahwa pada tanggal 27 Oktober 1945 akan dilaksanakan rapat umum yang dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keesokan harinya, seperti yang telah direncanakan dan dipersiapkan, rakyat Sambas berkumpul di gedung bioskop Indonesia Teater milik keluarga Siraj Sood. Dalam rapat itu rakyat Sambas mendengarkan orasi pengurus PERBIS. Rapat akbar ini dihadiri oleh semua pengurus PERBIS, yaitu H. Siraj Sood, Naim Razak, U.A. Hamid, M. Kemad, Umar Sood, dan Hamidi AR. Hadir juga beberapa anggota dari Kaigun dan Heiho, seperti Madjri dan U. Ali Mochtar Raden Bima, anggota Seinendan dan Keibodan, serta para pemuda masyarakat Melayu Sambas dan Maharaja Imam Basiuni Imran (Sabirin AG, 2010: 20).

Orasi pengurus PERBIS tersebut mengobarkan semangat rakyat Sambas untuk menentang penjajah yang akan menjajah untuk kedua kalinya. Hal ini mendorong demonstrasi massa bergerak mengadakan pawai bendera Merah Putih berkeliling Sambas. Para pemuda dan pengurus PERBIS serta pemuda eks Kaigun dan Heiho berbaris mengelilingi Sambas diikuti oleh massa ratusan rakyat dan anak-anak sekolah (Rahman *et al.*, 2001: 121). Para pemuda eks Heiho dan rakyat menuju kantor Controleur Belanda dengan membawa bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu "Indonesia Raya" dan yel-yel Merdeka. Sementara itu, di sisi lain Muhammad Akil setelah melakukan orasi di depan masyarakat Sambas, menyeberang ke Tumuk Manggis menuju Vervolgschool (sekolah sambungan kelas IV, V, dan VI) Tanjung Rasau Mentawak yang dipimpin oleh Mas Kemad. Muhammad Akil berorasi membakar semangat anak-anak untuk ikut dalam aksi. Pada saat itu hadir pula Wakil Kepala Sekolah M. Bachroen Sutan Melano (Minangkabau), para guru, yaitu Engku Radjab, Engku Matsah, Mardjini Hardi Galuh, M. Riduan Achmad, Soeyo, Safei, dan guru agama Hamidi A.R. Para murid yang ikut berdemo antara lain Musa Zaini, M. Saleh Amat, Uray Maknun, Uray Yakob, Uray Landot, Chalid Bakran, Zulkifli Anong, Muslimin AG, Sabirin AG, Mas Razali, Pardani, Syeh Awab, Syeh Yahya, Alfi, Daeng Huan, Daeng M. Saleh, Hamdi Ahmad, Karim, Lana, Jaya, Soekirno, Soenarno, Metnue, Tan Tauran, Tan Sabirin, Tan Syahrial, Hazizi, dan Radjuni Usman (Sabirin AG, 2008: 11–12).

Ketika sampai di muka kantor Controleur, rombongan eks Heiho dan rakyat Sambas dihadang oleh seorang Indo-Belanda bernama Van der Lipp (Dolp). Kemudian, terjadi insiden ketika Dolp menembakkan senjata apinya. Namun, peluru senjata api yang ditembakkan oleh Dolp meleset. Akhirnya, Dolp dicekik oleh seorang eks Heiho bernama Madjri dan dipukul kepalanya oleh Kauli. Sementara itu, yang menaikkan bendera sang Merah Putih adalah A. Gafur, seorang mantri kesehatan pegawai Rumah Sakit Sambas dan juga anggota PERBIS (Sabirin AG, 2010: 21).

Setelah menyelesaikan pengibaran bendera di kantor Controleur, rombongan para anggota eks Heiho bergabung dengan rombongan yang dipimpin oleh H. Siraj Sood menuju halaman Keraton Sambas. Tidak lama kemudian, datang tentara Belanda yang dipimpin oleh Kapten Van der Schoors yang bermaksud untuk membubarkan aksi massa tersebut. Dalam aksi massa di halaman Keraton Sambas terjadi insiden ketika Tabrani Ahmad menjadi korban penembakan sebab nekat maju untuk menolong H. Siraj Sood yang sedang dalam ancaman senjata Belanda. Tabrani Ahmad tertembak dan kemudian ditusuk dengan bayonet dan tubuhnya diangkat ke atas oleh tentara KNIL. Bunyi tembakan tersebut menimbulkan kepanikan. Belanda membubarkan secara paksa para demonstran, terutama anak-anak sekolah dan masyarakat yang segera menyelamatkan diri. UAH juga lari menyelamatkan diri. Basiuni Imran terjun ke parit yang kebetulan sedang pasang. Sementara itu, H. Siraj Sood tertembak punggungnya (Sabirin AG, 2008: 13). Kemudian, oleh beberapa orang temannya H. Siraj Sood dimasukkan ke perahu dan dibawa ke rumah di Kampong Tanjung Rengas (Rahman *et al.*, 2001: 123).

Saat terjadinya peristiwa tersebut Belanda menangkap beberapa anggota PERBIS, antara lain H. Malik, Umar Sood, Uray Abdul Hamid, dan Naim Razak. Mereka kemudian dipenjara (Rahman *et al.*, 2001: 118). Belanda melakukan patroli militer ke segenap penjuru Sambas untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa seperti itu lagi. Meskipun sebagian tokoh intelektual ditangkap oleh Belanda, perjuangan tetap berlanjut, seperti yang dilakukan oleh H. Siraj Sood dengan membentuk Persatuan Muslim Indonesia (Permi) Sambas, Arif Satok dengan Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindom), Tan Moch. Saleh dengan Gerakan Pemuda Indonesia (Gerpindo), dan Naim Razak dengan Persatuan Bakti. Pendirian dari organisasi-organisasi tersebut bertujuan untuk mengecoh perhatian dari Belanda (Rahman *et al.*, 2001: 119). Aksi-aksi lain yang dilakukan oleh kaum intelektual Sambas adalah menyerang tangsi-tangsi militer Belanda.

Setelah keluar dari penjara, tampaknya UAH ikut larut dalam organisasi Komite Nasional Kalimantan Barat (KNKB)³ yang melakukan rapat pada 5 Januari 1950 di Gedung PBI. Hasil rapat memutuskan untuk mengusulkan dr. Sudarso sebagai Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB)—Sultan Hamid II diduga oleh KNKB sudah melepaskan jabatan sebagai kepala daerah karena telah masuk dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai Menteri Negara Zonder Portofolio—dan menyampaikan protes terhadap aksi militer NICA pada tanggal 26 November 1949 yang melakukan penangkapan terhadap enam belas tokoh terkemuka Ngabang (Purwana *et al.*, 2004: 204). Posisi UAH dalam KNKB menurut surat kabar *Akcaya* adalah Ketua Cabang Sambas di Pontianak (*Akcaya*, 25 Agustus 1991). Puncak dari pergolakan yang dipimpin oleh KNKB adalah pemogokan umum di seluruh Kalimantan Barat pada tanggal 7–18 Maret 1950, yang menuntut agar Dewan Kalimantan Barat (DKB) dihapus dan DIKB dibubarkan serta Kalimantan Barat dijadikan sebagai bagian dari Republik Indonesia (Purwana *et al.*, 2004: 206). Situasi ini menyebabkan pemerintah RIS pada tanggal 12 Maret 1950 mengutus Komisaris Umum Mr. Indra Kusuma dan M. Suprpto untuk melakukan fasilitasi perundingan dan menghasilkan kesepakatan antara KNKB dan Dewan Kalimantan Barat agar mengakhiri pemogokan dengan membentuk Badan Pertimbangan dalam transisi pada tanggal 13–18 Maret 1950. Namun, dengan tertangkapnya Sultan Hamid sebagai pemimpin DIKB pada awal April dengan tuduhan sebagai penghasut kelompok Westerling, maka secara otomatis kekuatan DIKB menjadi goyah. Maka, pada tanggal 7 Mei 1950 keluarlah Surat Keputusan No. 234/R yang memutuskan bahwa Badan Pemerintahan Harian DIKB menyerahkan segala hak dan kekuasaannya kepada Pemerintah RIS. Dengan demikian, secara hukum DIKB telah bubar dan oleh RIS ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri no B.Z.17/2/74 tanggal 24 Mei 1950 Kalimantan Barat berada di bawah pemerintahan RIS dengan mengangkat R. Budiharjo sebagai residen sementara di Kalimantan Barat yang berkedudukan di Pontianak (Purwana *et al.*, 2004: 207).

Selain KNKB, UAH aktif dalam beberapa organisasi lain. Salah satu organisasi yang pernah diikuti oleh UAH adalah Gerakan Pembangunan Rakyat Indonesia (Gepenri). Ketika masih dalam tahanan Belanda, UAH membentuk organisasi ini bersama para sahabatnya. Setelah keluar dari

3 KNKB dibentuk pada tanggal 25 November 1949 yang dirintis oleh GAPI, PRI, dan PBI dan dukungan rakyat Kalimantan Barat untuk membubarkan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) (Purwana *et al.*, 2004: 191)

tahanan, UAH mendampingi Uray Bawadi sebagai ketua dan UAH sebagai sekretaris. Kemudian, organisasi lain yang pernah diikuti oleh UAH adalah Gerakan Tani Indonesia (GTI). Organisasi terakhir dalam hidup UAH adalah menjadi Ketua I Dewan Harian Daerah (DHD) Angkatan 45 Kalimantan Barat dan Legiun Veteran Republik Indonesia.

Di bidang politik, pada tahun 1951 UAH mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) cabang Kalimantan Barat dan menjadi sekretaris (sederajat dengan ketua waktu itu). Selain itu, UAH juga duduk dalam Dewan Partai Pusat PSI. Jabatan ini didudukinya sampai PSI dibubarkan pada tahun 1960. UAH juga bergabung dalam Liga Demokrasi (pada zaman Nasakom) yang dibentuk untuk mengimbangi Demokrasi Terpimpin sampai dibubarkannya organisasi ini (Akcaya, 25 Agustus 1991).

Aktivitas politik lain yang pernah dijalani oleh UAH adalah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Kalimantan Barat. Kemudian, UAH menjadi anggota DPRD hasil pemilu sebagai perwakilan dari PSI sampai kemudian DPRD dibubarkan dan menjadi DPRDGR pada tahun 1959 (Akcaya, 25 Agustus 1991). Pada tahun 1965 DPRDGR mengeluarkan keputusan untuk memindahkan ibu kota Sambas ke Singkawang. Hal ini jelas merugikan masyarakat Sambas. Menurut pendapat mereka, Sambas mempunyai beberapa kelebihan. Salah satunya bernilai historis sebagai sebuah kerajaan. Dalam tubuh DPRDGR UAH sebagai pembawa bendera sosialisme, bersama dengan Partai Masyumi yang digawangi oleh M. Busri, Syar'ie Dahlan, dan A. Rasyid, serta Partai Nahdlatul Ulama (NU) yang dipimpin oleh Ali Sunnah tetap mempertahankan kedudukan ibu kota tetap di Sambas. Namun, mereka kalah oleh suara PNI dan PKI yang pada waktu itu tetap menyuarakan pemindahan ibu kota ke Singkawang (Sabirin AG, 2011: 18).

UAH di samping terjun ke politik sejak muda sampai tuanya juga mempunyai hobi membaca dan menulis untuk menuangkan ide-ide, pandangan, maupun tanggapan terhadap kondisi yang terjadi pada waktu itu. Salah satunya tulisan UAH pada masa Orde Lama yang isinya tentang keterkaitan Bung Karno dengan PKI yang sebenarnya belum sempat terbit tetapi sudah bocor sehingga menjadi alasan bagi Sukarno untuk menangkap UAH dan membuangnya ke Yogyakarta. UAH bersama dengan Ilyas Ibrahim dan Kutal Asri ditangkap pada tahun 1964, atas tuduhan melakukan tindakan subversif sebagai simpatisan musuh (Malaysia). Bukti tuduhan tersebut adalah catatan yang jatuh ke tangan pendukung Nasakom, melalui orang-orang Partindo Sambas. Catatan tersebut berisikan kritik

UAH terhadap kebijakan Sukarno yang terkait dengan politik Konfrontasi terhadap Malaysia dan kebijakan Sukarno yang memberikan angin kepada PKI (Akcaya, 25 Agustus 1991).

Sekitar tahun 1965, menjelang meletusnya gerakan PKI tanggal 30 September, Sukarno menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada UAH, bersama-sama dengan aktivis lain seperti Sutan Sjahrir (Wawancara Uray Burhan). Dari sinilah kekaguman UAH terhadap Sjahrir makin kuat, sehingga paham sosialisme yang selaras dengan Sjahrir mendorongnya untuk kembali terjun ke politik sekembalinya dari pengasingan di Yogyakarta. UAH dibebaskan oleh pemerintahan Orde Baru sekitar tahun 1967 dan kembali ke Kalimantan Barat. Saat berada di pengasingan, UAH pernah jatuh sakit dan sempat menjalani opname beberapa hari di rumah sakit dengan ditemani oleh istrinya. UAH sempat dikunjungi oleh para mahasiswa Kalimantan Barat yang menempuh pendidikan di Yogyakarta dan menyempatkan diri untuk berbincang dan berfoto bersama. Kunjungan para mahasiswa memberikan semangat kepada UAH untuk segera sembuh.

Pemerintahan Orde Baru yang mulai berjalan membebaskan UAH sebagai tahanan politik sekitar tahun 1967. Sebelum kembali ke Kalimantan Barat, UAH menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan sahabatnya Uray Bawadi yang menetap di Jakarta. Sekembalinya dari pengasingan, UAH menetap di Pontianak dan membuka usaha kecil-kecilan dan membantu orang tua dalam usaha dagang.



Sumber: Dokumen Pribadi Uray Burhan

Gambar 2.3 UAH ditemani oleh Hanuna, istrinya, yang sedang mengunjunginya di rumah sakit di Yogyakarta.



Sumber: Dokumen Pribadi Uray Burhan

Gambar 2.4 Mahasiswa Kalimantan Barat yang menempuh pendidikan di Yogyakarta mengunjungi UAH di rumah sakit Yogyakarta.



Sumber: Dokumen Pribadi Uray Burhan

Gambar 2.5 UAH (ujung paling kanan) berkunjung ke tempat Uray Bawadi dan keluarga.



Sumber: Uray Burhan

Gambar 2.6 Kartu keanggotaan Legiun Veteran Republik Indonesia UAH



Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 2.7 Piagam penghargaan yang diberikan kepada UAH sebagai pejuang kemerdekaan dari Departemen Pertahanan dan Keamanan



Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 2.8 Piagam penghargaan yang diberikan kepada UAH sebagai sebagai pejuang Angkatan 45 dari DHD 45

Penghargaan yang pernah diterima oleh UAH adalah medali perjuangan dari DHD 45 (1990) dan piagam penghargaan sebagai pejuang kemerdekaan dari Departemen Pertahanan dan Keamanan, serta gelar kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (1981). Selain memperoleh sertifikat ataupun medali, para pejuang juga berhak mendapatkan tunjangan atau santunan sebagai pejuang atau veteran, tetapi UAH tidak mau menerimanya karena perjuangan yang beliau lakukan tidak dapat dinilai dengan uang dan dilakukan dengan ikhlas tanpa paksaan. Walaupun selama hidupnya UAH dalam kesederhanaan, beliau tidak bergantung kepada orang lain.

E. PEMIKIRAN DAN AKSI PENDIDIKAN

Pendidikan menjadi pemikiran UAH karena melalui pendidikan para pemuda dan masyarakat bisa menjadi cerdas. Setidaknya, belajar membaca dan menghitung bisa menghindarkan mereka dari penipuan atau kebohongan orang-orang yang berniat jahat. Kesempatan belajar pada masa itu sangat terbatas. Tidak semua anak ataupun pemuda dapat beruntung bisa bersekolah. Selain kesempatan terbatas, jenis pendidikan yang ada di Sambas pada masa itu juga tidak banyak, di samping biaya pendidikan yang harus dibayar oleh rakyat merupakan beban yang tidak ringan.

Pada tahun 1953 UAH bersama dengan Uray Bawadi mendirikan Yayasan Pembangunan Nasional (YPN) yang berlokasi di Pemangkat. UAH dipercaya sebagai ketua bagian sekolah-sekolah di Pemangkat yang merupakan salah satu kegiatan Gepenri, di samping kegiatan lain seperti koperasi. Hingga tahun 1988 UAH masih menjadi Ketua YPN. Kemudian, pada tahun 1955 UAH bersama Munawar Kalahan mendirikan Yayasan Pembangunan Sambas (YPS) dan menjabat sebagai ketua (*Akcaya*, 25 Agustus 1991).

Melalui YPS, UAH mendirikan sebuah sekolah menengah atas (SMA) di Sambas. Latar belakang yang mendorong UAH untuk mendirikan SMA YPS (Yayasan Pembangunan Sambas) adalah jatah sekolah untuk Sambas dipindahkan ke Singkawang, mengingat pada masa itu ibu kota administratif Kota Sambas ada di Singkawang. Sebagai penghibur kekecewaan rakyat Sambas, maka atas inisiatif UAH (Ketua Yayasan Pembangunan Sambas), Sekretaris Munawar Kalahan, Bendahara Haji A. Razak Sood, dan didukung oleh Ketua PGRI Sambas M Busrin, berdirilah

SMA YPS pada tanggal 1 September 1957. Sebagai Kepala Sekolah SMA YPS adalah A. Rasyid Hasan dan Wakil Kepala Sekolah Murtaba M. Chan, dengan dibantu oleh beberapa guru tetap, yakni M Sabirin AG, M. Zain Godang, M. Idris (keponakan Oevang Oerai, Gubernur Kalimantan Barat waktu itu), Mahli A. Rahman, dan Rasyidi A. Hamid (Sabirin AG, 2011: 16–17).

Dari kesaksian Sabirin AG, diceritakan bahwa yang bertugas mencari guru untuk mengajar adalah UAH. Kemudian, UAH sendiri pergi ke Jakarta. Menurut penuturan Sabirin AG dalam tulisannya, sebagian dari para guru tetap yang mengajar di SMA YPS adalah lulusan perguruan tinggi di Jawa atau mahasiswa yang sedang belajar di Jawa, khususnya Yogyakarta dan Jakarta. Sabirin AG sendiri saat itu selain menjadi pegawai negeri di sebuah sekolah rakyat 6 tahun (SR VI) juga berstatus sebagai mahasiswa Hukum Universitas Indonesia (UI). A. Rasyid Hasan juga berstatus sebagai guru SR dan kuliah di Fakultas Ekonomi UI. Adapun Murtaba M. Chan kuliah di Yogyakarta, bersama dengan M. Idris dan Zaini Godang yang berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Demikian juga dengan Mahli A. Rahman, putera Singkawang yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi di UGM Yogyakarta (Sabirin AG, 2009: 2–3). Informasi tersebut memperlihatkan bahwa para pengajar YPS meskipun sebagian bukan dari latar belakang guru, mereka mempunyai latar dasar pendidikan yang berkualitas dari perguruan tinggi terbaik di Jawa. Hal ini menunjukkan keseriusan UAH dan kawan-kawan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi pemuda Sambas.

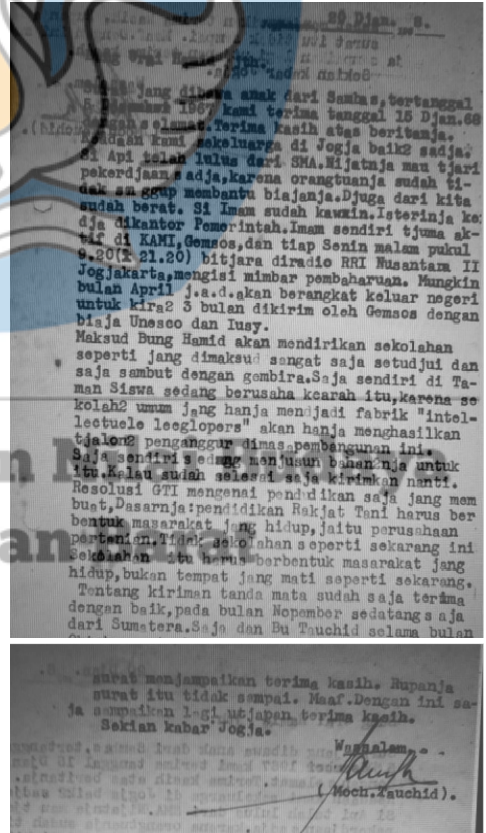
Namun, sayangnya SMA yang menjadi kebanggaan masyarakat Sambas karena didirikan dengan usaha masyarakat, bukan mengandalkan pemerintah, tersebut harus mengalami kolaps akibat pendanaan yang tidak stabil. Dana berasal dari persentase hasil ekspor karet dari Yayasan, dan juga dari para donatur yayasan, sehingga pada saat keadaan politik dalam negeri bergejolak (Trihora 19 Desember 1961), maka ekspor karet menjadi macet karena hubungan dengan luar negeri terputus (Wawancara Mu'in Ikhrum, September 2021). Di sisi lain keberadaan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Pontianak Cabang Sambas yang difasilitasi oleh pemerintah dan membuka tiga jurusan, yaitu Jurusan Ilmu Pasti (B), Jurusan Ekonomi Sosial (C), Jurusan Budaya (A) juga berdampak pada kelangsungan SMA YPS yang hanya membuka satu jurusan yaitu Ekonomi Sosial. Maka, persaingan dalam memperoleh murid pun tidak dapat dihindari, yang membuat SMA YPS semakin terpuruk. Meskipun

demikian, pada perkembangannya SMA YPS menjadi solusi bagi anak-anak yang tertinggal kelas tetapi tetap ingin bersekolah (Wawancara Ibu Samha, September 2021).

Kondisi politik dalam negeri yang semakin terpuruk dengan pergantian politik masa Dwikora tahun 1964 membuat UAH sebagai Ketua YPS kesulitan dalam mencari dana. Karena itu, ide untuk menggabungkan diri dengan SMAN Pontianak Cabang Sambas terpaksa dilakukan. Dalam kesepakatan yang dihadiri oleh pengurus YPS, Direktur SMAN Sambas yang baru J. Kontu, Pemerintah Daerah, Direktur SMAN Pontianak Cabang Sambas, dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum U. Aliuddin Yusba, diputuskan bahwa semua murid dan guru SMA YPS diterima oleh SMAN Pontianak Cabang Sambas yang diganti namanya diubah menjadi SMAN I Sambas pada tanggal 1 September 1964.

Meskipun hanya hidup selama tujuh tahun, SMA YPS telah melahirkan murid-murid yang berhasil dan sukses, seperti Prof. Syamsudin Djahmad, S.E., M.Si.; Prof. Sabinen Ada, S.E.; Prof. Anwar Saleh, S.H.; Masleh Yaman, S.H., M.H.; Drs. Bpepein Kibri; Hilal Dja'far S.E., M.Sc.; M. Noor, S.H.; Drs. Aminuddin Hardi Galuh; Drs. Jamiluddin Hardi Galuh; M. Jalil S.H.; Drs. H.U. Darmansyah; dan Drs. Ibhah (Sabirin AG, 2009: 5).

Ada hal yang menarik dari diskusi melalui surat yang dikirim oleh UAH kepada seorang kawannya yang ada di Yogyakarta. Kawannya yang bernama Moch. Tauchid tersebut adalah salah seorang pengurus Perguruan Taman Siswa. Moch. Tauchid menerima surat dari UAH pada tanggal 15 Januari 1968 melalui seorang kurir anak Sambas, padahal surat dibuat pada tanggal



Sumber: Dokumen Pribadi Aan

Gambar 2.9 Surat balasan untuk UAH dari sahabatnya, Moch. Tauchid

15 Januari 1967. Namun, yang menarik dari surat tersebut adalah pemikiran tentang model sekolah yang tidak lagi berbentuk sekolah umum yang akan melahirkan calon-calon pengangguran pada masa mendatang, tetapi sekolah yang lebih khusus. Dalam istilah sekarang, sekolah yang digagas oleh UAH tersebut dinamakan sekolah kejuruan. Selepas dari penjara di Yogyakarta, tampaknya UAH berkeinginan untuk mendirikan sekolah semacam itu, mengingat salah satu di antara dua yayasan yang pernah dia bangun sudah bubar. Dengan maksud tersebut, maka UAH berdiskusi dengan kawannya yang punya pemikiran yang sama. Apakah niat UAH tersebut terlaksana atau tidak perlu ada kajian lebih lanjut.

F. PENDAPAT DAN HARAPAN

Kehidupan manusia tidak lepas dari kesalahan dan ketidaksempurnaan. Begitu juga dengan sosok UAH dalam perjalanan hidupnya. Akan tetapi, sifat dan karakter baik dalam diri UAH akan menjadi aspirasi dan juga idola kaum muda. Di balik sosoknya yang pendiam, UAH lebih banyak melakukan aktivitas yang bermanfaat daripada sekadar bicara. Ide ataupun gagasan dia curahkan dalam tulisan yang diterbitkan secara *freelance* ataupun di surat kabar yang dia kelola sendiri. Gerakan politiknya jangan ditanya lagi. Beberapa kali tokoh Sambas yang seangkatan dengan Sutan Sjahrir, Uray Bawadi, dan Aliyan yang ini dipenjara dan disiksa dalam tahanan. Namun, hal ini tidak membuatnya jera, sampai akhirnya umur yang membuat dia membatasi diri dalam politik.

Di bawah ini akan diungkapkan bagaimana para sahabat dan rakyat Sambas menilai UAH sebagai sosok pejuang, keluarga, dan pribadi. Tanggapan yang pertama datang dari seorang sahabat seperjuangan yaitu Almarhum Ibrahim Saleh, saat itu Ketua DHD 45, yang dikutip dari surat kabar *Akcaya*. Dia mengatakan sejak berjuang menentang penjajah dan mempertahankan serta mengisi kemerdekaan ini tidak pernah goyah sedikit pun patriotisme UAH. Menurut Ibrahim ada dua hal yang patut dicontoh oleh generasi penerus dari kepribadian UAH, yaitu dia mempunyai prinsip dan kokoh dalam mempertahankan prinsip itu. Prinsip UAH tersebut adalah menegakkan dan mempertahankan kebenaran. Ibrahim memberi contoh, pada saat UAH, ditahan keluarganya memohon kepada pemerintah kolonial Belanda untuk membebaskan UAH dari penganiayaan dalam tahanan dan sepertinya Belanda memberikan persyaratan agar UAH meminta maaf kepada pemerintah Belanda,

persyaratan ini ditolak oleh UAH dan dijawab bahwa dalam menegakkan hak bangsa Indonesia ia merasa tidak pernah salah sehingga ia tidak mau meminta maaf (*Akcaya*, 26 Agustus 1991). Peristiwa kedua menurut Ibrahim adalah pada saat UAH ditendang oleh seorang opsir Belanda menggunakan sepatu berpaku, dia tidak pernah mengaku bersalah dan tidak membongkar rahasia perjuangan kepada penjajah Belanda. Selain itu, UAH tidak pernah membanggakan segala gelar yang disandangnya (*Akcaya*, 26 Agustus 1991).

Sahabatnya yang lain adalah Tillah. Ia sangat terkesan dengan sikap dan pribadi UAH yang tidak segan untuk membantu tanpa memandang suku dan agama. UAH akan membela mati-matian kalau orang itu benar, bahkan ia tahan menderita untuk kebahagiaan orang lain. Tillah menambahkan bahwa UAH seorang ningrat dan berpendidikan tapi ia selalu menyatu dengan semua orang (*Akcaya*, 26 Agustus 1991).

Menurut abangnya yang bernama Uray Dahlan Machmud, perjuangan adiknya tidak hanya di satu tempat, tetapi hampir di seluruh daerah Kalimantan Barat. Sementara itu, anaknya, Uray Burhan, mengatakan UAH sosok yang tegas, keras, setia, kukuh dalam memegang prinsip, terbuka, jujur, dan tidak banyak bicara tetapi pandai melucu. Begitu tegasnya UAH, sampai-sampai Hans takut kepada ayahnya sehingga untuk urusan meminta uang saku Hans lebih suka meminta kepada ibunya. UAH juga seorang ayah yang moderat dan terbuka sehingga anaknya disekolahkan di sekolah Belanda agar mendapatkan wawasan yang luas dan belajar kedisiplinan. Bekal pemikiran ini jelas dari pemikiran pembaharuan Islam modern yang menitikberatkan bukan hanya pendidikan agama, melainkan juga pendidikan modern. Pelajaran agama Hans peroleh dari kakeknya (Maharaja Imam Basiuni Imran) dan juga ibunya (Hanuna), tetapi pelajaran tentang hidup kebanyakan dari sang ayah. "Jangan berpolitik kalau tidak siap akan memakan ke diri kamu," petuah UAH. Sikapnya tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, dan golongan. Artinya, dalam pergaulan UAH tidak membatasi diri dan berteman dengan siapa saja. Pelajaran untuk selalu menghargai waktu dan mengembalikan barang pada tempatnya semula adalah sikap yang ditanamkan kepada Hans.

Bagi tetangganya, Samha binti Hajir, UAH seorang yang terhormat dan pendiam, sehingga jarang berkomunikasi dengan tetangga. Samha hanya mengetahui kesibukan UAH sebagai seorang politikus. Samha mendengar UAH sering ditahan, tetapi sebab apa ditangkap tidak diketahuinya. Pada umumnya, mengenai hal-hal yang bersifat politik, masyarakat awam

jarang mengetahuinya, kecuali aktivis atau masyarakat yang terlibat dalam organisasi. Samha mengakui bahwa informasi tentang keluarga UAH dan juga Maharaja Imam kurang, meskipun ia bertetangga dekat dengan mereka (seratus meter dari rumah Maharaja Imam). Selain rasa sungkan, juga ada etika bahwa tidak baik apabila membicarakan keluarga orang lain. Kedekatan keluarga UAH yang tinggal di rumah Haji Basiuni Imran terlihat pada saat diadakan kegiatan untuk menyambut hari besar Islam yang diisi dengan pengajian. Menurut Samha, UAH jarang terlihat di Sambas, sehingga aktivitas sosial lebih sering dilakukan oleh istrinya, Hanuna. Namun, dikenalnya UAH sebagai seorang politikus dan sering ditahan untuk urusan politik membuat Samha merasa bangga karena ada pejuang dari Sambas yang membela daerahnya dan berjuang untuk daerah.

G. PENUTUP

Tulisan ini belum mencerminkan secara keseluruhan bagaimana sosok seorang UAH; hanya sebagian kecil dari kehidupan beliau yang berhasil dihimpun. Tulisan-tulisan beliau yang tersebar di berbagai surat kabar belum dapat ditemukan karena keterbatasan waktu yang diberikan, sehingga tulisan ini adalah langkah awal pendataan tentang UAH. Dari permasalahan yang dibahas, maka secara umum pemikiran dan aksi atau perjuangan UAH bukan saja di tingkat daerah Sambas, melainkan sudah dikategorikan sebagai perjuangan yang lebih luas lagi. Salah satu perjuangan politiknya adalah aksi untuk membubarkan DIKB dan terbentuknya Provinsi Otonom Kalimantan Barat yang menjadi bagian dari NKRI. Aksi UAH ini adalah perjuangan bertaraf nasional.

Perjuangan politik UAH bukan hanya berupa aksi saja, ia juga menuangkan ide-ide atau pemikirannya dalam bentuk tulisan yang diterbitkan di media cetak. Salah satu tulisannya yang membuat UAH dipenjara di Jakarta dan di Yogyakarta adalah tulisan yang mengkritik kebijakan pemerintahan Nasakom terkait dengan Konfrontasi Malaysia dan kebijakan yang memberikan angin kepada PKI. Walaupun tulisan UAH tersebut belum didapatkan, foto yang menunjukkan beliau sakit pada saat pengasingan di Yogyakarta telah menjadi buktinya. Beberapa koran yang memberitakan sepak terjang perjuangan UAH di politik, pers, dan pendidikan pada saat beliau meninggal memberikan sedikit informasi, walaupun harus ditelusuri kembali dengan membawa bukti-bukti lain yang sezaman. Jujur saja tulisan tentang UAH belum pernah ada,

sehingga penulis harus menelusuri dari awal sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan di lain kesempatan ada yang berminat untuk menyempurnakan tulisan ini.

Selanjutnya, pemikiran dan perjuangan politiknya UAH tuangkan dalam berbagai surat kabar, baik itu dia sebagai salah satu pendiri, semisal *Sambas Bergolak*, harian *Pembangunan*, dan harian *Kerakyatan*, maupun dalam tulisan yang terbit secara *freelance*, salah satunya harian *Akcaya*. Pemikiran lain adalah dalam bidang pendidikan yaitu dengan membentuk Yayasan Pembangunan Sambas (YPS) dan Yayasan Pembangunan Nasional (YPN). Kedua yayasan ini bergerak dalam bidang pendidikan dan bahkan YPN sampai sekarang masih ada. Namun, belum diketahui bagaimana perkembangan YPN Pemangkat karena perlu waktu untuk menelitinya. Ide pemikiran UAH dalam bidang pendidikan tersirat dalam surat balasan untuk UAH dari sahabatnya di Yogyakarta. Dalam tulisan tersebut sahabatnya menyetujui pemikiran UAH bahwa sekolah umum hanya mencetak pengangguran di masa depan. Untuk itu perlu adanya sekolah yang bersifat khusus sehingga anak didik setelah lulus bisa langsung bekerja. Pemikiran UAH tentang sekolah kejuruan setidaknya memberikan alternatif sekolah yang mampu memberikan bekal bagi masa depan anak didik, tidak hanya pelajaran yang bersifat umum, tetapi juga pelajaran yang sifatnya keahlian seperti bidang pertanian. Pada masa sekarang sekolah yang digagas oleh UAH tersebut dinamakan sekolah kejuruan atau SMK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan KTI Lainnya

- Arpan. 1995. "Catatan Peninggalan Sejarah di Sambas". Penilik Kebudayaan Kecamatan Sambas. (Tidak Diterbitkan).
- Fahmi, Uray Riza. 2018. *Selayang Pandang Kerajaan Islam Sambas*. Sambas: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
- Listiana, Dana, Karel Juniardi, dan Raistiwar Pratama. 2014. *Pers dan Pemikiran Intelektual di Borneo Barat Masa Kolonial*. Pontianak: Kepel.
- Mahrus, Erwin. 2003. *Pembangunan Pendidikan : Gagasan Pendidikan Maharaja Imam Sambas Basiuni Imran (1855–1976)*. Pontianak: Yayasan Luhur Nusantara Kalimantan Barat.

- Minhad, Sarimin dan Usman Amin. 2000. *Setetes Air di Padang Pasir: Sejarah Perjuangan Laskar BPIKB (Barisan Pemberontak Indonesia Kalbar) Afdeling Singkawang*. Singkawang: Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kabupaten Sambas dan Bengkayang.
- Pringgodigdo, A.K. 1988. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat
- Purwana, Bambang H. Suta, Hasanudin, Pembayun Sulistyorini, dan Asnaini. 2004. *Sejarah Pemerintahan Kota Pontianak dari Masa ke Masa*. Pontianak: Pemerintah Kota Pontianak.
- Rahman, Ansar, Ya' Ahmad, Rd. Farid M. Panji Anom, Muhadi, dan Fahadi. 2001. *Kabupaten Sambas: Sejarah Kesultanan dan Pemerintahan Daerah*. Sambas: Pemda Sambas.
- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sabirin AG, Muhammad. 2008. "Catatan Saksi Mata, Pengalaman Hidup Pribadi dari Sabirin AG". Sambas. (Tidak Diterbitkan).
- . 2009. "Sejarah Berdirinya SMA Negeri Sambas". Sambas. (Tidak Diterbitkan).
- . 2010. "Sejarah Masuknya Islam di Kabupaten Sambas". Sambas. (Tidak Diterbitkan).
- . 2011. "Sejarah Perjuangan Sultan Hamid II (Sultan Pontianak) dan Sejarah Perjuangan Masyarakat-Rakyat Sambas Mengembalikan Ibukota Kabupaten Sambas". Sambas. (Tidak Diterbitkan).
- Sjahrir, Sutan. 1947. "Pidato PM Sjahrir dalam Perjanjian Linggardjati" dalam Majalah *Pantja Raja* No. 11–12. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Pemda. 1989. *Naskah Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat 1908–1950*. Pontianak: Pemerintah Daerah Kalimantan Barat.
- Tsafuddin II, Muhammad Sultan. 1903. "Silsilah Kerajaan Sambas 14 Ramadhan 1321 H/4 Desember 1903". Manuskrip Kerajaan Sambas.

Usman, Syafaruddin MHD. 2011. "Lintasan Sejarah Pers Kalimantan Barat". <https://kalbarina.web.id> diunduh pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 15.00.

Surat Kabar

Harian *Akcaya*, 24 Agustus 1991.

Harian *Akcaya*, 25 Agustus 1991.

Wawancara

1. Ibu Samha (76 tahun), Kampung Dagang, Sambas, September 2021.
2. Uray Burhan (60 tahun), Jalan Penjara Gang Rahmad, Sambas, November 2021.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

EPILOG

ANDI ACHDIAN

Penulisan dua tokoh sejarah dalam buku ini mengingatkan kita bahwa proses pembentukan sebuah bangsa tidak hanya berlangsung di Jawa yang menjadi pusat kekuasaan kolonialisme Belanda saat itu. Ada banyak orang di berbagai tempat yang turut terlibat dalam proses menjadi Indonesia seperti disampaikan dalam buku ini terkait pembahasan terhadap sosok R.M. Nalaprana dan Uray Abdul Hamid sebagai tokoh penting dari Kalimantan Barat. Uraian terhadap setiap tokoh menampilkan gambaran menarik individu-individu yang melakukan perjalanan lintas batas, baik kelas sosial, ras, dan agama, untuk mengembangkan kesadaran diri yang baru di dalam komunitas politik bernama Indonesia. Keseluruhan perjalanan ini adalah inti penting yang menjadi pesan utama dalam penyusunan inventarisasi tokoh-tokoh sejarah di berbagai tempat di Indonesia.

Pada dekade-dekade awal abad ke-20, Indonesia adalah gagasan abstrak yang baru terbentuk di kalangan aktivis pergerakan anticolonial. Penggunaannya secara politik dimulai ketika Perhimpunan Indonesia, organisasi para pemuda di Belanda, mulai mengorganisasi diri sebagai warga jajahan untuk membahas masalah-masalah bersama. Penggunaan nama Indonesia dalam proses ini menjadi ikatan bersama bagi para pemuda yang datang dari latar belakang budaya dan etnik yang berbeda di wilayah Nusantara saat itu.

Bagaimanapun, banyak kisah tentang sosok-sosok tersebut dalam historiografi Indonesia masih terbatas. Buku yang berisi kisah tentang sosok R.M. Nalaprana dan Uray Abdul Hamid dengan demikian menjadi sumbangan yang memperkaya pemahaman kita tentang

proses menjadi Indonesia di Kalimantan Barat. R.M. Nalaprana sebagai ketua Persatoean Anak Borneo (PAB) telah mengukirkan bagaimana proses menjadi Indonesia yang beragam. Begitu juga dengan kiprah yang dijalani Uray Abdul Hamid sebagai sosok intelektual. Melalui pemikiran yang dituangkan dalam tulisan dan aktivitasnya dalam dunia pendidikan, ia memberi gambaran perjalanan menjadi Indonesia dengan caranya sendiri.

Dalam menggali kedalaman kisah kedua sosok tersebut, kedua penulis ini buku ini telah menjalani keseluruhan proses pekerjaan yang dilakukan sejarawan dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan (heuristik), kritik sumber, interpretasi, dan tinjauan historiografi tentang kedua tokoh tersebut dan tempatnya dalam sejarah kebangkitan nasional Indonesia. Ketersediaan sumber tidak dapat disangkal merupakan tantangan terbesar yang dihadapi keduanya. Berbeda dengan sosok-sosok yang telah menjadi *mainstream*, kisah dari mereka yang berada di pinggiran memerlukan kerja keras yang lebih mendalam. Sedikit saja arsip-arsip resmi menampilkan nama mereka. Begitu juga pemberitaan tentang mereka dalam surat kabar *mainstream*. Jadi, apa yang harus dilakukan adalah menggali sumber-sumber sejarah baru untuk memungkinkan rekonstruksi sejarah dari tiap-tiap tokoh tersebut dapat dipahami arti penting dan relevansinya dalam kehidupan Indonesia kontemporer.

Di sini, saya ingin memberikan sedikit catatan terkait metode penelitian sejarah. Memang tidak mudah menggali sebuah kisah dari mereka yang terpinggirkan. Apalagi bila pekerjaan penelitian sejarah begitu saja mengambil alih gagasan tentang "sumber-sumber sejarah" secara konvensional seperti arsip dan dokumen resmi. Mengandalkan sumber-sumber konvensional pada akhirnya hanya akan membawa para peneliti sejarah pada titik buntu tentang kisah yang disampaikannya. Berkaca dengan pengalaman Indonesia, penggunaan sumber-sumber sejarah resmi dalam metode sejarah konvensional Barat memang hanya akan menekankan yang apa yang tertinggal dalam tulisan (baik dalam arsip dan dokumen).

Namun, hanya dengan menggunakan metode tersebut sudah barang tentu banyak kisah yang tak terungkap. Sejarawan H.J. de Graaf ketika menulis sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Jawa abad ke-17 menghadapi kesulitan tersebut. Apabila ia hanya mengandalkan metode konvensional, ia sudah barang tentu tidak bisa mengungkapkan banyak kisah tentang bagaimana kemunculan kerajaan-kerajaan tersebut. Keputusannya

menggunakan sumber-sumber tradisional masyarakat Jawa melalui *babad* dan *serat* pada akhirnya membuka jendela terhadap kisah-kisah yang tak muncul dalam sumber sejarah konvensional.

Selain persoalan sumber, catatan penting juga perlu digarisbawahi terkait gagasan lokal dan nasional. Ada satu kesan yang kuat bahwa penulisan sejarah lokal adalah sebuah “cabang pinggir” dari sebuah sejarah nasional. Pandangan ini menurut saya menjadikan para penulis sejarah lokal adalah sekedar orang-orang yang bergerak di pinggir di bawah dominasi sejarawan nasional. Ringkasnya, sifat lokal dan nasional dalam penulisan sejarah Indonesia memiliki kesan tentang geografi kekuasaan ilmu pengetahuan.

Sekarang ini saya kira pandangan seperti ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Lokalitas bukan berarti sebuah wilayah pinggir, tetapi sebuah lokus tempat peneliti sejarah menggali kedalaman pengalaman manusia yang universal. Seperti antropolog yang melakukan penelitian etnografi di wilayah terpencil, pekerjaan mereka bekerja bukan tentang masyarakat terpencil tersebut, tetapi bekerja di tempat terpencil tersebut untuk memahami watak dan makna budaya manusia yang universal. Saya kira kedua penulis buku ini—yang menariknya adalah perempuan—akan menjadi rintisan dalam proses tersebut.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

NASIONALIS

DI LINGKUNGAN ARISTOKRAT
ISLAM SAMBAS



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

TENTANG PENULIS

Dana Listiana (dana.listiana@gmail.com) adalah Peneliti Ahli Muda yang aktif di BPNB Kalimantan Barat hingga medio 2021 lalu. Seiring dengan penataan lembaga riset di Indonesia, kini ia bekerja dalam wadah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Lulus dari jurusan Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran tahun 2006 dengan skripsi "Perkembangan Pasar Pontianak sebagai Pusat Perekonomian *Afdeelingshoofdplaats* Pontianak 1918–1942". Lulus dari Program Studi S-2 Sejarah Universitas Gadjah Mada pada 2017 dengan tesis "Sistem *Pacht* dan Perluasan Negara Kolonial di Pontianak 1819–1909".

Kajian yang pernah ditulis antara lain *Ibukota Pontianak 1779–1942: Lahir dan Berkembangnya Sebuah Kota Kolonial* (2009); *Dua Wajah Kota Martapura: Studi tentang Perubahan Sosial Ekonomi* (2010); *Banjarmasin Akhir Abad XIX hingga Medio Abad XX: Perekonomian di Kota Dagang Kolonial* (2011); *Tanah Sintang Masa Kolonial: Telaah Sederhana tentang Perubahan Status Pemerintahan dan Wilayah Kekuasaan* (2012); *Pasir Abad XVIII–XX: Kota Bandar Menjadi Lanskap Gubernemen* (2013); "Kampung Cina Banjar di Banjarmasin" (2014); *Pers dan Pemikiran Intelektual di Borneo Barat Masa Kolonial* (2014); "Rubrik Sinar Iboe di Majalah Tjaja Timoer: Gagasan Penguatan Perempuan dalam Pers Lokal di Kalimantan Barat Tahun 1928" (2017); "Indonesia dalam Penciptaan Nasionalisme Borneo: Rasa Kebangsaan Persatoean Anak Borneo dalam Majalah Kesedaran dan Doenia Pemoeda di Kalimantan Barat Tahun 1940" (2019); "Satu Dayak dan Menjadi Indonesia-Dayak: Impian Persatuan Bangsa dalam Soeara Pakat Terbitan Banjarmasin Tahun 1940an" (2019); dan *Manuskrip Kitab Qonun Sambas: Wawasan Ruang Perairan Versus Daratan* (2020).

Lisyawati Nurcahyani (lisyawati.nurcahyani@gmail.com) lahir di Surakarta pada 9 Februari 1965, adalah peneliti sejarah di Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat sejak 1991 sampai sekarang. Tamat dari Jurusan Sejarah Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1990 dan melanjutkan studi serta memperoleh gelar M.Si. di Jurusan Sosial dari Studi Ilmu Sosial pada Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat pada tahun 2003 dengan judul tesis "Strategi Adaptasi Pengungsi Kerusakan Sambas di Relokasi Tebang Kacang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak" (sekarang mengalami pemekaran menjadi wilayah Kabupaten Kubu Raya).

Hasil tulisan yang telah diterbitkan antara lain *Sejarah Sosial Melawi (Suatu Tinjauan Sosial dan Ekonomi)*; *Sejarah dan Pengaruh Islam di Kotawaringan*; *Balikhpapan dari Rawa Menjadi Sumber Harta 1907–1942*, *Samodra Tarakan 1878–1942*; *Sejarah Sosial Politik Bulungan*; *Dinamika Diaspora Masyarakat Bugis Sulawesi Selatan di Pantai Timur Kalimantan Abad XVII–XIX*, *Transmigrasi Masyarakat Jawa di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala*; *Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Kalimantan Barat*; *Pemikiran Hausman Baboe: Identitas dan Persatuan Bangsa Dayak (1907–1944)*; *Pemikiran Haji Rais bin Abdurrachman dan Pergerakan Nasional di Kalimantan Barat (1900–1942)* dan masih banyak lagi.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

Andi Achdian (angdhiri@gmail.com) adalah pengajar di Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Nasional, Jakarta. Dia juga aktif sebagai pengurus pusat organisasi Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) dan menjadi Editor Pelaksana *Jurnal Sejarah*, terbitan MSI. Achdian juga seorang kurator dan anggota Dewan Eksekutif pada Museum HAM Munir (Omah Munir). Minat kajiannya adalah sejarah kolonial, nasionalisme, dan pergerakan antikolonial pada peralihan abad ke-20 di Hindia Belanda.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

NASIONALIS

DI LINGKUNGAN ARISTOKRAT
ISLAM SAMBAS



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



NASIONALIS

DI LINGKUNGAN ARISTOKRAT ISLAM SAMBAS

Studi tentang tokoh sejarah dalam buku ini ditempatkan sebagai jendela untuk memahami perkembangan nasionalisme di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Lewat tokoh yang tentu saja berfokus pada aspek kepribadian dan peranannya, studi nasionalisme ini diharap dapat menghasilkan sisi kemanusiaan yang unik.

Melalui Raden Muslimun Nalaprana dan Uray Abdul Hamid, kajian ini menyuguhkan ide dan praktik nasionalisme dalam transformasi struktural, yakni dari sistem feodal-kolonial ke sistem demokratis-nasional. Raden Muslimun Nalaprana, seorang aristokrat dan birokrat, tumbuh menjadi nasionalis kanan yang kooperatif. Adapun Uray Abdul Hamid tumbuh menjadi seorang nasionalis kiri anti-kolonial. Idenya termanifestasi melalui aksi heroik bersama laskar-laskar pemuda Sambas dalam situasi revolusi kemerdekaan hingga situasi yang kerap disebut era pembangunan pada masa Orde Baru.

Dalai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

Lebih lanjut, tulisan dalam buku ini diharap dapat memberi pemahaman bahwa bentuk, corak, dan dimensi nasionalisme itu beragam. Selain itu, terdapat sebuah sikap nasionalisme serupa yang dapat dipetik dari kedua tokoh, yakni semangat membangun daerah. Sebuah sikap nasionalisme yang selalu relevan untuk diteruskan oleh generasi selanjutnya.



Padalarang-Bandung
Telp. +62 812 22205182

Email: penerbit.mja.bandung@gmail.com



Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ISBN 978-623-7526-54-4

